

GREEN CITY GREEN COMMUNITY

Oktober 2005

Percik

Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan



Penyelenggaraan AMPL

MENUNGGU

KONTRIBUSI SWASTA



ISSN 1829-5967





Media Informasi Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan

Diterbitkan oleh:

Kelompok Kerja Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan

Penasihat/Pelindung:

Direktur Jenderal Cipta Karya
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Penanggung Jawab:

Direktur Permukiman dan Perumahan,
BAPPENAS

Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi,
DEPKES

Direktur Perkotaan dan Perdesaan
Wilayah Timur, Dep. Pekerjaan Umum
Direktur Bina Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna, DEPAGRI
Direktur Penataan Ruang dan
Lingkungan Hidup, DEPAGRI

Pemimpin Redaksi:

Oswar Mungkasa

Dewan Redaksi:

Ismail, Johan Susmono,
Indar Parawansa, Bambang Purwanto

Redaktur Pelaksana:

Maraita Listyasari, Rewang Budiyan, Rheidha Pramudhy, Joko Wartono, Essy Asiah, Mujiyanto

Desain/Illustrasi:

Rudi Kosasih

Produksi:

Machrudin

Sirkulasi/Distribusi:

Meiza Aprizya, Agus Syuhada, Metzy S.Oc

Alamat Redaksi:

Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta Pusat.

Telp./Faks.: (021) 31904113

<http://www.ampl.or.id>

e-mail: redaksipercik@yahoo.com

redaksi@ampl.or.id

oswar@bappenas.go.id

Redaksi menerima kiriman
tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan
dengan air minum dan penyehatan lingkungan
dan belum pernah dipublikasikan.

Panjang naskah tak dibatasi.

Sertakan identitas diri.

Redaksi berhak mengeditnya.

Silahkan kirim ke alamat di atas.

Daftar

ISI

Dari Redaksi	1
Suara Anda	2
Laporan Utama	
Penyelenggaraan AMPL, Menunggu Kontribusi Swasta	3
Apa Itu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?	4
Swasta Peduli, Sudah Mulai	6
Wawancara	
Ketua CFCD, Thendri Supriatno	
Bersinergi Memberdayakan Masyarakat	7
Reportase	
<i>Green City Green Community</i>	
Maunya <i>Ngajak</i> Peduli Sampah	9
Wawasan	
Pengelolaan Sampah Regional, Siapa Takut?	15
Megumi Air Minum dari Sumber tak Terbatas	18
Air, Antara Asas Kelestarian dan Tuntutan Kemakmuran di Tengah Kelangkaan dan Kebutuhan Antara Hak Monopoli Generasi Sekarang dan Warisan untuk Generasi Mendatang	20
Studi	
Studi Analisis Pelayanan AMPL di Kabupaten di Era Desentralisasi	
Teropong	
Sanitasi untuk Masyarakat (SANIMAS)	
Antara Harapan dan Kenyataan	25
Seputar WASPOLA	28
Seputar AMPL	32
Inovasi	
Pompa Air Tanpa Motor	41
Lembaga	
Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	
Permukiman Bekasi Ingin Bangkit di Tengah Kelesuan	42
Info Buku	43
Info CD	44
Info Situs	45
Klinik IATPI	46
Agenda	47
Pustaka AMPL	48

Pembaca, waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, **Percik** sudah berusia dua tahun. Majalah ini terbit edisi perdana pada Agustus 2003 dengan mengangkat laporan utama tentang Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan. Saat itu, perwajahannya sangat sederhana. Isinya pun tak terlalu banyak. Rubriknya hanya laporan utama, wawancara, opini, kunjungan, cermin, info buku, info situs, dan ragam.

Dari waktu ke waktu, kami terus berbenah. Pada edisi kedua dan ketiga, perubahan kembali terjadi, baik dari sisi wajah maupun rubrikasi. **Percik** mulai mencari bentuk yang diharapkan. Barulah pada edisi keempat, seiring pengembangan organisasi, **Percik** menemukan bentuknya hingga saat ini. Tentu di sana-sini ada sedikit modifikasi tapi tak terlalu signifikan.

Kami sangat bergembira, dalam usia belum begitu lama, **Percik** telah mulai ada di hati pembaca, terutama mereka yang bergerak dan terkait bidang air minum dan kesehatan lingkungan, baik yang berada di birokrasi (pusat dan daerah), kalangan perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat umum. Paling tidak ini bisa dilihat dari surat dan tulisan/artikel serta email yang masuk ke meja redaksi. Ini bisa terjadi berkat usaha dari seluruh anggota Pokja AMPL yang bertindak sebagai “marketing”

Percik dalam setiap acara yang dihadapinya yang terkait dengan AMPL. Selain memang **Percik** dibagikan secara cuma-cuma ke seluruh Pemda di Indonesia.



Pembaca, kini **Percik** menapaki langkah baru memasuki tahun ketiga. Kami menyadari banyak hal yang belum dilakukan untuk membenahi majalah tersegmen ini. Banyak hal yang masih harus kita pikirkan bersama. Termasuk sampai kapan majalah ini bisa bertahan, mengingat hingga saat ini **Percik** hadir atas dukungan penuh dana anggaran pemerintah sehingga bisa dibagikan secara gratis. Bukan suatu yang tidak mungkin, anggaran itu dihen-

tikan. Dari sisi pemberdayaan pembaca, tampaknya pembagian secara cuma-cuma kurang pas karena **Percik** selalu berusaha menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat. Jangan-jangan distribusi seperti ini malah tidak mendidik. Itu semua sedang kami antisipasi dan pikirkan. Barangkali para pembaca pun mempunyai gagasan yang brilian agar **Percik** bisa berkelanjutan dengan adanya partisipasi para pembaca semua.

Yang pasti, kami terus berbenah untuk menyampaikan yang terbaik bagi Anda.

Kali ini kami tampil agak sedikit beda dari sisi disain.

Semoga perubahan itu makin membuat mata kita lebih fokus membacanya. Di samping itu, kami juga menambah rubrik yaitu inovasi, studi, dan lembaga. Kami menilai ada hal menarik yang bisa dipetik dari rubrik baru tersebut.

Beberapa rubrik baru lainnya juga sedang kami persiapkan untuk edisi-edisi berikutnya.

Ini semata-mata demi penyebarluasan informasi kepada para pemangku kepentingan di bidang AMPL. Ternyata, rubrik-rubrik yang ada belum mampu menampung persoalan-persoalan dan perkembangan baru yang sedang berkembang di tengah-tengah kita.

Perubahan tidak boleh berhenti demi mencapai kebaikan. Oleh karena itu, **Percik** tetap menantikan masukan dan kritikan serta dukungan Anda. Tanpa Anda, majalah ini tak ada apa-apanya. Mari kita bersama-sama memajukannya sehingga kehadiran **Percik** mampu memberikan kontribusi yang positif bagi sektor air minum dan kesehatan lingkungan di Indonesia. Wassalam. ■

Usul Rubrik Baru

Terima kasih atas kiriman majalah Percik edisi Juli 2005. Percik memang telah menyajikan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat pembacanya. Kami mengusulkan agar redaksi menambah rubrik baru yaitu laporan daerah, seni dan budaya (cerpen, ulasan, dan puisi), dan sayembara penulisan dalam rangka ulang tahun Percik. Kami tak tahu persis apakah ketiga item itu pernah dimunculkan. Kami siap membantu dan menjadi koresponden jika diperlukan.

Sulaiman Pirawan

Jl. Danau Sentarum Gg. H. Nawawi 68
Kel. Sui Bangkong, Pontianak 78116

Terima kasih atas masukannya. Untuk rubrik daerah sejauh ini memang belum ada, namun kami senantiasa memuat kegiatan dan keberhasilan/kegagalan di daerah melalui rubrik-rubrik yang ada. Mengenai seni dan budaya, tampaknya kami belum bisa memenuhinya mengingat **Percik** sementara ini mendedikasikan diri khusus di bidang air minum dan penyehatan lingkungan saja. Sayembara penulisan cukup menarik, dan Pokja AMPL pernah menyelenggarakan itu pada tahun lalu. Umpan baliknya cukup bagus. (Redaksi)

Isi Relevan

Saya mahasiswa tugas belajar di Institut Teknologi Bandung (ITB). Saya sangat tertarik setelah membaca Majalah Percik edisi Juli 2005 di perpustakaan kampus. Informasi yang dimuat sangat relevan dengan kuliah-kuliah yang saya dapatkan yakni yang berhubungan dengan pembangunan perdesaan, lebih khusus lagi mata kuliah *Worskhop*, di mana kami di lapangan banyak menemukan permasalahan seperti yang diulas majalah ini sebagai contoh buruknya sanitasi, sumber air yang tercemar oleh limbah domestik,

dan limbah buangan pabrik. **Percik** dapat menjadi bahan literatur yang sangat berarti untuk mengetahui masalah terkait di daerah lain.

Oleh karena itu, saya sangat berharap bisa mendapatkan Majalah Percik dari edisi awal hingga yang terbaru dan berlangganan. Jika *hard copy*nya tidak tersedia, *soft copy* juga tidak mengapa. Semoga Percik tetap eksis.

Arfianto Ahmad

Jurusan Manajemen Pembangunan Perdesaan

Departemen Arsitektur ITB

Gedung Labtex IX B

Jl. Ganesa 10, Bandung

Percik memang ingin menjadi sarana tukar informasi mengenai air minum dan kesehatan lingkungan. Kami sangat bergembira bila Anda mendapatkan manfaat dari majalah ini. Permintaan Anda akan segera dipenuhi bagian distribusi kami. (Redaksi)

Informasi Air Payau

Kami telah mendapatkan **Percik** edisi Mei 2005. Semoga Percik semakin berkualitas dan menjadi media *sharing* pemerhati permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan.

Kami sampaikan bahwa di daerah kami, Pati, terutama Pati Selatan yang meliputi 8 kecamatan, 72 desa, dan 163.381 jiwa mengalami kekurangan air bersih. Air yang ada terasa asin (payau) dan memiliki kapur tinggi. Air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum dan memasak. Sementara ini penduduk setempat memenuhi kebutuhan air minum dan memasak ini dari desa lain atau membeli dari penjual air.

Melalui media ini, kami ingin menimba ilmu/pengalaman lapangan kepada *stakeholder* dalam upaya pengolahan air payau tersebut sehingga menjadi layak dikonsumsi bagi masyarakat dengan teknologi tepat guna dan biayanya terjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Semoga **Percik** bisa menjadi fasilitator harapan

masyarakat Pati Selatan.

Ir. Budi Waluyo

Kasubdin Cipta Karya

Diskimpras Kab. Pati

Jawa Tengah

Semoga pemuatan ini bisa menjadi jalan bagi *stakeholder* lain yang berkompeten di bidangnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Anda. Redaksi

Mendapatkan Percik

Saya salah seorang pegiat dari lembaga yang bergerak di lingkungan hidup di Yogyakarta. Saya tertarik untuk memilikinya untuk menambah referensi lembaga kami.

Tri Apriyadi

Yayasan DAMAR

Karanggayam CT VIII / 26 A, Depok, Sleman

Yogyakarta 55281.

Surat sejenis datang dari Yudhi Kristian Jl. Sadang Subur 1/48, Sadang Sari RT 2/14, Sadang Serang, Bandung 40134; Ida Sukmawati Jl. Akar Wangi II/17 Kompleks Pertanian Atsiri Permai, Citayam, Depok; Arie Istandar, USAEP Indonesia, Plaza DM, 18th Floor, Ste 1807, Jl. Jend Sudirman Kav 25, Jakarta 12920; Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Kota Sawahlunto, Jl. Lubang Tembok, Kel. Saringan. Kec. Lembah Segar, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat; Robert Ainslie, John Hopkins University-Centre of Communication, Gd. Tifa Lt. 5, Jl. Kuningan Barat 26 Jakarta; Kami akan kirim.

Selain menerima surat masukan dan permintaan di atas, kami juga menerima surat balasan yang berisi ucapan terima kasih dan informasi bahwa Percik sudah diterima. Para pengirim tersebut yaitu Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Meneg LH, Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, dan PDAM Kota Semarang. Dan banyak surat lain serupa. **Redaksi.**

Penyelenggaraan AMPL, Menunggu Kontribusi Swasta

Paradigma pembangunan telah berubah. Tidak lagi bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tapi pembangunan berkelanjutan.

Kalangan industri pun mengubah landasan berpikirnya.

Tidak lagi berorientasi profit semata, tapi peduli terhadap lingkungan, baik alam maupun sosial ekonomi.

Sudahkah mereka menyentuh sektor air minum dan penyehatan lingkungan?



Lima tahun lalu, tepat bulan September, Sidang Umum PBB menetapkan *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai target bagi komunitas global untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seluruh penduduk. Dua tahun berikutnya, dalam *the World Summit on Sustainable Develop-*

ment di Johannesburg, PBB menegaskan kembali MDGs dan menambahkan target khusus tentang sanitasi dan higienitas.

Kondisi umat manusia di dunia, khususnya di negara berkembang dan miskin, tak beranjak naik seiring kemajuan negara-negara maju. Data tahun 2000 menunjukkan 2,4 milyar manusia tak memiliki akses yang baik ke sanitasi.

Sebanyak 81 persen di antaranya berada di desa. Selain itu 1,1 milyar manusia tak memiliki akses ke sumber air. Sebanyak 86 persen berada di desa. Tak heran, ini memunculkan berbagai penyakit, seperti diare dan sebagainya.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk dunia diperkirakan 7 milyar. Sebagian besar pertumbuhan penduduk terjadi di negara berkembang. Peningkatan itu akan menambah jumlah penduduk yang belum mempunyai akses terhadap sanitasi yang memadai menjadi 3,4 miliar pada tahun 2015. WHO memperkirakan setiap tahun sebanyak 150 juta tambahan penduduk yang harus mendapatkan akses terhadap sanitasi.

Keadaan Indonesia pun tak jauh berbeda. Data tahun 2002 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar yang memadai yaitu jamban yang dilengkapi *cubluk* atau tangki septik, baru mencapai 63,5 persen. Proporsi di perdesaan relatif lebih rendah, hanya berkisar 52,2 persen, sementara di perkotaan telah mencapai 77,5 persen.

Angka tersebut hanya menunjukkan proporsi yang tersedia tetapi tanpa membedakan kualitasnya. Karenanya data di atas ditengarai belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Kondisi nyata mungkin lebih buruk dari itu. Diperkirakan banyak sarana sanitasi dasar yang ada saat ini sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan kurang memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan.

Bila keadaan ini dikaitkan dengan target MDGs yang harus dicapai Indonesia, tampaknya sangat berat. Apalagi

bila seluruh pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah yang sebenarnya menjadi tugasnya melayani rakyat karena pemerintah mengaku tak memiliki cukup dana untuk pembangunan. Belum lagi sektor air minum dan sanitasi memang kurang memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan termasuk para wakil rakyat.

Kontribusi Swasta

Paradigma baru muncul dalam proses pembangunan, khususnya di negara berkembang, bahwa semua pihak harus ikut andil dan peduli dalam pembangunan. Negara, kalau bisa, hanya menjadi fasilitator. Negara pun menggandeng sektor swasta dan masyarakat. Di sisi masyarakat, muncul program pemberdayaan agar mereka mampu membangun sendiri komunitasnya dan tak lagi bergantung sepenuhnya kepada pemerintah.

Sementara sektor swasta, sebelumnya tak ingin terjun langsung ke masyarakat. Ini wajar karena mereka merasa telah memberikan pajak dan pungutan-pungutan lain kepada negara sehingga negaralah yang seharusnya menjalankan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Namun akhirnya swasta pun mau tidak mau harus terlibat, soalnya ternyata kepentingannya berbeda. Apa yang diharapkan perusahaan swasta belum tentu sama dengan program pemerintah. Maka pada tahun 1970-an, terjadi perubahan paradigma bisnis. Mereka tak sekadar memikirkan profit (*single bottom line*), tetapi peduli terhadap lingkungan baik alam maupun sosial ekonomi. Paradigma berubah dari *shareholders responsibility* menjadi *stakeholders responsibility*.

Kenyataan ini mendorong dunia industri mengkaji kembali visi dan misi perusahaan. Maka para CEO perusahaan meletakkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) dan kelanjutan pertumbuhan perusahaan sebagai bagian dari *Good Corporate Governance*. Benih ke-

sadaran ini muncul dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992.

Kini dalam lingkungan global yang berubah, reputasi dan citra perusahaan tak sekadar dilihat dari sisi profit tapi menyangkut (1) kemampuan finansial, (2) mutu produk dan pelayanan, (3) fokus pada pelanggan, (4) keunggulan dan kepekaan SDM, (5) *reliability*, (6) inovasi, (7) tanggung jawab lingkungan, (8) tanggung jawab sosial, dan (9) penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai itu yaitu (1) adil (*fair*) kepada seluruh *stakeholders* (tidak hanya kepada *shareholders*); (2) Proaktif dan berperan sebagai *agent of change* dalam pembeberdayaan masyarakat di

daerah operasi; (3) Efisien, berhati-hati dalam pengeluaran biaya yang sia-sia terutama untuk penyelesaian masalah yang timbul dengan fokus pada *stakeholder* di sekitar daerah operasi.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan bisa menyelenggarakan program pengembangan masyarakat (*Community Development/CD*); dan Program Pengembangan Hubungan/Relasi dengan publik (*Relations Development/RD*). dengan sasaran (1) Pemberdayaan SDM lokal (pelajar, pemuda dan mahasiswa termasuk di dalamnya); (2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sekitar daerah operasi; (3) Pembangunan fasilitas sosial/umum, (4) Pengembangan kesehatan masyarakat

Apa itu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sinonim dari *Good Corporate Citizenship* (GCC), yang memiliki makna pemahaman dan pengelolaan suatu pengaruh yang lebih luas dari perusahaan kepada masyarakat untuk keuntungan perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan (*Marsden and Andriof, Warwick Business Scholl UK, 2001*). Sementara dalam *Indonesia Business Link*, CSR disebut sebagai pembuatan keputusan bisnis yang berhubungan kepada pelaksanaan etika bisnis yang tidak semata-mata dimotivasi oleh *marketing*, relasi publik (PR), atau keuntungan komersial lainnya.

CSR dipandang mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan membantu perusahaan dalam memperbaiki performa keuangannya dan akses pada modal, meningkatkan *brand image* (citra perusahaan) dan penjualan, memelihara kualitas kekuatan kerja, memperbaiki pembuatan keputusan pada isu-isu kritis, menangani risiko secara lebih efi-

sien, dan mengurangi biaya jangka panjang.

Dalam program CSR ini perusahaan bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, kesetaraan, akses, partisipasi, perdamaian dan keamanan, serta perlindungan terhadap lingkungan. Perusahaan yang mengembangkan model bisnis baru tersebut akan menjadi *the business leaders of the 21 century* (*Mark M. Brown, UNDP in Business and Poverty; Bridging The Gap, 2002*).

Dari sana muncul istilah *corporate philanthropy* yakni bagaimana perusahaan besar dan kecil dan beragam sektor mengeluarkan kontribusi tunai untuk berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lainnya sebagai bagian dari keseluruhan strategi *corporate citizenship*.

Banyak manfaat yang bisa diambil dari program CSR ini antara lain meningkatkan *brand image*, pengurangan kemiskinan, meniadakan konflik, kelestarian lingkungan, investasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan. ■ (MJ)

kat, (5) Sosbud, dan lain-lain.

Pada sisi ini sebenarnya perusahaan dapat menjadi bagian penting dalam memacu pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Tak dipungkiri, kondisi sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan masih jauh dari harapan. Maka peluang kalangan industri untuk memperoleh nilai tambah dari masyarakat sangat terbuka lebar. Apalagi, pemerintah telah memiliki kebijakan nasional pembangunan AMPL yang substansinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah dan kalangan industri, baik swasta maupun BUMN, target pencapaian air minum dan penyehatan lingkungan akan bisa didekati.

Era Otonomi

Pemerintah daerah pun sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk bisa memacu pemberdayaan masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Pemda bisa menyusun program bersama dengan kalangan industri. Hanya saja perlu ada perubahan paradigma dari aparat pemda. Perusahaan sekarang tak bisa hanya sekadar dimintai uang untuk membantu program pemberdayaan. Perusahaan harus dilibatkan secara langsung.

Seperti dikemukakan Ketua *Corporate Forum for Community Development (CFCD)* Thendri Supriatno, perusahaan menyambut gembira bila ada kerja sama dengan pemda. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam forum tersebut berharap pemda bisa bertindak sebagai fasilitator dan regulator yang memungkinkan berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat secara sukses.

Pemda juga perlu tahu bahwa kalangan industri akan sulit apabila dimintai dana untuk alokasi *charity*. Mereka sudah menyadari pemberian hadiah ini akan menimbulkan ketergantungan dan tidak mendidik. Mereka pun tahu sarana dan prasarana akan dipeli-



Pemerintah daerah pun sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk bisa memacu pemberdayaan masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Pemda bisa menyusun program bersama dengan kalangan industri.

hara (berkelanjutan) bila masyarakat dilibatkan secara langsung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan.

Satu lagi peluang yang harus diambil pemerintah daerah dari perusahaan adalah spirit wirausaha dan organisasi yang baik. Kalangan industri memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian yang bisa dimanfaatkan misalnya dalam mengentaskan kemiskinan dan menggerakkan roda ekonomi rak-

yat. Mereka tentu lebih kompeten di lapangan dibandingkan dengan aparat pemda yang biasa mengurus birokrasi.

Penutup

Akhirnya bagaimanapun perusahaan ingin eksis di tengah-tengah masyarakat. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan kalangan industri. Mereka memiliki *social investment*. Bagaimana sekarang dana itu bisa dimanfaatkan secara tepat bagi pembangunan yang melibatkan tiga pihak-pemerintah, swasta, dan masyarakat-secara bersama-sama. Pola seperti ini diharapkan bisa menguntungkan ketiganya. Perusahaan bisa kondusif dalam berbisnis, tanpa ada friksi dengan masyarakat, pemerintah bisa menjalankan program-programnya dan mendapatkan nilai tambah dari perusahaan, sedangkan masyarakat terangkat kesejahteraannya. Lebih dari itu target pembangunan, khususnya bidang air minum dan penyehatan lingkungan, tercapai. ■ (MJ)

Swasta Peduli, Sudah Mulai

U paya pihak swasta peduli terhadap masyarakat sekitarnya, termasuk masalah air minum dan penyehatan lingkungan sebenarnya sudah mulai tumbuh. Hanya saja, mungkin karena skalanya kecil dan belum meluas, gemanya kurang begitu terasa.

Sebut saja PT Unilever Indonesia Tbk, yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui Yayasan Unilever Peduli. Yayasan tersebut bergerak di empat program yakni lingkungan, UKM, pengembangan kesehatan, dan program bantuan kemanusiaan.

Environment Program Manager, PT Unilever Indonesia Tbk, Silvi Tirawaty, menjelaskan di bidang lingkungan saat ini pihaknya sedang menggarap sampah. "Kami sangat peduli dengan kondisi sungai Brantas khususnya yang melintas di Surabaya yang tercemar. Hampir 60 persennya oleh limbah domestik (rumah tangga)," katanya.

Perusahaan itu berusaha memberdayakan rumah tangga untuk peduli sampah. Pada tahap awal, yayasan itu mencoba menetapkan daerah binaan di RW 3 Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya. Beberapa orang warga direkrut sebagai kader lingkungan. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Pada calon kader kemudian dilatih selama tiga hari dengan materi pelatihan mengenai sampah, penghijauan, sanitasi, dan pembekalan diri. Istri walikota pun dilibatkan untuk melantik para kader.

Dalam melaksanakan kegiatannya, yayasan tersebut bekerja sama dengan sebuah universitas di Surabaya. Perguruan tinggi ini menyumbangkan pengetahuannya mengenai komposter unit yang terbuat dari drum-drum bekas yang bisa digunakan untuk mengolah sampah secara alami di tingkat rumah tangga.

Para kader ini dalam satu bulan diharapkan mampu mengajak tetangga-

tetangga di sekitarnya. Bersama dengan itu, para kader secara sukarela mulai memperlakukan sampahnya sejak di rumah. Hasilnya, lumayan bagus. Lambat laun laju pencemaran mulai menurun dan warga mulai mengikuti apa yang dilakukan para kader lingkungan. Selama proses itu, Unilever bertindak sebagai pendamping.

"Awal 2005, program ini bergulir ke 5 RW (25 RT)," kata Silvi. Penularan keberhasilan salah satunya dilakukan dengan *road show* kader-kader tersebut ke RW lain. Proses ini menghasilkan 70 kader baru sehingga total kader lingkungan ada 120 orang.

Dalam rangka dinamisasi dan keberlangsungan program tersebut, lanjut Silvi, ada lomba antar RT menyangkut sampah dan sanitasi. Kegiatan ini berhasil memicu warga untuk menjadikan daerahnya bersih dan sehat. Selain itu, warga pun mulai dapat menikmati hasil pemilihan sampah rumah tangganya. Sampah anorganik bisa dijual. Pada proses ini, Unilever, menghubungkan warga dengan perusahaan daur ulang. Uang hasil penjualan sampah anorganik dibelikan tanaman obat keluarga.

Guna menggemakan kepedulian masyarakat terhadap sampah secara lebih luas, lanjut Silvi, pihaknya bekerja sama dengan koran terbesar di Jawa Timur mengadakan kampanye lingkungan dengan tajuk '*Surabaya Green and Clean*' serta lomba lingkungan se-kota Surabaya. Kampanye ini dimuat selama tiga bulan berturut-turut di koran tersebut. Dari lomba ini terpilih delapan nominator yang kemudian berhak mendapatkan program Unilever berikutnya.

Saat ini, kata Silvi, pihaknya memiliki 14 kelurahan binaan (51 RT) dengan warga sekitar 11 ribu jiwa. "Kalau ini terus bergulir, maka akan mengurangi beban sampah Kali Brantas," paparnya.

Selain program itu, yayasan tersebut juga berkolaborasi dengan LSM setempat

untuk membentuk forum kerja sama untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dinas Kesehatan setempat bertindak sebagai fasilitator.

Di luar yayasan, Unilever memiliki program yang berkaitan dengan *brand*. Misalnya Lifebouy mempunyai program penurunan diare, peningkatan kesehatan melalui pembangunan MCK di Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Kegiatan ini bekerja sama dengan dinas terkait dan LSM. Pepsodent punya program sikat gigi dua kali sehari untuk mencegah penyakit gigi yang masih tinggi di Indonesia. "Fokusnya memang kesehatan yakni *Integrated Health Promotion Program*," jelas Silvi.

Program peduli sampah juga dilaksanakan oleh Jaringan Delta-Female Radio (JDFI). Perusahaan ini meluncurkan program *Green City Green Community* (GCGC) di Jakarta.

Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, InSWA (Asosiasi Persampahan Indonesia), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Yayasan Kirai (LSM yang membina lapak/pemulung di Jakarta), Carrefour, dan Unilever (produsen Lifebouy). Se lengkapnya baca Reportase.

PT Merck Tbk, sebuah perusahaan obat, memiliki program kampanye bebas anemia. Perusahaan itu bekerja sama dengan pemerintah daerah Yogyakarta dalam program Yogya Sehat 2005. Perusahaan itu mendidik masyarakat untuk memakan makanan yang memiliki zat besi dan wajib dikonsumsi. Kampanye ini dilakukan mengingat prevalensi anemia di Indonesia terhitung masih tinggi.

Itu adalah sebagian kecil contoh perusahaan yang mulai peduli terhadap masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Perusahaan-perusahaan lain yang tidak disebut di sini bukan berarti tidak melakukan hal yang sama. ■ (MJ)

Ketua CFCD, Thendri Supriatno Bersinergi Memberdayakan Masyarakat

Mungkin belum banyak yang tahu bahwa ada sebuah forum perusahaan di Indonesia yang mendedikasikan diri bagi pemberdayaan masyarakat. Forum itu namanya Corporate Forum for Community Development (CFCD). Berdiri 24 September 2004, forum ini beranggotakan perusahaan besar (tambang, minyak dan gas, perkebunan, baja, pupuk, konsultan, kehutanan, kertas, makanan, telekomunikasi, dan lintas sektor). Forum ini memiliki visi tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan pertumbuhan perusahaan. Misinya menjadi pusat jejaring kerja multistakeholder dan pusat pembelajaran CSR/CD yang terkemuka.

Forum ini memiliki potensi besar untuk melangkah bersama pemerintah baik pusat maupun daerah dalam program pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui apa itu tanggung jawab sosial perusahaan/Community Social Responsibility (CSR), Percik berbincang dengan Ketua CFCD Thendri Supriatno di Jakarta, akhir September lalu. Berikut petikannya:

FOTO:MUJIYANTO



Bisa Anda jelaskan perbedaan antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Community Development (CD)*?

CSR itu jauh lebih luas dari *community development* karena CD itu hanya satu aspek dari CSR. Perusahaan yang melaksanakan CD itu dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR). Tapi CSR bukan hanya itu, bagaimana dia tidak menjual produk yang berbahaya, tidak mengotori lingkungan.

Siapa saja sasaran CSR?

Kita memiliki kepentingan bagaimana kita *koeksis* dengan masyarakat sekitar yang dekat dengan kita. Dalam dunia perminyakan kita ada ring I, II, dan III. Kalau ring I saja tidak bisa tercipta harmoni, jangan bicara ring II dan III. Ring I itu kabupaten di mana perusahaan berada. Ring II kabupaten sekitar. Ring III sampai dengan propinsi. Artinya, andai sebuah perusahaan memiliki usaha di situ maka harus mempertimbangkan ketiga ring tadi.

Apa pentingnya CSR bagi perusahaan?

Banyak sekali contoh di dunia bisnis, CSR itu menguntungkan bagi perusahaan. Itu yang kita sebut sebagai *social investment*. Bayangkan kalau anda membuat produk yang berbahaya,

kemudian bisa dituntut di pengadilan, berapa biayanya? Belum lagi harus ditutup dan menghadapi tuntutan publik. Saat ini kesadaran akan hak-hak sipil masyarakat semakin baik. Dalam konteks Indonesia, di era otonomi daerah, dengan adanya HAM dan edukasi publik, reformasi hukum, ini menyebabkan kesadaran rakyat akan hak-haknya semakin tinggi. Bukan waktunya lagi perusahaan membohongi, menipu, dan melakukan bisnis yang tidak etis. Itu sudah masa lalu. Pilihannya, ini ada *environment* yang sudah berubah. Kalau kita tidak berubah akan digilas karena paradigmanya sudah berubah. Atas dasar pemikiran-pemikiran semacam itu kita membentuk diri dalam *Corporate Forum for Community Development (CFCD)*.

Berapa sebenarnya anggaran perusahaan yang dialokasikan untuk program ini?

Di BUMN ada yang namanya PKBL 1,5-2 persen sesuai dengan SK 236. Di perusahaan swasta sangat bervariasi karena ketentuan tidak ada. Misalnya Medco Energi menyisihkan 2 persen untuk kondisi normal. Ketika tsunami bisa sampai Rp. 18 milyar.

Apa yang didapat perusahaan dari pelaksanaan program CSR?

Sebenarnya banyak. Niat antara perusahaan yang satu dan yang lain berbeda-beda. Tapi manfaat yang bisa kita peroleh adalah kita bisa *koeksis* dengan masyarakat sehingga menciptakan kondisi kondusif untuk berbisnis. Saya pernah dihujat kalau begitu niatnya tidak

tulus? Perusahaan sah-sah saja mendapatkan koeksistensi dengan masyarakat. Ada juga yang lebih tinggi yakni mendapatkan ridlo Allah. Apa yang dikeluarkan dianggap sebagai zakat. Kita kan ambil dari bumi, maka harus dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ada yang semata-mata supaya jangan diganggu. Motivasi beragam. Manfaat minimal perusahaan aman. *Image* yang baik. Itu implikasi bukan tujuan. Kalau perusahaan memiliki *image* yang baik dan tidak memiliki friksi dengan masyarakat, sebagai perusahaan publik, kira-kira investor akan mau kan? Tentu mereka tak mau berinvestasi ke perusahaan yang penuh risiko. Jadi tujuan lainnya meningkatkan kepercayaan investor, khususnya perusahaan publik. Bagi yang non publik, itu kan juga untuk mengamankan *shareholder valuenya*.

Apa dampak bila perusahaan tidak melaksanakan CSR?

Kalau perusahaan tidak melakukannya banyak kasus membuktikan perusahaan itu menderita kerugian. Contoh, sebuah perusahaan kertas yang tak perlu saya sebut, dia mengalami masalah terus menerus dan berapa ratus ratus juta dolar yang harus dikeluarkan. Coba kalau AMDAL-nya dilakukan dengan baik, jangan buang limbah sembarangan. Mungkin dia hanya mengeluarkan 10 juta dolar.

Apa kendala program CSR ini?

Belum semua perusahaan melaksanakan. Yang melaksanakan, sebagian masih basa basi dan belum melihat manfaat. Ada orang yang melaksanakan CD misalnya hanya sekadar untuk *corporate image building* saja. Ini semua karena faktor kesadaran dan pemahaman. Pemahaman apa itu CSR masih beragam antarperusahaan.

Sejauh mana upaya menyinergikan program CSR dengan program pemerintah?

Belum sempurna, tetapi gerakan ke

arah itu sudah mulai kelihatan. Minimal sudah banyak pemerintah daerah yang ketemu dengan kita. Yang paling bagus sekarang adalah bagaimana kepala daerah, gubernur, memberikan perhatian kepada program ini. Tentu mereka ingin menciptakan situasi yang kondusif bagi dunia bisnis di daerahnya sehingga tidak ada friksi dengan masyarakat. Dampaknya PAD bisa naik. Niat pemerintah seperti ini bagus. Pajak supaya naik. Niat berikutnya adalah ingin bersama-sama membangun masyarakatnya karena gubernur sadar bahwa tidak mungkin melaksanakannya sendiri karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu mari kita bekerja sama, mana yang paling efektif.

Dengan adanya pandangan yang masih belum benar dari beberapa perusahaan tentang CSR, apa yang dilakukan untuk meluruskannya?

Dengan adanya pemahaman yang berbeda-beda itu, maka saya bersama rekan-rekan dari perusahaan lain yang sedang kursus CD di UI membentuk kelompok. Dan itulah CFCD. Dari situ kita mengadakan pelatihan dari sederhana hingga bagaimana menyelesaikan persoalan *conflict resolution* bagi perusahaan. Selanjutnya kita berbagi pengalaman.

Bagaimana Anda melihat pemahaman pemerintah daerah terhadap *community development*?

Pemerintah daerah memiliki karakter yang beragam. Ada daerah tertentu yang aparatnya kurang disiplin atau kurang pemahaman. Apa itu CD atau CSR. Kadang mereka datang ke perusahaan hanya meminta dana CD untuk dikelola. Itu bukan *corporate CD* dan tak akan tercapai tujuannya. Masyarakat harus tahu bahwa kegiatan ini dari korporat. Bukan riya. Tapi ini bentuk kepedulian kita. Kalau pemerintah, ya memang seharusnya harus begitu karena kita sudah membayar pajak dan

sebagainya. Jadi masih ada perbedaan pemahaman seperti ini. Tapi seperti Riau, gubernurnya sangat sadar akan gerakan CFCD ini dan sangat mendukung. Tim dari propinsi dan CFCD sudah duduk bersama untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Hasilnya memang belum terlihat sekarang. Upaya ke arah sana sudah mulai. Makanya saya sering mengimbau kepada kawan-kawan, mungkin pemda itu tidak memiliki *budget* untuk mengirimkan utusannya mengikuti pelatihan tentang CSR, sponsori dong. Kita berharap ada pemahaman yang semakin meluas sehingga aparat paham dan bahasanya menjadi sama. Beberapa daerah sudah pernah ikut pelatihan dan menyatakan sebenarnya tidak terlalu berbeda kecuali sumber anggarannya. CFCD menganut konsep *tripartite*. Bagaimana bekerja secara sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Bagaimana menyinergikan dengan masyarakat langsung?

Kalau boleh jujur, masyarakat itu banyak yang salah didikan. Kadang ini karena korporatnya yang keliru karena memberi ikan, *charity*. Ini yang kita sebut sebagai *Santa Claus Syndrome*. Akhirnya terjadi *back fire* karena salah dalam mendidik masyarakat. Juga banyak orang yang tidak bertanggung jawab, *bromocorah*. Sering karena programnya *charity*, maka ini dimanfaatkan oleh orang yang menyebut dirinya tokoh masyarakat. Selain itu, *charity* bisa menimbulkan ketergantungan. Maka masyarakat harus dilibatkan sejak perencanaan.

Harapan Anda terhadap pemerintah agar program CSR itu sukses?

Harus ada perubahan *mindset*. Berikan kondisi yang kondusif, aturan yang baik, sebagai regulator yang *fair*. Pemerintah harus mengedukasi publik bersama-sama dengan kita. ■ (mujiyanto)

Green City Green Community

Maunya Ngajak Peduli Sampah

FOTO:MUJIYANTO

Seorang ibu setengah baya memarkir mobilnya tepat di sebuah tenda bertuliskan 'Green City, Green Community'. Tumpukan koran dikeluarkan dari mobilnya. Petugas tenda pun membantu. Seikat demi seikat koran itu ditimbang dengan timbangan gantung yang dikaitkan pada sebuah batang pohon.

"Masih seperti dulu kan vouchernya?" tanya ibu itu.

"Wah, sudah berubah Bu. Sejak 13 Juli, voucher dinaikkan menjadi 50 kg. Jadi tidak 10 kg lagi," kata penjaga.

"Kalau gitu, nggak jadi deh. Mendingan dijual ke tukang loak saja," kata ibu.

Akhirnya semua tumpukan koran yang sudah ditimbang tersebut dinaikkan ke mobil kembali. Ibu itu pun pergi dengan mobilnya yang terlihat masih mulus.

Sikap ibu ini mungkin mewakili warga Jakarta. Semua dinilai dengan uang/materi kendati ini demi kepentingan bersama. "Indikasi peduli masih jauh dari harapan. Yang nyata justru indikasi bisnis," kata Anom yang memantau program 'Green City, Green Community' (GCGC) di Carrefour Lebak Bulus, tempat peristiwa itu terjadi.

Apa yang terjadi itu tentu bertentangan dengan harapan yang diinginkan oleh para pengagas program ini. Program yang dipelopori oleh Jaringan Delta Female Indonesia (JDFI)-sebuah perusahaan jaringan radio-berharap GCGC bisa meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya kalangan menengah atas, terhadap sampah. Apalagi sampah di Jakarta ini setiap hari ada 7 ribu ton. "Kita berharap program ini menjadi *snow bowling effect* bagi dunia persampahan di Indonesia, khususnya



di Jakarta," kata Udjang Nugraha, *corporate secretary* JDFI, di Jakarta awal Agustus lalu.

GCGC muncul sebagai bentuk kepedulian pengelola radio itu terhadap jumlah sampah yang terus meningkat dan manajemen sampah yang belum juga benar. Lebih dari itu, kepedulian masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga juga belum muncul. Apa yang terjadi ini masih jauh dibandingkan dengan kondisi di luar negeri. "Masalah ini merupakan masalah kompleks yang melibatkan banyak sektor. Kami juga ingin ini bisa teratasi, maka kami mencoba mengambil peran dalam kampanye sekaligus mengajak pihak-pihak yang berkepentingan terlibat," jelas Udjang.

Pihak yang terlibat dalam program ini antara lain JDFI, Dinas Kebersihan DKI Jakarta, InSWA (Asosiasi Persam-

pahan Indonesia), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Yayasan Kirai (LSM yang membina lapak/pemulung di Jakarta), Carrefour, dan Unilever (produsen Lifebouy).

Ada dua kegiatan utama program ini. Pertama, *off air* dengan mengajak masyarakat berpartisipasi langsung mengumpulkan sampah anorganik di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kedua, *on air*, berupa *talk show* tentang persampahan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang ini.

Program yang dimulai sejak 16 Juni 2005 ini menyediakan bak sampah di Carrefour yang ada di Jakarta (Lebak Bulus, MT Haryono, Duta Merlin, Cempaka Putih, Puri Mall, dan Megamall Pluit). Di dekat bak sampah itu, GCGC membangun sebuah tenda berukuran 2 x 2 m2 di areal parkir yang

dijaga oleh dua orang penjaga. Penerimaan sampah berlangsung pada hari Rabu dan Sabtu pukul 10.00-16.00. Sore harinya sampah itu diangkut oleh mobil Dinas Kebersihan DKI untuk dibawa ke lapak/pemulung. Jadi sampah itu tidak dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tapi dimanfaatkan oleh lapak/pemulung. "Ini merupakan upaya *reduce* sejak awal," kata Anom.

Pada awal program, masyarakat yang membuang sampah setara 10 kilogram memperoleh insentif berupa voucher belanja Carrefour senilai Rp. 10 ribu dan tiga buah sabun Lifebouy. Ternyata sejak program ini diluncurkan jumlah sampah yang dikumpulkan terus meningkat. Puncaknya terjadi pada 9 Juli 2005 dengan total sampah 6,815 ton dari 101 anggota masyarakat. Rata-rata sampah per hari mencapai 3,732 ton. Sampah paling banyak berupa kertas.

Namun jumlah itu kemudian menurun. Ini gara-gara pada 13 Juli ada perubahan plafon perolehan voucher yang semula 10 kg sampah menjadi 50 kg sampah. Jumlah sampah yang terkumpul setelah tanggal itu rata-rata 1,767 kg. Partisipan pun menurun dari rata-rata 53 orang menjadi 34 orang.

Peningkatan plafon ini menurut Udjang dimaksudkan untuk mengukur kualitas kesadaran masyarakat. Apakah mereka membuang sampah ke bak sampah GCGC itu memang atas dasar kepedulian atau ada faktor lain.

Berdasarkan evaluasi, diakui atau tidak, kesadaran kalangan menengah atas di Jakarta terhadap sampah masih rendah. Yang muncul justru indikasi bisnis lebih kuat. Fakta yang ditemukan oleh Anom bisa menjelaskan hal itu.

Beberapa kali ditemukan orang-orang yang nakal untuk mengelabui timbangan. Anom menceritakan ada yang memasukkan botol air kemasan dengan isi air penuh, membungkus batu dengan kain bekas, dan memasukkan blok mesin ke tengah-tengah sampah. "Ini tidak masuk akal," katanya.

**Berdasarkan evaluasi,
diakui atau tidak,
kesadaran kalangan
menengah atas
di Jakarta terhadap
sampah masih rendah.
Yang muncul justru
indikasi bisnis
lebih kuat.**

Secara kasar, karakter partisipan adalah kalangan menengah atas bermobil dan mereka mengetahui program ini dari siaran radio JDPI. Ada sebagian kecil partisipan yang memang patut dicontoh yakni mereka tidak mau menerima voucher dan memang sengaja datang untuk membuang sampah tanpa imbalan. Mereka, kata Anom, sangat sedikit dan berasal dari kalangan mahasiswa.

Oleh karena itu, ia berpendapat dari sisi membangun kepedulian, program ini masih belum mampu, tapi dari sisi sasaran sudah tepat. Menurutnya, faktor pendidikan sangat menentukan kepedulian.

Penanggung jawab GCGC Roesdan Sjah Alam Pradana menilai ada hal positif yang lahir dari kegiatan ini yakni kerja sama antarpihak-pihak yang terlibat. "Awalnya kerja sama sulit sekali. Kini komunikasi berlangsung intensif dan lancar," paparnya. Selain itu, kepedulian orang-orang yang terlibat dalam program ini pun meningkat.

Yang pasti, kegiatan yang semula direncanakan berlangsung hanya tiga bulan, kini diperpanjang hingga akhir tahun. Ini tidak lain dari para sponsor yang menilai program ini perlu terus dilanjutkan demi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah. Dan, yang tak kalah penting, program ini telah memberikan citra yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya pada sponsor. ■ (mujiyanto)

FOTO:MUJIYANTO



Tipe Ideal Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat Ada Di Tepi Danau Limboto

Kelurahan Dembe I adalah salah satu permukiman di tepi jalan yang menyusuri danau Limboto. Sekilas desa ini sama saja dengan desa-desa lainnya. Penduduk yang ramah, dengan kohesivitas sosial yang tinggi dan religius, tanggap terhadap orang asing yang datang memerlukan bantuan. Didesa ini ada bangunan masjid yang mencirikan agama yang dianut penduduknya dan ada juga sekolah Muhammadiyah yang oleh sementara peneliti diidentikkan dengan Islam modern.

Gubernur Gorontalo, Ir Hi. Fadel Muhammad, disertai kepala BAPPEDA dan pejabat-pejabat dari empat Kabupaten dan Kota, pada tanggal 18 Agustus 2005 membawa rombongan BAPPENAS (kelompok kerja AMPL pusat) ke desa ini. Dia bermaksud menunjukkan kepada semua peserta *Road Show* yang tidak kurang dari 30 orang, bahwa Gorontalo memiliki model pembangunan AMPL yang selaras dengan Kebijakan Nasional. Gubernur mengatakan bahwa : "... Dembe akan dijadikan model pembangunan di Bidang Air Minum Berbasis Masyarakat untuk seluruh desa di Gorontalo". Bagaimanakah cerita lengkap mengenai hal itu, tulisan hasil penilaian menggunakan metode *historic time lines* ini, akan memaparkannya.

Dulu sulit air bersih

Di tengah masalah pembangunan AMPL yang dihadapi Gorontalo, dan juga daerah-daerah lain di Indonesia, Desa Dembe mencuat dengan berbagai keunikan dan kelebihannya, meskipun di daerah lain ada pula yang sekuualitas Dembe. Dembe sangat mandiri dalam arti mampu memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan air dan mampu

Oleh: Alma Arief ¹⁾

mengelola sarana dengan baik di tengah puluhan sarana proyek pembangunan AMPL pada masa lalu (dibangun pemerintah pada tahun 1995/6 dengan dana APBN) yang kini sudah menjadi monumen.

Penelitian dari aspek bakteriologis yang dilakukan Dinas Kesehatan setempat menyatakan air-air sumur di Desa Dembe tidak memenuhi syarat kesehatan.

Pada masa lalu Dembe juga terbelit masalah pemenuhan kebutuhan air. Sebelum tahun 1999, masyarakat Dembe menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun kualitas airnya sangat buruk. Penelitian dari aspek bakteriologis yang dilakukan Dinas Kesehatan setempat menyatakan air-air sumur di Desa Dembe tidak memenuhi syarat kesehatan. Air sumur penduduk sudah tercampur (terintrusi) air Danau Limboto yang kotor, berwarna keruh kekuningan, berbau, dan mengandung bakteri yang membahayakan kesehatan. Konon, menurut peserta diskusi, penduduk Dembe dahulu terjangkit sakit kulit gatal-gatal, dan banyak kejangkitan penyakit muntaber, jenis penyakit yang merebaknya terkait erat dengan kualitas dan kuantitas air (*water borne disease*). Sementara penduduk yang

tinggal sedikit di atas, di lereng-lereng gunung mengalami kesulitan menggali sumur, sebab airnya sangat dalam, lebih dari 30 m.

Berangkat dari keprihatinan menghadapi kondisi nyata yang seperti itu, Umar Latif yang aktif sebagai sekretaris LKMD (waktu itu) dan organisasi Muhammadiyah, berdiskusi dengan teman-temannya mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar. Lahirlah gagasan untuk mencari sumber air bersih, yang nyatanya memang tidak sulit. Sekitar 2,5 km dari masjid di kampungnya ada sumber air di Gunung Batu Didia. Debitnya cukup besar. Namun Umar tidak bisa mengungkapkan debitnya. Dia hanya mengatakan bahwa suara gemericik air yang jatuh ke batu-batu sudah terdengar dari jarak 50 m.

Pada tahun 1998 dia dan teman-temannya mengintensifkan pertemuan untuk membuat perencanaan. Perencanaan ini melibatkan semua komponen masyarakat antara lain: dari unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pedagang, unsur nelayan Danau Limboto, dan juga dari tokoh wanita. Akhirnya dicapai kesepakatan untuk membangun sarana air bersih dengan menyalurkan air melalui buluh bambu.

Dengan modal 650 batang bambu sumbangan Ja'far Sulaiman, penduduk bekerja membangun perpipaan bambu sampai ke kaki benteng (Benteng Otanaha). Di sini dibangun bak penampung yang sampai sekarang masih ada. Sarana air pipa bambu ini pada tahun 1998 sudah berfungsi dan dipergunakan oleh 150 KK.

Pembangunan dengan buluh bambu hanya tahap awal dari rencana lainnya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa

mereka sudah berbuat, dan mempunyai potensi yang layak untuk membangun sarana air minum perpipaan yang lebih berkualitas dan mampu menjangkau layanan yang lebih luas. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya diputuskan untuk mengajukan Proposal Pembangunan Sarana Air Bersih ke Walikota. Proposal tersebut diajukan pada tahun 2000 dan disetujui tahun 2001. Desa tersebut memperoleh bantuan pembangunan sarana perpipaan senilai Rp. 200 juta.

Tahap Operasional

Pembangunan sarana air dilakukan oleh kontraktor, sedangkan masyarakat membantu tenaga membawa material. Yang ikut bekerja di beri upah setengah yaitu Rp 20.000, sedangkan setengah lainnya sebagai wujud partisipasi. Pada bulan Agustus tahun 2002 kegiatan pembangunan dimulai dan selesai pada bulan Oktober 2002. Sarana air bersih ini diresmikan oleh Walikota dan Ketua DPRD pada bulan Januari 2003.

Sarana air perpipaan ini kini melayani sambungan rumah tangga sebanyak 188 KK untuk sambungan rumah atau 2.850 jiwa plus pemakai hidran. Namun karena banyak KK yang belum mendapatkan layanan maka dibuat hidran-hidran umum untuk layanan sosial, antara lain untuk masyarakat prasejahtera, fasilitas masjid, dan sekolah.

Selama 23 bulan, penduduk memperoleh layanan air dengan gratis. Namun di sisi lain disadari bahwa sarana air minum memerlukan perawatan dari kerusakan, sehingga bila memakai tanpa dipungut biaya maka suatu ketika sarana akan mengalami kerusakan dan tidak berfungsi. Agar bisa melakukan pengelolaan sarana dengan baik maka dibentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) oleh masyarakat melalui rapat yang dihadiri semua komponen masyarakat, kemudian diberi pelatihan oleh PDAM. Pelatihan yang diberikan kepada lima pengurus BPAM Dembe tersebut mengenai administrasi (tiga



Kini masih banyak penduduk Dembe yang belum mendapatkan layanan air bersih dari sarana yang dibangun. Mereka banyak yang meminta untuk memperoleh sambungan, namun harus benar-benar dipertimbangkan dari aspek kapasitasnya.

orang) dan teknis (dua orang).

Menyadari bahwa sarana akan tidak berkelanjutan bila tidak ada iuran maka BPAM (Badan Pengelola Air Minum) yang diketuai Umar Latif, mengundang seluruh pemakai sarana untuk rapat. Dalam rapat yang dilakukan berkali-kali dan dilaksanakan di masjid dan kelurahan, diputuskan bahwa setiap pelanggan, termasuk layanan sosial, dikenai biaya pemakaian sarana air yang disesuaikan dengan jumlah pemakaian air. Karenanya di setiap sambungan

rumah tangga dan layanan sosial akan dipasang meteran. Tarif yang ditetapkan adalah Rp. 800/m³ untuk sambungan rumah tangga, dan Rp. 500/m³ untuk layanan sosial (prasejahtera, masjid, sekolah, dll). Tarif tersebut separuh dari tarif PDAM.

Dalam rapat-rapat tersebut banyak suara yang pro dan kontra, tetapi mayoritas menyetujuinya. Yang kontra berdalih bahwa sarana air minum tersebut sumbangan dari Walikota untuk kelompok prasejahtera. Menurut Umar Latif yang kini menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah Dembe, yang tidak setuju dan berdalih seperti itu, justru orang-orang yang secara ekonomi berpenghasilan relatif tinggi (menengah ke atas untuk tingkat desa). Mengherankan memang.

Pengembangan dan Perawatan

Kini masih banyak penduduk Dembe yang belum mendapatkan layanan air bersih dari sarana yang dibangun. Mereka banyak yang meminta untuk memperoleh sambungan, namun harus benar-benar dipertimbangkan dari aspek kapasitasnya. Selama ini, yang be-

lum memperoleh sambungan bisa memakai hidran umum, atau menyambung ke tetangga dengan selang dan memberikan kontribusi untuk iuran bulanan. Ada seorang pelanggan yang membayar sampai Rp 70.000. dan ketika ditanya oleh Umar Latief, dia menjelaskan bahwa : " ... tetangganya di belakang rumah ikut menyambung ke rumah...".

Ketika ditanya berapa banyak yang belum mendapat sambungan rumah tangga, dan bagaimana memperoleh layanan air, Latief memberikan rincian sebagai berikut: di kelurahan ada 7 lingkungan. Yang belum mendapat sambungan rumah tangga adalah Lingkungan II 153 KK, mereka mendapat satu hidran. Lingkungan III ada 9 KK mereka mendapatkan satu hidran dengan penampung drum, lingkungan I ada 15 KK dibuatkan satu hidran. Untuk masyarakat lain yang belum mendapatkan, utamanya dari kelompok prasejahtera, mereka bisa meminta sambungan ke tetangganya atau memakai

hidran umum. Prinsipnya, yang kaya membantu yang miskin. Saat ini, ada banyak yang meminta sambungan sesudah mengetahui manfaatnya, namun belum bisa melayani. Paling-paling akan ada tambahan sambungan untuk tiga orang.

Untuk meminta sambungan rumah tangga, sesuai peraturan yang telah ditetapkan bersama, dipungut biaya: uang sambungan sebesar Rp. 480.000, dengan uang muka Rp. 150.000, se-

Masalah yang dihadapi selama ini selain kerusakan teknis dan lingkungan, juga masalah yang bersifat sosial. Sedangkan masalah yang terkait dengan kelembagaan dan iuran pemakaian sarana tidak begitu menonjol.

dangkan sisanya dicicil selama 10 kali bayaran. Untuk memasang meteran dan aksesoris lainnya, karena harganya mahal, pengelola bekerja sama dengan PDAM, dan dibayar secara mencicil.

Permasalahan dan pemecahan

Karena banyak yang meminta sambungan baru, Latief berpikir untuk memperluas jaringan dengan membangun sarana baru dengan sumber air yang lain. Tetapi ini masih dalam pemikiran, sebab biayanya sangat mahal. Sampai saat ini, uang pembayaran air masih untuk mencicil pembayaran pemasangan meteran air.

Para pengurus BPAM itu tidak digaji, mereka bekerja suka rela. Mereka baru diberi upah pada saat melakukan pekerjaan seperti memperbaiki kerusakan, dan itu pun tidak seberapa. Kalau ada yang rusak, mereka beramai-ramai membetulkannya, dan itu sering terjadi. Untuk melakukan itu, yang memakan waktu dari pagi sampai sore, hanya dikasih uang rokok. Untuk anak-anak muda (hadir dalam diskusi 5 orang) diberi Rp. 20.000, sedangkan pengurus BPAM Rp. 60.000.

Masalah yang dihadapi selama ini selain kerusakan teknis dan lingkungan, juga masalah yang bersifat sosial. Sedangkan masalah yang terkait dengan kelembagaan dan iuran pemakaian sarana tidak begitu menonjol.

Dari aspek teknis kerusakan yang terjadi menyangkut dua hal yaitu kebocoran pipa disebabkan karena tekanan air yang terlalu besar dan berpindah-pindahannya mata air. Ditanya apakah tidak dibangun bak pelepas tekan atau dipasang klep otomatis pelepas tekan, Latief menjelaskan bahwa pihaknya memang tidak membangun bak pelepas tekan dan juga tidak ada pentil otomatis (menurut istilahnya). Sedangkan mengenai berpindah pindahannya sumber air (mata air) juga sering terjadi. Bila terjadi yang seperti itu mereka beramai-ramai menanggulangnya, meluaskan bak

FOTO: POKJA AMPL



penangkap. Sering terjadi mata air berpindah di luar bak penangkap.

Masalah sosial yang timbul pada dasarnya bisa ditanggulangi. Beberapa kejadian antara lain menyangkut penolakan untuk membayar (disampaikan pada waktu rapat namun pada akhirnya bisa menerima), dan sikap seorang pelanggan yang menolak pemasangan meteran. Ada seorang pelanggan, yang menolak dipasang meteran dengan memecahkan meteran air yang dipasang. Dengan kesepakatan bulat pengurus BPAM menutup (mematikan) layanan air ke rumahnya, sehingga sehari-hari tidak memperoleh layanan air bersih. Akhirnya orang tersebut yang adalah pegawai negeri sipil, datang ke pengurus BPAM meminta maaf sambil menangis. Pengurus memaafkan dan membuka kembali layanan air ke rumahnya.

Tindakan tegas yang dilakukan pengurus BPAM Dembe terhadap pelanggaran aturan yang telah disepakati bersama, adalah suatu keharusan sebab apabila tidak demikian akan berakibat pada rusaknya aturan dan meluas pada ketidakpatuhan untuk membayar iuran, memakai air semauanya, dan sebagainya. Berbagai kasus seperti di Talumelito, Lonuo (keduanya di Gorontalo), dan Banyu Mudal (di Kebumen), menunjukkan bahwa kegagalan fungsi layanan dan sarana justru berawal dari pelanggaran aturan yang tidak dengan tegas diambil tindakan oleh pengurusnya.

Desa Lonuo dan Talumelito, pada evaluasi tahun 1998 oleh lembaga Penelitian Universitas Indonesia dan Bank Dunia, merupakan dua dari empat desa terbaik dalam mengelola sarana. Hal ini didasari oleh kondisi pembukuan keuangan sangat rapi, kepengurusan air (UPS dan KPS) berfungsi baik.

Di kedua desa ini sarananya kini tidak berfungsi lagi, karena berawal dari pelanggaran aturan seperti *tapping*, memakai air untuk keperluan yang tidak semestinya (kolam), dan lain-lain,



sehingga yang di bagian hilir tidak kebagian air dan tak mau membayar. Hal itu diikuti yang lainnya sehingga sistem iuran menjadi rusak.

Sejauh menyangkut aspek kelembagaan' sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Kelembagaan yang diberi nama Badan Pengelola Air Minum, terdiri atas lima orang pengurus harian dan tujuh pengurus pelaksana. Iuran sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar dan tercatat secara rapi dalam pembukuan di kantor BPAM. Kantor BPAM ini dahulunya adalah gudang milik kelurahan Dembe I.

Pembelajaran (*Lesson Learned*)

Ada beberapa pembelajaran yang bisa dipetik dari Pembangunan AMPL di kelurahan Dembe:

1. Masyarakat dan pemerintah telah menerapkan prinsip pendekatan tanggap kebutuhan
2. Partisipasi masyarakat dalam semua proses sejak pencetus ide, perencanaan, membuat *pilot project*, mengajukan proposal, pembangunan dan pengelolaan sarana.
3. Orang kaya tidak menjamin akan

kooperatif dengan sistem pembayaran dan orang miskin tidak berarti tidak mampu membayar.

4. Pengadministrasian kegiatan secara rapi termasuk pembukuan keuangan.
5. Tindakan tegas pengurus BPAM terhadap pelanggaran merupakan keharusan sebab bila tidak akan menjadi preseden bagi pelanggaran-pelanggaran lainnya.
6. Hal yang bersifat teknis dan lingkungan hendaknya diantisipasi dari awal, dan dibuat model-model fisik penanggulangannya dalam sistem yang dibangun, seperti berpindahnya mata air, klep dan bak pelepas tekan, dan sebagainya.
7. Regenerasi pengurus harus dilakukan dan penegakan aturan harus diwariskan. BPAM kini sudah melibatkan generasi muda (lima orang tamatan SMA) untuk diikutsertakan dalam kepengurusan. ■

¹-Aktif dalam Kegiatan *Water and Sanitation Policy and Action Planning Project* di Gorontalo
-Peneliti di Pusat Sains dan Teknologi-UI

Pengelolaan Sampah Regional, Siapa Takut?

Sepanjang hidup manusia, permasalahan sampah akan terus menguntit. Permasalahan sampah sebenarnya merupakan bagian dari konsekuensi hidup karena setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Longsornya gunung sampah di TPA Leuwigajah yang mengubur lebih dari 140 penduduk hingga tewas sungguh merupakan peristiwa paling menyedihkan sepanjang sejarah pengelolaan sampah kota. Tidak hanya terjadi di Bandung, pengelolaan sampah di berbagai daerah juga dalam keadaan kritis.

Seperti yang diberitakan Kompas Jatim tanggal 14 Juli 2005 bahwa pengelolaan sampah domestik Sidoarjo dalam kondisi kritis. Saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tambak Kalisogo yang beroperasi sejak 2002 sudah melebihi kapasitas. Ketinggian sampah telah mencapai 7 meter atau sekitar 70.000 meter kubik. Padahal tinggi pagar TPA hanya sekitar 4 meter. Itu pun hanya sekitar 60 persen sampah yang diangkut ke TPA di Sidoarjo. Volume sampah Sidoarjo yang mencapai 3.677 meter kubik per hari, hanya sekitar 2.200 meter kubik sampah yang dikumpulkan dan diangkut ke TPA di Desa Tambak Kalisogo dan Desa Barengkrajang yang masing-masing seluas 2 hektar.

Kondisi pengelolaan sampah di TPA Benowo Surabaya juga cukup mengkhawatirkan. Lahan seluas 26 hektar yang direncanakan berumur 16 tahun dengan ketinggian sampah 20 meter itu diperkirakan hanya bertahan tujuh tahun atau sampai 2008. Menurut Data Dinas Kebersihan Kota Surabaya, volume sampah rata-rata yang dibuang ke TPA Benowo sekitar 6.000 meter

Oleh: **Muhamad Zainal Arifin**¹⁾

kubik.

Dengan tumpukan 6.000 meter kubik sampah setiap hari, ketinggian sampah dapat mencapai 2,3 cm. Dalam waktu sebulan tinggi tumpukan sampah bisa mencapai 69 cm atau 8,28 meter setiap tahun. Dengan rata-rata penyusutan 25 persen dalam setahun tinggi sampah bisa mencapai 6,21 meter. Artinya dalam 16 tahun tinggi sampah bisa mencapai 99,6 meter. Padahal, menurut mantan Ketua Tim Konsultansi Pembangunan TPA Benowo dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Wahyono Hadi, TPA Benowo didesain untuk 16 tahun penggunaan tinggi bukit sampah maksimum 32 meter (Kompas edisi Jatim 15 Maret 2005).

Menanggapi carut-marut permasalahan sampah, langkah-langkah yang diambil Pemkab Sidoarjo hampir sama dengan yang diambil Pemkot Surabaya, yakni dengan menambah luas TPA. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo, Hariadi Purwan-toro, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan lahan pengganti TPA seluas 2 hektar di Desa Kupang, Kecamatan Jabon (Kompas Jatim tanggal 14 Juli 2005).

Pemkot Surabaya juga tidak mau kalah dengan Pemkab Sidoarjo. Rencananya Pemkot Surabaya akan memperluas TPA Benowo dari 26 hektar menjadi 140 hektar. Terus, sampai kapan pemerintah daerah akan melakukan pengusuran guna menampung sampah masyarakat kota Surabaya? Apakah tidak ada cara lain

FOTO: POKJA AMPL



yang lebih strategis dan lebih elegan dalam menyelesaikan permasalahan sampah?

Permasalahan sampah sebenarnya tidak hanya terkait dengan TPA saja. Sistem manajemen sampah merupakan sistem yang terkait dengan banyak pihak. Mulai dari penghasil sampah, pengelola, pembuat peraturan, sektor informal, pemulung, maupun masyarakat yang terkena dampak pengelolaan sampah tersebut. Tentu saja, penyelesaiannya pun membutuhkan keterlibatan semua pihak yang terkait dan juga menggunakan beragam pendekatan.

Selain itu sampah juga terkait dengan banyak aspek, mulai dari aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan. Kita juga harus mengakui bahwa sampah di berbagai daerah tidak diolah secara tuntas, cukup dengan aksi kumpul, angkut, buang, asal hilang dari pandangan mata. Carut marut pengelolaan sampah juga merupakan akibat dari akumulasi berbagai langkah destruktif yang selama ini terjadi, mulai dari kegagalan pilihan teknis, keteledoran kerja, kesalahpahaman manajemen kota, hingga ketidakpedulian semua pihak terhadap permasalahan sampah kota.

Oleh karena itu dalam menangani permasalahan sampah seperti yang terjadi di Surabaya, Sidoarjo ataupun kota-kota yang lain, satu-satunya cara yakni dengan menggunakan pendekatan regional atau kewilayahan. Adanya otonomi daerah tidak harus membuat daerah satu *cuek* atau tidak mau tahu terhadap permasalahan daerah lain. Berbagai daerah juga harus peduli terhadap permasalahan yang menjadi permasalahan bersama, seperti sampah.

Pengelolaan sampah pada dasarnya tidak mengenal batas administratif pemerintahan, bahkan sektor ataupun departemen. Tanpa adanya kerja sama di antara kota-kabupaten-provinsi yang sebenarnya saling tergantung dan mempengaruhi tersebut, permasalahan sampah akan menjadi makin kompleks sei-



Adanya otonomi daerah tidak harus membuat daerah satu *cuek* atau tidak mau tahu terhadap permasalahan daerah lain. Berbagai daerah juga harus peduli terhadap permasalahan yang menjadi permasalahan bersama, seperti sampah.

ring bertambahnya jumlah penduduk. Di samping itu biaya operasional pengelolaan sampah akan menjadi lebih terjangkau dan ekonomis bila ditanggung bersama.

Untuk mendukung pengelolaan sampah yang menggunakan pendekatan regional, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, pihak legislatif perlu membentuk Undang-undang Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum. Dengan adanya payung hukum, maka diharapkan pengelolaan sampah akan menggunakan pendekatan yang menyeluruh. Jika aspek perundang-

undangan yang menjadi payung hukum ini tidak segera dibentuk, dikhawatirkan penyelesaian sampah kembali ditangani dengan pendekatan parsial dan reaktif.

Di samping itu ketiadaan payung hukum secara nasional juga memicu konflik kepentingan pengelolaan sampah antara dua daerah atau lebih. Di tingkat regional seperti kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) saat ini sedang dikembangkan kerja sama pengelolaan sampah. Dengan adanya pembentukan *Jabodetabek Waste Management Corporation* (JWMC) dimulai era baru kerja sama melalui pendekatan regional di bidang persampahan. Dengan munculnya trend seperti JWMC, perlu ada kebijakan nasional yang dapat memayungi kepentingan lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi dalam konteks kerja sama di bidang pengelolaan sampah.

Langkah kedua, yakni membentuk badan atau institusi yang memiliki otoritas secara nasional berkaitan dengan pengelolaan sampah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Untuk

menyatukan segala visi dan misi dari semua pihak terkait, maka pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Sampah merupakan kebutuhan yang mendesak.

Diharapkan keberadaan Badan ini menjadi *policy maker* terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan sampah. Tugas dari badan ini yakni melakukan koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, instansi, masyarakat dan para pemilik kepentingan dalam bidang persampahan. Diharapkan badan nasional ini dapat merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Indonesia.

Di negara lain pembentukan badan nasional yang mengurus masalah pengelolaan sampah sudah dilakukan sejak dulu. Di Filipina sudah dibentuk Komisi Nasional Pengelolaan Sampah yang dibentuk oleh Kantor Kepresidenan. Komisi ini terdiri 14 orang anggota dari pemerintah dan 3 orang anggota dari sektor swasta yang diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Di Kanada juga sudah dibentuk *Federal Committee on Environmental Management System (FCEMS)* yang salah satu tugasnya membuat kebijakan manajemen sampah.

Selanjutnya langkah ketiga, yakni melakukan privatisasi pengelolaan sampah. Sudah menjadi rahasia umum kalau ternyata pemerintah tidak becus dalam menangani permasalahan sampah. Padahal kalau ditinjau dari segi bisnis, pengelolaan sampah sebenarnya merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Dari kasus sampah DKI sebagai contoh, volume sampah yang dihasilkan ibu kota adalah 6.000 ton/hari, dan dibuang ke TPA sampah Bantar Gebang, Bekasi yang luasnya 108 ha. Selain menjadi masalah, lautan sampah tersebut juga menjadi lautan rezeki bagi para pemulung, dan sekarang ini menjadi lahan usaha yang menjanjikan bagi perusahaan pengolahan sampah. Keuntungan yang akan diperoleh PT Wira Guna Sa-

rana (WGS) dengan kapasitas produksi 2.000 ton sampah/hari dengan biaya pengolahan Rp 53.000,00/ton atau sama dengan Rp 106 juta/hari.

Karena itulah supaya sampah di daerah-daerah tidak menjadi barang yang mubazir dan hanya mengakibatkan bencana, maka kita perlu memikirkan konsep pengelolaan sampah terpadu. Sistem pengelolaan sampah harus lebih efektif, efisien, dapat diandalkan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk dan memberikan peluang pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pemberdayaan masyarakat untuk dapat memilah, mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik juga menjadi kunci strategis dalam pengelolaan sampah terpadu.

Banyak negara telah melakukan privatisasi terhadap pengelolaan sampah. Keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan dan pembiayaan telah menciptakan kinerja yang lebih baik dalam sektor pengelolaan sampah.

Dalam sistem pengelolaan sampah terpadu yang membutuhkan teknologi tingkat tinggi, keberadaan swasta memang sangat diperlukan. Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi mengapa peran swasta perlu ditonjolkan dalam pengelolaan sampah. Pertama, organisasi pemerintah dianggap terlalu gemuk sehingga menjadi sangat lamban dalam menangani langsung permasalahan sampah. Kedua, privatisasi dapat mengembalikan tugas pemerintah yang sebenarnya sebagai pengendali negara bukan sebagai pelaksana. Ketiga, privatisasi akan memberikan manfaat bagi konsumen atau *stakeholder* karena swasta memiliki mekanisme insentif. Keempat,

privatisasi merangsang kompetensi yang akan menuju pada efisiensi. Kelima, privatisasi akan membantu pemerintah untuk membangun infrastruktur.

Keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah dipercaya akan dapat lebih menciptakan efisiensi daripada pemerintah, karena sektor swasta lebih menggunakan acuan bisnis dalam pengelolaan dan dapat memfokuskan penyelesaian kinerja buruk dan rendahnya produktifitas. Banyak negara telah melakukan privatisasi terhadap pengelolaan sampah. Keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan dan pembiayaan telah menciptakan kinerja yang lebih baik dalam sektor pengelolaan sampah. Contohnya di Monterrey salah satu daerah di Meksiko telah berhasil mengubah lautan sampah menjadi berkah. Di Monterrey, lembaga Simeprodeso berhasil mengelola sampah sampai bisa memproduksi energi listrik untuk menerangi sepertiga penerangan jalan. Dengan investasi 11 juta dollar AS, keuntungan bisa dua juta dollar AS per tahun (Kompas, 18 Mei 2005).

Sebenarnya Dinas Kebersihan Surabaya telah melakukan privatisasi atau swastanisasi parsial terhadap pengelolaan sampah antara lain memberikan tender kepada swasta untuk melakukan proyek penyapuan sebesar Rp 4,1 milyar dan juga pengangkutan sampah. Namun, lagi-lagi langkah yang diambil Dinas Kebersihan hanya sekadar mengimplementasikan falsafah 3 M yakni mengumpulkan, mengangkut, membuang sampah. Mereka masih saja menggunakan paradigma "asalkan sampah hilang dari pandangan mata", maka permasalahan sampah dianggap sudah selesai.

Kita berharap dengan adanya pengelolaan sampah yang menggunakan pendekatan regional, maka pada masa yang akan datang Indonesia akan terbebas dari permasalahan sampah. Akhir kata, pengelolaan sampah regional, siapa takut?! ■

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Pemenang I Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia (PPRI) LIPI 2003

Megumi

Air Minum dari Sumber tak Terbatas

Kabupaten Jembrana salah satu kabupaten di Bali yang terletak di bagian ujung barat Pulau Bali, tidaklah seperti Kabupaten lainnya yang ada di bagian tengah dan timur yang memiliki pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerahnya. Perbedaan yang cukup menonjol ini disebabkan sebagai bagian wilayah Bali, Jembrana kurang memiliki nuansa budaya Bali yang menjadi daya tarik pariwisata.

Kehidupan ekonomi masyarakat banyak mengandalkan hasil-hasil pertanian dalam arti luas, namun tidak cukup kuat memiliki kemampuan untuk mengembangkan wilayahnya. Hambatan pengembangan sektor pertanian juga sudah dirasakan karena makin merosotnya kualitas lingkungan pertanian seperti berkurangnya debit air dan rusaknya hutan-hutan serta alih fungsi lahan pertanian yang kurang terkendali. Meskipun Kabupaten Jembrana memiliki kandungan potensi air tanah paling besar di Bali, namun pemanfaatan untuk pertanian tidak efisien.

Sebagai kabupaten yang paling miskin di Bali, maka Pemkab Jembrana telah berupaya mengambil berbagai terobosan dengan memperhatikan potensi yang ada. Secara umum beberapa terobosan kebijakan yang diambil oleh Pemkab Jembrana dalam era otonomi daerah ini berwawasan jangka panjang ke depan. Di antaranya adalah Megumi. Mengingat Kabupaten Jembrana tidak memiliki sumber-sumber mata air permukaan yang permanen seperti kabupaten lainnya, salah satu alternatif adalah pemanfaatan air laut yang merupakan potensi yang tak habis-habisnya.

Terobosan Kebijakan

Di tengah-tengah maraknya bisnis

Oleh: I Nyoman Karnatha¹⁾

air minum dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada oleh orang-orang bermodal, maka Megumi justru lahir sebagai satu-satunya produk air minum yang berwawasan lingkungan meskipun belum populer ditinjau dari segi kepentingan bisnis akibat fanatisme atau kebiasaan konsumsi air minum masyarakat selama ini yang bersumber dari mata air. Masyarakat Bali memiliki kepercayaan kuat bahwa laut memiliki fungsi terkait dengan upacara agama sebagai penyucian universal. Menghadapi masyarakat yang belum terbiasa dengan sumber air yang luar biasa dan kesan masyarakat yang dari segi bisnis kurang menguntungkan ini bukan hambatan bagi Pemkab Jembrana untuk terus melakukan berbagai upaya mengembangkan peluang dan kajian bisnis Megumi.

Pengolahan air laut menjadi air tawar atau air minum merupakan rintisan satu-satunya di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi DAIUGYN dari Jepang, air laut dari samudera Indonesia diproses melalui sistem OZONISASI sehingga menghasilkan produk air minum yang sesungguhnya cukup layak dan aman dikonsumsi oleh siapa saja karena bebas bahan kimia berbahaya. Proses ozonisasi mempunyai daya pembunuh bakteri yang sangat besar dan menghilangkan senyawa Fe dan Mg. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh PT Sucofindo, air Megumi ternyata memiliki nilai gizi tinggi dengan kandungan lebih dari 20 unsur mineral dengan kadar rata-rata masih di bawah ambang batas yang disyaratkan untuk air minum, unsur yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan.

Pengambilan dari sumber air laut dalam lebih dari 300 meter di bawah permukaan, menurut beberapa hasil penelitian di Jepang dan Pusat Riset Teknologi Kelautan Dep. Kelautan dan Perikanan, potensi air lautnya mengandung unsur mineral paling lengkap seperti yang ada dalam tubuh manusia. Sedangkan air minum biasa atau konvensional mengandung tidak lebih dari 3-5 unsur mineral. Megumi yang dihasilkan melalui mesin *water treatment* modern yang menggunakan peran ozon (O³) dalam proses produksinya sangat penting untuk menghasilkan sistem yang efektif dan efisien sehingga sangat alami. Dengan demikian Megumi merupakan terobosan selangkah lebih maju didalam implementasi hasil riset kelautan di Indonesia. Hal ini berbeda jauh dengan proses pemurnian air konvensional yang dikenal selama ini termasuk mesin air minum isi ulang.

"Megumi" dalam bahasa Bali kurang lebih berarti bertempat tinggal mencari penghidupan. "Megumi" dalam bahasa Jepang juga kurang lebih memiliki arti anugerah dari Tuhan. Jadi Megumi diproduksi di Jembrana Bali dengan menggunakan teknologi tinggi dari Jepang. Hal ini menandakan adanya hubungan kerja sama yang baik antara dua kota yaitu Jembrana di Bali dan Okhama di Jepang sebagai kota kembar.

Prospek Megumi

Lahirnya Megumi yang masih harus dikenalkan kepada masyarakat luas, dapat dipandang dari dua segi penting yaitu :

1. Dari segi bisnis, untuk jangka pendek, Megumi dengan nilai investasi yang relatif cukup besar (+ Rp.7 M) dan kandungan teknologi yang tinggi, belum

menguntungkan karena masih dalam proses upaya menembus hambatan persaingan sebagai produk baru, penentuan *sales point* dan posisi produk serta tantangan kebiasaan masyarakat menggunakan air dari sumber mata air yang agak sulit diubah. Namun untuk jangka panjang, Megumi dengan sumber bahan baku tak terbatas dan murah sangat memungkinkan dikelola secara bisnis. Di samping itu keunggulan mengkonsumsi air dari sumber air laut dalam secara cukup dan rutin dapat menetralisasi zat-zat berbahaya dalam tubuh sehingga mengurangi risiko kanker, memperbaiki metabolisme dan ketahanan tubuh terhadap penyakit.

2. Dari segi program strategis, Megumi tidak bisa dilihat hanya dari investasinya yang cukup besar, tetapi dari segi kepentingan yang lebih luas yaitu dari segi penyelamatan lingkungan ke depan. Megumi memiliki prospek ke depan yang cukup baik, khususnya yang terkait dengan solusi masalah air yang makin sulit diatasi dan memerlukan biaya besar. Meskipun banyak para ahli kita mengemukakan bahwa sumber-sumber air di daratan masih surplus cukup tinggi, kenyataan masih terjadi kontroversial dengan kekeringan. Bahkan PDAM juga sebagai pengelola air minum secara umum sering menemui masalah atau mengalami kerugian sehingga beban bagi daerah. Hal ini juga dapat dilihat di lapangan mengenai kompleksnya masalah yang terkait dengan air dan khususnya di Kab. Jembrana antara lain:

- Kurang lebih dalam dekade terakhir ini debit air untuk irigasi pertanian sudah berkurang dengan pesat sehingga mempengaruhi produktivitas, alih fungsi lahan (9 persen/tahun) dan mengancam pertanian masa depan secara luas. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber air, telah menimbulkan banyak konflik kepentingan terutama dengan sektor pertanian khususnya subak-subak di Bali.
- Menurunnya ketahanan air akibat

meningkatnya areal kritis dan pengundulan lahan hutan (9.500 Ha hutan rusak atau 23 persen).

- Pemanfaatan total air tanah dan sebagian kecil air hujan. Pemanfaatan air tanah yang berlebihan akibat berkembangnya penduduk dan kegiatan pembangunan dapat merangsang intrusi air laut sehingga dapat mengancam biota darat.
- Terus meningkatnya luas areal tertutup (permukiman dan bangunan sarana prasarana) sehingga mempersempit ruang hijau/terbuka sebagai daerah serapan air hujan.
- Makin mengglobalnya kerusakan lingkungan sehingga pengaruhnya terdapat di mana-mana dan meningkatnya pencemaran oleh masyarakat dan dunia usaha yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup utamanya air. Menurunnya kualitas dan kuantitas air dalam jangka pendek dan seterusnya lebih banyak menguntungkan pengusaha, tetapi dalam jangka panjang menyengsarakan masyarakat luas.
- Permasalahan-permasalahan tersebut bukannya berkurang dengan berkembangnya IPTEK dan kesadaran manusia dimuka bumi ini, tetapi malahan cenderung meningkat. Upaya dan tekad yang ada selama ini baik dari pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha untuk mengatasinya belum ada tanda-tanda kesungguhan atau keberhasilan. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan sumber air darat.

Apabila kondisi demikian terus berlanjut, maka air Megumi diharapkan mampu memberi substitusi penting ketika penggunaan air secara konvensional seperti sekarang ini sangat sulit didapat. Bahkan saat ini air konsumsi masyarakat sudah dirasakan biayanya makin mahal dan persaingan mencari sumber-sumber air makin ketat. Sedangkan kebutuhan air terus meningkat dan untuk mempertahankan kehidupan, air yang cukup harus tetap tersedia karena 70 persen dari tubuh terdiri dari air. Makin terbatasnya sumber-

sumber air konvensional, maka air laut tidak hanya dikenal rasanya asin untuk membuat garam, tetapi akan menjadi salah satu sumber air bersih atau air minum seperti Megumi.

Setelah melalui uji coba produksi selama kurang lebih 1 tahun, Megumi yang awalnya diserahkan pengelolannya kepada koperasi ternyata mengalami berbagai kelemahan. Untuk mendapatkan pengelolaan yang lebih baik dan profesional baik mengenai produksi, keuangan maupun pemasaran, maka saat ini Megumi diambilalihkan manajemennya kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana. Namun kendala-kendala seperti permodalan, sumber daya manusia dan sarana peralatan yang kurang memadai masih juga dihadapi oleh manajemen yang baru.

Penutup

Megumi bisa menjadi alternatif mengatasi krisis air. Megumi memiliki keunggulan sumber bahan baku tak terbatas dari air laut dan manfaatnya untuk air minum. Namun Megumi bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah air karena masih mengandung keterbatasan-keterbatasan dalam hal sumber-sumber pendukung produksinya di samping kendala kebiasaan masyarakat menggunakan air bersih selama ini. Oleh karena itu upaya atau solusi melalui program pemeliharaan dan rehabilitasi kelestarian lingkungan masih merupakan alternatif terbaik karena memiliki implikasi sangat luas dan sempurna. Sampai saat ini upaya seperti ini terlalu banyak tantangannya baik dari segi biaya, pendidikan, moral dan kepentingan jangka pendek individu atau kelompok tertentu sehingga perlu diciptakan komitmen yang setinggi-tingginya yang harus dipatuhi oleh semua manusia hidup. Pendidikan mengenai hal ini harus diterapkan sedini mungkin sepanjang zaman dengan tidak mengenal batasan umur dan status. ■

*) Penulis adalah Pejabat Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Kabupaten Jembrana.

Air

Antara Asas Kelestarian dan Tuntutan Kemakmuran di Tengah Kelangkaan dan Kebutuhan Antara Hak Monopoli Generasi Sekarang dan Warisan untuk Generasi Mendatang

"Hanya dengan meningkatkan 10 persen efisiensi penggunaan air di seluruh dunia, kita akan dapat menghemat air yang cukup untuk memasok semua air keperluan hunian di seluruh kawasan dunia"

Sandra Postel
(Worldwatch Institute)

Air merupakan elemen yang paling melimpah di bumi, yang meliputi 70 persen permukaannya dan berjumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik. Apabila dituang merata di seluruh permukaan bumi ini akan terbentuk lapisan dengan kedalaman rata-rata 3 kilometer. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja yang benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003 persen. Karena sebagian besar air, kira-kira 97 persen, ada dalam samudera atau laut, yang kadar garamnya terlalu tinggi untuk keperluan hidup manusia, dan 3 persen sisanya yang ada, hampir semuanya, kira-kira 87 persen, tersimpan dalam lapisan kutub atau sangat dalam di bawah tanah. Masalah terbesar mengenai persediaan air berkembang bukan hanya dari masalah kelangkaan air dibanding dengan jumlah penduduk, melainkan kekeliruan menentukan kebijakan tentang air, dan baru menyadari masalah-masalah tersebut lama setelah akibat yang tak dikehendaki menjadi kenyataan (Middleton, tt).

Seperti yang terjadi di Indonesia, semenjak memasuki awal tahun 2003 ada ancaman kekurangan air, tidak saja

I Gede Arya Sunantara¹⁾

Mahasiswa MPRK - UGM Yogyakarta.

Juara Harapan
Lomba Karya Tulis Ilmiah Penyelenggaraan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

di wilayah perkotaan yang sarat akan perumahan/pemukiman, perkantoran, dan pertokoan, tetapi juga menjadi wabah di wilayah pedesaan yang justru akrab dengan kawasan sungai dan hutan. Tidaklah heran bila curah hujan Indonesia, yang rata-rata berjumlah 2,779 mm per tahun, sangat ditunggu-tunggu di kala musim kemarau, tapi menjadi terbalik, yaitu musuh bebuyutan yang sangat dibenci di kala musim penghujan.

Kenapa semakin hari sumber air bersih bangsa ini semakin berkurang?

Meskipun penambahan investasi dalam sektor ini sangat sering menguras APBN atau APBD, namun usaha tersebut seringkali tidak disertai dengan perubahan. Oleh sebab itu maka prioritas utama yang harus dilakukan adalah mengatur cara pemanfaatan yang paling bijak terhadap investasi besar yang telah dilakukan negara demi ketersediaan air bagi masyarakat setiap tahunnya.

Deskripsi Riil dan Aktual

Ketersediaan air sebagai bagian dari potensi wilayah fisik yang semakin lama semakin mengkhawatirkan akibat rusaknya hutan oleh sebab non-alamiah dan oleh sebab-sebab teknis yang sangat manusiawi, menyebabkan kemarau panjang dari pertengahan hingga

FOTO:INTERNET



menjelang akhir tahun 2004 ini benar-benar terasa oleh sebagian besar masyarakat, khususnya yang berdiam di Pulau Jawa.

Sesungguhnya temuan tentang penurunan kuantitas dan kualitas air sebagai bagian dari semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup seperti tersebut di atas sudah menjadi "temuan global" di akhir-akhir dasawarsa tujuh puluhan, berbarengan dengan isu *global warming*, *ozone depletion*, penurunan kualitas udara, tekanan dari melonjaknya jumlah penduduk bumi dan peningkatan radioaktivitas lingkungan (Alimi, 1995). Namun bagi Indonesia di tahun-tahun tersebut dampaknya belum begitu terasa. Kini hanya dalam jangka waktu kurang dari dua puluh tahun keadaannya sudah benar-benar berubah, di tengah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan energi, bahan sintetik dan lahan, masalah kualitas dan kuantitas air juga menjadi masalah penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Ketika pengelolaan air minum di negara ini masih berbasis dan menjunjung tinggi doktrin *common property*, maka sumber daya alam Indonesia, khususnya air akan diperlakukan laksana harta tak bertuan sehingga setiap orang bisa leluasa (*open access*) melakukan okupasi dan eksploitasi, karena biasanya air disalurkan dengan gratis atau dengan tarif yang banyak disubsidi. Maka kecil sekali dorongan niat untuk menggunakan air secara efisien, dan retribusinya. Jika ada, tidak akan mencukupi untuk pemeliharaan yang layak. Maka hasilnya ialah penggunaan yang sangat tidak efisien. Padahal jika komponen bangsa ini mau membuka mata dan telinganya, doktrin *common property* ini sudah sejak lama menuai kritik tajam, terutama oleh Francis T. Christy. Menurutnya doktrin *common property* memiliki empat akibat buruk jika dipakai sebagai dasar kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya air yakni : 1) Mengakibatkan pemborosan sumber



daya alam secara fisik; 2) Mengakibatkan terjadinya inefisiensi secara ekonomi; 3) Mengakibatkan kemiskinan; dan 4) Mengakibatkan terjadinya konflik antara pengguna sumber daya alam tersebut.

Berangkat dari itu semua maka untuk menjaga pencemaran lingkungan, terutama gangguan terhadap potensi air tanah, maka sudah selayaknyalah air ditempatkan sebagai aset/kekayaan bangsa, sehingga penggunaan air lebih diperhitungkan, baik secara teknis (eksplorasi dan eksploitasinya serta pengolahannya harus diatur), dan non teknis (diatur juga pajak dan retribusinya jika penggunaan air lebih banyak dikomersiilkan, termasuk di dalamnya menghormati hukum adat/penerapan kembali kearifan tradisional dalam mengelola sumber daya air).

Air: Natural vs Human vs Financial Capital

Di tengah mulai munculnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan masyarakat akan pengelolaan air dan penyehatan lingkungan saat ini, rakyat sebagai elemen utama pelaksana keinginan tersebut masih belum

sepenuhnya terbebas dari ikatan "cara berfikir institusionalis" warisan orde baru, apalagi pemerintahnya, yang masih dihadapkan pada kesulitan-kesulitan "kerentanan institusi". Oleh karena itulah rakyat dan pemerintah dalam memandang konsep sumber daya alam, khususnya air masih berpijak atas keyakinan bahwa hubungan eksploitatif terhadap alam adalah suatu yang wajar dan bisa diterima. Dari itu semua maka ketergantungan perekonomian bangsa ini sangat tinggi terhadap alam, walaupun tanpa disertai dengan optimisme (apalagi kemampuan) untuk menjaga keseimbangan ekologi melalui penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Dengan kata lain hakekat pengelolaan sumber daya alam, khususnya air di negara ini adalah dengan melakukan manipulasi terhadap karakter alam dalam rangka pemuasan kebutuhan manusia. Ringkasnya, alam dikonsepsikan memiliki kesediaan dan kepasrahan untuk diatur, atau dalam istilah Raymond Murphy, alam diperlakukan sebagaimana plastik yang mudah dilebur dan dibentuk sesuai dengan kehendak kita (Murphy, 1994). Implikasinya kemudian adalah terjadinya keengganan untuk mengadopsi

prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam manajemen alam (Riordan & Cameron, 1994).

Konsep sumber daya air haruslah benar-benar dicermati karena apabila mengarahkan perhatian pada air hanya sebagai komponen lingkungan yang memiliki nilai ekonomi saja tidak akan memperoleh pemahaman yang komprehensif, karena air juga merupakan komponen alam yang bisa dipandang tidak memiliki nilai ekonomi, dimana keduanya memiliki peran penting dalam mempertahankan produktifitas sumber daya air itu sendiri secara keseluruhan.

Bias ekonomi ini perlu diketahui sedari awal, agar keterkaitan antara air yang memiliki nilai ekonomi dengan air yang dipandang tidak memiliki nilai ekonomi (tapi memiliki nilai ekologis, politis, sosial, budaya, dan agama) bisa dipahami secara jelas. Dengan diperhatikannya air sebagai segmen alam yang tidak, atau kurang bernilai ekonomi akan memberikan *warning* – peringatan dan tanggapan dini (*early warning system* dan *early response system*) – pada dimensi-dimensi konflik dalam pengelolaan air, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat interlokalitas.

Kecenderungan untuk melihat air semata-mata sebagai aset ekonomi tidak harus dilakukan dengan mengkonversi dan mengkonsumsi air secara berlebihan dan membabi-butakan. Karena perbedaan pemahaman tentang nilai ekonomi air, dan bagaimana nilai ekonomi tersebut dimanfaatkan memiliki implikasi sosial yang berbeda. Terfokusnya perhatian pada konsep sumber daya air yang memiliki nilai ekonomi berpangkal pada pemahaman bahwa air yang ada di bumi ini adalah suatu bentuk kapital (*natural capital*), sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan / proses ekonomi (*financial capital*), yang kemudian bisa dikonversi ke dalam bentuk kapital-kapital lain (*human capital*) (Usman dan Santoso, 1999).

Dari cara pandang inilah rakyat bersama-sama dengan pemerintah (dari pusat hingga desa) telah merusak sumber daya alam di negeri ini. Ditambah lagi dengan minimnya (kalau tidak mau dibilang tidak punya) parameter-parameter pengelolaan sumber daya alam dari instansi-instansi terkait. Berdasarkan uraian di atas sesungguhnya seluruh masyarakat Indonesia telah dibohongi oleh kesuksesan pembangunan selama ini, karena sebagian besar didapat dari "perusakan" alam, dari ambisi penguasaan terhadap sumber daya alam, akibat dari konseptualisasi yang keliru dengan melihat alam sebagai "sebentuk" kapital.

Air: Fungsi Hutan vs Cara Pandang Salah Kaprah

Menurut fungsinya, secara ekstrim hutan negeri ini dikelompokkan ke dalam tiga fungsi, yaitu : 1) Hutan Produksi, 2) Hutan Lindung, serta 3) Hutan Suaka Alam/Margasatwa. Dari berbagai ketentuan yang mengatur fungsi hutan tersebut, baik (UUPK, SK Menteri, Dirjen, dan lainnya) terdapat pendefinisian yang salah kaprah dan

sangat fatal akibat cara pandang masyarakat terhadap hutan. Kesalahan yang paling fatal adalah pada bagaimana masyarakat mendefinisikan hutan produksi, yang mana dikatakan sebagai hutan yang mengemban fungsi pokok menghasilkan produksi kayu. Akibat kesalahan ini kemudian banyak masyarakat yang salah kaprah juga dalam mengelola hutan, padahal satu prinsip penting yang mereka kurang pahami ialah bahwasanya produk jasa yang dihasilkan hutan tidak hanya kayu atau rotan saja, melainkan lebih luas lagi yaitu sebagai penopang proses produksi air (Warsito, 1999). Pada prinsipnya pengelolaan hutan produksi (apapun produk yang dihasilkan dan akan diambil nantinya) harus mendapatkan hasil yang lestari dan maksimum (*sustained and maximum yield*) (Marsono dan Sulthoni, 1999).

Kesalahan dalam pengelolaan hutan ini selain akan berdampak jangka pendek juga akibatnya bisa dirasakan di kemudian hari, seperti yang terjadi saat ini, Indonesia sedang mengalami kesulitan air pada setiap datangnya musim kemarau tapi terus disertai dengan laju

FOTO: INTERNET



peningkatan kerusakan hutan. Ibarat buah simalakama antara kebutuhan menjaga hutan dengan ketersediaan air sama-sama rumitnya.

Oleh karena itulah perlu diperhatikan dan ditegaskan kembali bahwa sumber daya hutan adalah penyangga sumber daya air, walaupun sifatnya merupakan milik publik (*public goods*), akan tetapi jauh lebih baik jika pemanfaatannya menggunakan alur pemikiran demi keberlangsungan manfaatnya, terutama untuk masyarakat secara keseluruhan. Fungsi *renewable* hutan tidak mutlak dilaksanakan apabila kerusakan yang dialaminya mulai merembet kepada komponen lain seperti sumber daya air yang ada di dalamnya. Pendeknya, generasi sekarang sudah mulai merasakan warisan generasi sebelumnya yang telah merusak hutan dengan semena-mena, dalam bentuk menipisnya cadangan air, seperti yang dirasakan saat ini.

Air: Aset Rakyat vs Aset Pemerintah

Arah pemanfaatan sumber daya air seyogyanya ditujukan pada penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui (sumber daya biotis), apalagi sumber daya air merupakan suatu sumber daya alam yang selalu bergerak, melintasi batas-batas teritorial, dan batas-batas kebijakan, sehingga diperlukan pengaturan lintas daerah dan lintas masyarakat. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah seberapa siap rakyat berpikir tanpa selalu menuntut untuk mendapatkan remunerasi apalagi harus menekan alasan-alasan yang sifatnya ideologis-politis?

Pemusnahan secara perlahan-lahan namun sangat pasti terhadap sumber dan potensi air ini harus dipikirkan memiliki implikasi lanjutan, ketika rakyat tidak sanggup menempatkan air sebagai aset untuk dirinya dan anak cucunya kelak, sustainability yang menjadi substansi dari pengelolaan air akan berada pada posisi perjudian besar. Nasib generasi mendatang yang kekurangan air bukan saja di daerah dimana dia berasal

tapi juga di daerah-daerah lain sekitar daerah tempat tinggalnya, bahkan ketersediaan air secara global akan menjadi taruhannya, demikian pula akibat-akibatnya yang bersifat trans-daerah, bahkan trans-nasional (Lay, 1999).

Argumen di atas mengungkapkan bahwa masyarakat dalam mengelola sumber daya air masih berpatokan pada derivasi keuntungan-keuntungan jangka pendek, padahal dalam jangka panjang kesalahan-kesalahan tersebut akan dibayar dengan amat sangat mahal. Karenanya bagaimana agar kebutuhan jangka panjang akan ketersediaan serta ketercukupan air dan kebutuhan jangka pendek akan eksploitasi sumber daya alam yang saling bertabrakan ini bisa "berdamai". Karena jika tidak maka akan terjadi pemusnahan masa depan rakyat oleh rakyat itu sendiri atau minimal akan menciptakan arena konflik baru di sekitar kehidupannya, konflik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemusnahan secara perlahan namun pasti terhadap sumber dan potensi air memiliki implikasi lanjutan, ketika rakyat tidak sanggup menempatkan air sebagai aset dirinya dan anak cucunya kelak.

Solusi Analitik

Pengelolaan sumber daya air beserta segala persoalannya seperti yang telah diuraikan di atas pada prinsipnya akan selalu menghasilkan dualisme realokasi, yaitu keuntungan dan kerugian, tentu saja dalam hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat secara keseluruhan sebagai pemakai air. Kerugian yang dimaksud disini ialah bagian air yang hilang karena kebocoran terlalu besar. Perbaikan pada efisiensi dalam pengoperasian dan pemulihan (pengelolaan) sumber daya air jauh lebih baik

dan kemungkinan besar akan memberikan hasil yang lebih banyak apabila berkaitan langsung dengan masalah-masalah pemeliharaan (rendahnya niat untuk konservasi dan pemulihan sumber air). Memang ada beberapa peningkatan yang cukup nyata terutama dalam layanan penyediaan air kepada orang-orang miskin (rakyat kebanyakan), tetapi pencapaian tersebut apabila dipandang dari segi lingkungan, tidak sedramatik seperti yang diharapkan. Selain masalah kebocoran, pengelolaan (pengoperasian, pemulihan sampai dengan masalah pemeliharaan) seperti disebut di atas, masalah kemerosotan mutu air yang diakibatkan oleh pencemaran limbah industri dan limbah perkotaan yang tidak diolah, serta akibat dari pengotoran berat sisa-sisa dari lahan pertanian, juga merupakan masalah yang harus segera ditanggulangi.

Oleh sebab itu semua, maka masalah air--beserta segala embel-embel yang menyertainya terutama penurunan kuantitas dan kualitas air yang sudah mulai dirasakan di negara ini, walaupun belum terlalu parah--adalah bukan hanya karena tidak cukupnya persediaan air, tapi lebih banyak karena air yang ada itu tidak dikelola secara layak atau tidak dibagikan secara merata. Penyediaan sumber air semacam ini tidak terbatas hanya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber-sumber air juga merupakan masalah yang serius di banyak daerah di Amerika Serikat.

Cara menolong berkurangnya kualitas dan kuantitas air di bumi nusantara ini adalah dengan pencegahan, bukan dengan penyembuhan. Air (kualitas dan kuantitasnya) apabila dikelola dengan manajemen yang tepat maka ia merupakan komoditas yang mengagumkan murah. Sekarang, tinggal bagaimana semua dari kita, seluruh rakyat Indonesia bersama seluruh masyarakat internasional baik negara berkembang maupun negara maju, konsekuen menegakkan konsensus itu. Semoga... ■

Kondisi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Sumatera Barat

Sumatera Barat terletak di bagian Barat Sumatera yang dikenal dengan sebutan Ranah Minang. Daerah ini luasnya 42,2 ribu km² dengan jumlah penduduk 4.454.185 jiwa, tersebar di 12 kabupaten dan tujuh kota. Kendati cukup luas dan memiliki sumber daya alam yang banyak namun pemanfaatannya terbatas. Dari luasan yang ada hanya sekitar 25 persen saja yang bisa dimanfaatkan sedangkan sisanya terdiri dari lembah, bukit, gunung dan danau. Pada tahun 2002, PDRB perkapita tercatat sebesar Rp 6,65 juta pertahun

Sampai saat ini baru 58,6 persen penduduk Sumatera Barat yang mendapat akses air minum melalui sistem perpipaan, sumur gali, sumur pompa tangan, penampungan air hujan dan penampungan mata air. Dari jumlah tersebut hanya 16 persen yang terlayani oleh PDAM atau 136.621 satuan sambungan rumah tangga. PDAM memberlakukan tarif yang sama kepada pelanggannya.

Sementara itu penduduk yang memiliki dan memanfaatkan jamban keluarga sebagai salah satu tolok ukur layanan sanitasi hanya sekitar 524.076 kepala keluarga (KK) atau sekitar 50,72 persen dari total keluarga, bahkan di desa angkanya jauh lebih rendah jika dibanding dengan di kota. Di kota warga biasanya memakai jamban dengan sistem tangki septik sedangkan di desa lebih banyak memakai sistem *ceplung*.

Jadi hampir separuh penduduk Sumbar belum mendapatkan kemudahan layanan air minum. Angka pelayanan di atas boleh jadi sekarang malah lebih rendah dari pada itu, melihat begitu banyak sarana AMPL yang sudah dibangun tidak berfungsi lagi. Apalagi angka itu diambil dari data cakupan layanan

Oleh: Syarifuddin *)

yang biasanya dihitung berdasarkan disain proyek. Sedangkan di sektor penyehtan lingkungan, khususnya sampah dan drainase belum mendapatkan perhatian yang semestinya. Persoalan sampah masih dianggap persoalan teknis semata yang dapat ditangani oleh dinas teknis.

Hasil diskusi dari berberapa kali lokakarya yang dilakukan oleh Pokja AMPL Sumatera Barat terungkap berberapa permasalahan yang dirasakan dalam layanan air minum dan penyehtan lingkungan di Sumatera Barat antara lain:

- Cakupan rendah dan layanan air minum belum merata
- Pelaksanaan pembangunan AMPL selama ini belum efektif, efisien, dan berkelanjutan
- Upaya pelestarian lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap PHBS masih rendah
- Koordinasi antarsektor dan program dalam pembangunan AMPL lemah
- Kemampuan lembaga pengelola sarana di tingkat perdesaan lemah

Jika dikaitkan dengan pencapaian target MDG, bahwa setengah dari penduduk yang belum mendapat layanan AMPL dapat terlayani dengan kualitas memadai dan berkelanjutan maka target minimal yang harus dipenuhi oleh Sumbar adalah 80 persen atau 3.932.426 jiwa dengan proyeksi penduduk Sumbar tahun 2015 sebanyak 4.915.533 jiwa. Sedangkan target untuk penyehtan lingkungan 75 persen atau 3.686.491 jiwa.

Memanfaatkan Potensi Nagari

Pemerintahan Nagari sebagai peme-

rintahan terendah di Sumatera Barat dinilai sebagai pemerintahan yang demokratis yang lahir dari bentukan masyarakat sendiri bukan merupakan rekayasa elit penguasa. Sistem ini mengakui tiga kuasa yang menjadi penggerak utama pemerintahan Nagari yakni kedaulatan rakyat, parlemen, dan pemerintahan Nagari.

Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan dan penggunaan efektif sangat sejalan dengan pemerintahan Nagari dimana keduanya berupaya melakukan perubahan yang berorientasi memberikan ruang kebebasan dan akses kepada rakyat baik untuk ambil bagian dalam kegiatan maupun melakukan kontrol. Jadi perubahan kebijakan bermakna mengubah, memperbaiki atau mengadakan.

Berdasarkan pengalaman, kebijakan tidaklah merupakan ujung melainkan pangkal, kegiatan yang mendukung massa rakyat tidak dengan sendirinya akan menjadi langkah perbaikan hidup rakyat bila tidak dikawal dalam pelaksanaannya. Untuk itu dibutuhkan kesadaran kritis massa rakyat, dan kapasitas untuk mengaktualisasikan kesadaran. Pembaharuan kebijakan pada dasarnya memuat resistensi bagi emansipasi rakyat dan sebuah korelasi mendasar atas masa lalu dan pikiran mendasar untuk membangun masa depan.

Dengan demikian dalam kaitan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di daerah dapat meletakkan institusi Nagari sebagai jawaban atas adanya perubahan mendasar pola pembangunan selama ini (*top down*) menjadi pembangunan yang berorientasi memberikan ruang kebebasan dan akses pada rakyat, baik untuk ambil bagian dalam kegiatan ataupun dalam kontrol. ■

*) Konsultan Waspolra untuk Sumbar

Studi Analisis Pelayanan AMPL di Kabupaten di Era Desentralisasi*)

FOTO: ISTIMEWA

Studi analisis pelayanan AMPL (Air Minum dan Kesehatan Lingkungan) di Kabupaten pasca desentralisasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana isu-isu pembangunan AMPL dipersepsi dan ditangani oleh pemerintah kabupaten. Pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena setelah Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat berhasil dirumuskan, harus segera ditemukan atau dirumuskan pula apa saja perangkat implementasi yang harus tersedia bagi terciptanya pembangunan AMPL yang berkelanjutan. Perangkat implementasi ini akan dinilai dalam 3 komponen: regulasi daerah, mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, dan kelembagaan daerah.

Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat merupakan kebijakan yang berupaya untuk meningkatkan pelayanan AMPL yang mencakup pelayanan air minum, jamban, drainase, pengelolaan sampah dan limbah; dengan mengubah paradigma pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan AMPL. Paradigma pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan AMPL hendak digeser ke arah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih memberi ruang partisipasi, lebih akuntabel, lebih memihak masyarakat miskin, lebih mendorong peran aktif perempuan, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan AMPL, termasuk berdaya untuk berkontribusi dalam pendanaan pembangunan AMPL sesuai dengan kemampuan dan prinsip keadilan. Semua ini dituangkan ke dalam 11 prinsip kebijakan AMPL yang mencakup prinsip untuk memperlakukan air sebagai benda sosial dan benda ekonomi, prinsip pendekatan tanggap kebutuhan,



prinsip berwawasan lingkungan, prinsip mendorong hidup bersih dan sehat, prinsip berpihak pada masyarakat miskin, prinsip mendorong peran aktif perempuan, prinsip mengelola AMPL secara akuntabel, prinsip peran pemerintah sebagai fasilitator, prinsip mendorong peran aktif masyarakat, prinsip memberi layanan secara optimal dan tepat sasaran, serta prinsip pemulihan biaya.

Lokasi Studi

Studi analisis AMPL di kabupaten pasca desentralisasi dilaksanakan pada tiga karakteristik wilayah yaitu: pertama, empat kabupaten yang pernah menjadi lokasi uji coba kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat yakni Musi Banyu Asin, Solok, Subang, dan Sumba Timur; kedua, tiga kabupaten yang pernah dan masih menjadi lokasi program P2TPD/Program Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah yakni Bandung, Lamongan, Takalar; ketiga, tiga kabupaten yang tidak menjadi

lokasi uji coba kebijakan nasional AMPL maupun P2TPD (Kuningan, Lumajang, Sikka). Kabupaten yang memiliki karakteristik istimewa adalah Kabupaten Solok, karena kabupaten ini menjadi lokasi uji coba kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat sekaligus lokasi P2TPD.

Ruang Lingkup Studi

Pada ketiga karakteristik wilayah ini dikaji seberapa besar regulasi, mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme kelembagaan berpotensi untuk mendukung prinsip-prinsip kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat. Ketiga aspek itu dipilih karena ketiga aspek itu merupakan perangkat implementasi kebijakan, termasuk bagi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat. Tetapi, karena prinsip-prinsip kebijakan nasional AMPL ini universal, maka potensi dukungan regulasi, mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme kelembagaan terha-

dap prinsip-prinsip ini tetap dapat dikaji.

Metodologi

Daya dukung terhadap prinsip kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat dilihat dari dua aspek penting. Pertama, apakah regulasi, mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme kelembagaan daerah mengakomodasi prinsip-prinsip kebijakan nasional AMPL. Kedua, apakah regulasi, mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme kelembagaan daerah mampu mengantisipasi konsekuensi logis dari penerapan kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat di daerah. Untuk itu, kesebelas prinsip kebijakan nasional AMPL dalam kajian ini akan diorganisasikan ke dalam kerangka analisis kebijakan dari *Weimer dan Vining* (1989).

Studi analisis pelayanan AMPL mencakup studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap *stakeholder* AMPL di daerah. Dokumen yang dikaji dalam studi ini adalah dokumen regulasi daerah dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah. *Stakeholder* yang diwawancarai mencakup pengambil keputusan di lembaga pemberi layanan AMPL di daerah (Dinas Kimpraswil dan Dinas Kesehatan), lembaga-lembaga pendukung layanan AMPL di daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian), lembaga eksekutif lainnya yang berperan dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan (Bappeda, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah); serta lembaga pengelola AMPL berbasis masyarakat.

Temuan

Temuan studi memperlihatkan bahwa permasalahan AMPL di ketiga karakteristik wilayah studi relatif sama. Masalah AMPL yang mereka hadapi adalah:

- Cakupan air bersih perpipaan relatif rendah, kecuali di Kabupaten Musi Banyu Asin. Di luar layanan perpipaan, warga masih mengkonsumsi air yang kualitasnya tidak sepenuhnya terjamin. Cakupan air minum non-perpipaan bervariasi. Di semua karakteristik wilayah ditemukan kabupaten yang memiliki cakupan air minum yang tinggi, yaitu di Subang, Lamongan, dan Lumajang.
- Cakupan jamban, drainase, sampah, dan SPAL relatif rendah
- Layanan AMPL di kota dan desa tidak merata. Layanan lebih terkonsentrasi di perkotaan
- Semua karakteristik wilayah studi merupakan kabupaten yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi ini memunculkan potensi konflik pemanfaatan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Konflik yang mulai muncul di permukaan terjadi di daerah-daerah yang kesulitan air seperti di Sikka dan Sumba Timur. Di Sumba Timur, potensi konflik juga terjadi dengan pemanfaatan air untuk sektor peternakan. Saat ini konflik berupa perusakan sarana baru terjadi antara warga dengan PDAM dan sarana pipanisasi air dari program bantuan di daerah.
- Di semua karakteristik wilayah studi, investasi untuk pembangunan prasarana air masih dinilai sangat mahal. Pelayanan PDAM maupun program-program pemberdayaan sampai saat ini masih terbatas di daerah-daerah yang masih memiliki sumber air, yang bisa dikelola dengan nilai investasi yang tidak terlalu tinggi. Daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air dan memerlukan biaya investasi tinggi relatif belum tersentuh oleh layanan AMPL. Kecelakaan terjadi di Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap mengupayakan pembangunan prasarana air di lokasi yang tidak memiliki sumber

air dan memerlukan biaya sangat tinggi. Sampai saat ini, biaya operasional dari pembangunan prasarana ini masih ditanggung oleh pemerintah.

- Daerah mengalami degradasi lingkungan, terutama berkurangnya areal hutan, yang mempengaruhi ketersediaan sumber air di daerah.
- Prevalensi penyakit berbasis lingkungan seperti diare, malaria, dan ISPA masih tinggi.
- Perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya di banyak kelompok masyarakat. Masih cukup banyak warga yang tidak menggunakan jamban, tidak mencuci tangan dengan sabun, dan tidak menunjukkan perilaku lainnya yang menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Analisis

- Daerah memiliki regulasi, mekanisme perencanaan dan penganggaran serta mekanisme kelembagaan yang bervariasi dalam mengelola pembangunan AMPL.
- Hampir semua daerah belum memiliki regulasi khusus yang mengatur soal pengelolaan AMPL. Namun sudah ada daerah yang mempunyai regulasi yang secara tidak langsung mendukung pengelolaan AMPL. Misalnya, dengan menyerahkan kewenangan pengelolaan layanan AMPL ke tingkat pemerintahan paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat. Regulasi lain yang mendukung adalah regulasi yang menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan ke desa serta mekanisme penyaluran dana alokasi desa. Regulasi-regulasi semacam ini potensial untuk menciptakan mekanisme pembangunan yang diputuskan dan dirumuskan secara partisipatif di tingkat desa. Regulasi-regulasi semacam ini relatif lebih banyak muncul di Kabupaten yang menjadi lokasi uji coba kebijakan nasional AMPL berbasis ma-

syarakat sekaligus lokasi P2TPD. Daerah berikutnya yang memiliki cukup banyak substansi regulasi semacam ini adalah kabupaten yang menjadi uji coba kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat dan terakhir daerah yang tidak menjadi lokasi uji coba kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat maupun lokasi P2TPD.

- Tidak ada regulasi daerah yang mampu mengatur agar pihak swasta dan masyarakat mendistribusikan biaya dan manfaat layanan AMPL secara merata kepada pengguna layanan. Selain itu, tidak ada regulasi daerah yang mengatur perilaku peran pemerintah sebagai fasilitator dan menyediakan sistem sanksi bagi penyelewengan dari peran ini.
- Di beberapa daerah, kualitas partisipasi di tingkat desa dan kecamatan seringkali masih buruk. Hal ini karena perencanaan di tingkatan ini didominasi oleh unsur pemerintah desa dan kecamatan. Kabupaten yang cukup baik mengakomodasi partisipasi warga sampai ke tingkat kecamatan adalah kabupaten Solok. Diberlakukannya Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0295/M.PPN-1/2005. 050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2005, memungkinkan partisipasi warga diperluas sampai ke tingkat kota.
- Terlihat dua pola yang umum dalam mekanisme kelembagaan di semua daerah:
 - Pemerintah masih diberi peran yang dominan dalam penyelenggaraan layanan AMPL.
 - Instansi pemerintah belum siap dalam konsep dan pelaksanaan pembangunan dengan model pemberdayaan. Program bantuan dari Pusat yang menggunakan pendekatan pemberdayaan selalu dipersepsi sebagai program yang berjalan lambat, memberatkan anggaran, dan sulit untuk disesuaikan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan.
- Semua daerah yang dikaji memiliki Renstra yang menggariskan program-program perlindungan dan pembangunan lingkungan hidup. Akan tetapi, semua regulasi ini diterbitkan terpisah oleh instansi yang berbeda, sehingga belum terfokus pada upaya perlindungan lingkungan dalam pembangunan AMPL. Di semua daerah belum ada regulasi yang bisa membuat daerah dapat mengontrol perilaku swasta atau masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan AMPL agar turut serta mengelola dan menjaga lingkungan.
- Keberpihakan pada masyarakat miskin dan peningkatan peran serta perempuan belum menjadi kepedulian regulasi di semua daerah. Kabupaten yang menjadi lokasi P2TPD baru menggagas pemihakan pada masyarakat miskin melalui produk semacam Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan.
- Dari sisi dukungan mekanisme perencanaan dan penganggaran, mekanisme di semua daerah tidak memungkinkan dilakukannya seleksi berdasarkan disain program. Dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) juga tidak memungkinkan pihak-pihak yang berwenang untuk mengevaluasi dan memverifikasi wawasan terhadap lingkungan, keberpihakan pada masyarakat miskin, dan pelibatan peran serta perempuan dalam program-program AMPL daerah. Meski demikian, akuntabilitas anggaran mulai diupayakan oleh daerah. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi mengenai pengelolaan anggaran.
- Di sisi mekanisme kelembagaan, seringkali terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan mengenai instansi

mana yang berwenang untuk memelihara sumber air.

- Prinsip mendorong Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) diadopsi oleh daerah dalam bentuk regulasi Renstra yang mengamankan agar semua daerah menjalankan program-program kesehatan lingkungan, termasuk mendorong PHBS.
- Prinsip pendekatan tanggap kebutuhan dan pelayanan optimal serta tepat sasaran dimaksudkan untuk mengatasi rendahnya efektivitas pembangunan AMPL yang disebabkan oleh tidak sesuainya pembangunan AMPL dengan kebutuhan warga. Regulasi daerah yang mendukung kedua prinsip ini di antaranya adalah regulasi di kabupaten Solok yang menyerahkan kewenangan pengelolaan layanan AMPL ke tingkat pemerintahan paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu ke pemerintahan nagari.
- Secara umum mekanisme perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menjamin diresponnya kebutuhan warga. Pembangunan AMPL adalah pembangunan sektoral yang biasanya diagendakan oleh Dinas-dinas daerah.
- Dengan kehadiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0295/M.PPN-1/2005. 050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2005, mekanisme seperti di Solok potensial untuk meluas. Karena dalam SEB ini, digelar forum khusus bertajuk Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di tingkat kecamatan.
- Regulasi daerah pada umumnya telah mengatur sistem tarif untuk pelayanan air minum dan persampahan. Sistem tarif yang digunakan juga sudah diatur berjenjang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat serta dimaksudkan sebagai mekanis-

me subsidi silang. Dari sisi mekanisme perencanaan dan penganggaran, hampir semua daerah yang diteliti juga mengembangkan dana stimulan yang dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berkontribusi dalam pendanaan pembangunan. Akan tetapi, mekanisme ini belum mengacu pada prinsip pemulihan biaya.

- o Kelemahan daya dukung regulasi daerah yang menghambat adopsi keseluruhan prinsip kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat adalah masih didominasi mekanisme perumusan regulasi oleh eksekutif dan legislatif.

Rekomendasi

1. Dari segi argumentasi atau substansi kebijakan, tampaknya rasionalitas kebijakan yang paling memicu kontroversi adalah prinsip air sebagai benda sosial dan benda ekonomi serta prinsip pemulihan biaya. Untuk itu, substansi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat diharapkan dapat:

- a. Dilengkapi dengan argumen mengenai hak warga negara terhadap AMPL dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak tersebut.
- b. Menyertakan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi pemerintah bila pilihan pemenuhan hak warga atas AMPL ini diputuskan akan dipenuhi secara langsung oleh organ-organ pemerintah, diserahkan kepada swasta, atau diserahkan kepada masyarakat.
- c. Menyertakan mekanisme partisipasi yang dapat ditempuh warga dalam pengelolaan AMPL di tingkat desa, di tingkat kota, dan di tingkat nasional.

2. Sosialisasi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat diharapkan dapat dilakukan melalui penguatan kerangka implementasi kebijakan di daerah.

3. Penguatan regulasi daerah dapat dilakukan dengan mendorong munculnya regulasi mengenai:

- a. Hak yang setara bagi setiap individu

untuk mendapatkan air yang layak secara kesehatan.

- b. Peran pemerintah untuk menjamin dan memenuhi hak individu atas air sebagai hak dasar.
- c. Peran pemerintah untuk menjamin dan memenuhi hak rakyat (secara komunal) atas sumber-sumber air.
- d. Menjamin perlindungan sumber daya air.
- e. Mencegah kerusakan lingkungan.
- f. Mekanisme penyelesaian konflik penguasaan air dan agraria secara keseluruhan.
- g. Mencegah eksploitasi air yang masif oleh industri.
- h. Menjamin diinternalisasikannya biaya pengelolaan lingkungan oleh industri yang memanfaatkan sumber daya air.
- i. Mekanisme penyusunan regulasi daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

4. Penguatan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah dapat dilakukan dengan mendorong terpraktekannya mekanisme perencanaan dan penganggaran yang:

- a. Mengakomodasi partisipasi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan

melibatkan perempuan

- b. Mengembangkan sistem representasi warga yang mewakili semua kelompok warga, dan terlembaga menjadi semacam *deliberative forum*
- c. Mengembangkan sistem pengawalan usulan warga sampai ke tingkat pengambilan keputusan terkait program dan alokasi anggaran
- d. Membuka informasi perencanaan dan penganggaran agar dapat diakses oleh seluruh kelompok warga
- e. Merancang prosedur akuntabilitas yang dapat diakses dan dikontrol oleh warga secara luas.

5. Penguatan mekanisme kelembagaan dapat dilakukan melalui upaya:

- a. Membentuk atau memperkuat tim AMPL daerah, dengan melibatkan *stakeholder* yang lebih luas.
- b. Mengembangkan kemampuan lembaga daerah.
- c. Mengembangkan mekanisme koordinasi kelembagaan dalam membangun AMPL, dengan menggunakan pendekatan lintas sektoral.
- d. Memperkuat pemerintahan desa.
- e. Memperkuat organisasi masyarakat sipil lokal. ■

*) Merupakan salah satu kegiatan WASPOLA tahun 2005

FOTO: INTERNET



Sanitasi untuk Masyarakat (SANIMAS) Antara Harapan dan Kenyataan

FOTO: ANDRE

Tak bisa dipungkiri kondisi perkotaan saat ini cukup memprihatinkan, terutama di kawasan berpenduduk miskin. Sarana dan prasarana sanitasi tidak tersedia. Kalau pun ada kondisinya tidak mencukupi atau tidak layak. Tak heran bila sering muncul epidemi penyakit perut di wilayah tersebut.

Penyakit ini selain menurunkan derajat kesehatan masyarakat, juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 1997, kerugian ekonomi akibat penyakit setara dengan 4,4 persen PDP atau 47 triliun rupiah. Ini berarti setiap rumah tangga rugi Rp. 120 ribu per bulan.

Sistem pembuangan limbah tinja dianggap sebagai salah satu biang persoalan kesehatan di kawasan tersebut. Berdasarkan data BPS tahun 2002, rumah tangga perkotaan yang memiliki tangki septik baru mencapai 63,07 persen. Sisanya masih buang tinja di kolam, sawah, sungai/danau, lubang tanah, pantai/lapangan dan tempat lainnya.

Program Sanitasi untuk Masyarakat (SANIMAS) berusaha untuk berperan dalam menyediakan sarana sanitasi tersebut dengan pendekatan yang tanggap kebutuhan (berbasis masyarakat). Masyarakat sendiri yang menentukan pilihan teknologi sarana berdasarkan ragam pilihan teknologi yang ada. Selain itu masyarakat bertanggung jawab dalam pembangunan fisik sarana dan pengelolaan dana yang bersumber dari swadaya (tunai dan bahan), pemerintah pusat dan daerah (porsi terbesar), SANIMAS (AusAid) dan LSM (BORDA) dalam beberapa kasus. Diharapkan, model seperti ini bisa menjadi pilihan pemerintah daerah dalam



strategi pembangunan sanitasi ke depan.

Saat ini SANIMAS masih dalam proses uji coba di tujuh kota yakni Denpasar, Pamekasan, Mojokerto, Sidoarjo, Kediri, Blitar, dan Pasuruan. Kota itu terpilih dalam proses seleksi berdasarkan syarat (i) menyediakan anggaran pendamping; (ii) menentukan sektor penanggung jawab kegiatan; dan (iii) memilih dan menempatkan dua fasilitator pendamping setempat. Sampai pertengahan tahun ini, semua sarana sudah selesai tahap konstruksi dan sudah beroperasi.

Tak Mulus

Terpilihnya kota-kota tersebut tak menjadikan SANIMAS mulus dikerjakan. Contoh menarik terjadi di Pamekasan, Madura. Menjelang hari H peletakan batu pertama proyek tersebut pada pertengahan 2003, warga meno-

laknya. Achmad Syaifudin, staf Bapeda Pamekasan, menjelaskan penolakan ini terjadi karena warga yang rumahnya berdampingan dengan lokasi pembangunan sarana ini khawatir dengan bau yang akan ditimbulkan dan ada perasaan tidak enak karena bangunan MCK komunal itu berada tepat di depan rumah. Akhirnya, proyek ini gagal dibangun.

Sebagai gantinya Pemda setempat kemudian mengalihkan dana APBD yang sudah dianggarkan untuk pembangunan MCK Plus Plus ke dua pesantren yakni Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Bata Bata dan Pondok Pesantren Darul Ulum, Banyuwangi, Palengaan. Pesantren dipilih karena kondisi sarana sanitasi di pesantren pada umumnya sangat buruk. WC yang ada tidak memenuhi syarat. Sebagian santri buang air di sungai. Tangki septik disalurkan ke sungai dan digelontor pada saat

musim hujan. Saat kemarau, air bersih sulit didapatkan.

Berbeda dengan di Pamekasan, di Sidoarjo ketidakmulusan terjadi ketika sarana sanitasi sudah beroperasi. Proyek SANIMAS berupa MCK ini didanai oleh masyarakat lokal, APBD, AusAID, dan Bank Dunia. Proyek itu terletak di RT 21 RW V, Kapasan, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo.

Proyek ini dilatarbelakangi oleh kondisi sanitasi yang amat buruk di lokasi tersebut. Sebanyak 80 persen warganya tidak mempunyai jamban. Masyarakat menggunakan sungai sebagai sarana membuang air utama. Mereka membangun tangga di tepian sungai. Padahal secara periodik sungai itu meluap hingga ketinggian 1 meter.

Pembangunan sarana MCK yang dimulai 15 Agustus 2003 dan mulai beroperasi pada 15 Desember 2003, pada awalnya mampu mengubah kebiasaan masyarakat buang air di sungai. Mereka mulai menggunakan sarana tersebut dengan membayar biaya pemakaian sebesar Rp. 200 sekali pakai. Sementara waktu tangga-tangga tempat nangkring-biasa disebut helicopter-mulai hilang. Namun, kebiasaan itu tak berkelanjutan. Awal tahun ini mereka kembali ke sungai. Helikopter mulai bermunculan.

Surur Wahyudi dari BORDA menjelaskan kenyataan ini terjadi karena sejak awal pembangunan di lokasi ini terlalu dipaksakan oleh pemerintah daerah setempat, padahal masyarakat belum siap. Selain itu, saat ini sedang terjadi perubahan kepengurusan RT/RW yang mempengaruhi pengelolaan sarana tersebut. Lagi pula, lanjutnya, sejak awal ternyata sarana ini belum diresmikan. "Kenapanya, kita tidak tahu," katanya.

Sukses

Selain dua kasus tersebut, hampir semua proyek SANIMAS terbilang sukses. Kesuksesan ini bisa dilihat terutama dari sisi keberlanjutan sarana dan pengelolannya.

Di Pamekasan, rupanya pemda se-

tempat belajar dari kegagalan SANIMAS tahap I. Pada proyek SANIMAS tahap II, pemda tak lagi memfokuskan pembangunan sarana MCK di perkotaan tapi beralih ke pesantren. Mengingat berdasarkan survei rasio sarana dan pemakai 1: 200-300. Bisa dibayangkan bagaimana antrenya. Ini jauh lebih buruk dibandingkan kondisi di masyarakat, yang rata-rata punya jamban.

Pembangunan sarana MCK yang dimulai 15 Agustus 2003 dan mulai beroperasi pada 15 Desember 2003, pada awalnya mampu mengubah kebiasaan masyarakat buang air di sungai. Mereka mulai menggunakan sarana tersebut dengan membayar biaya pemakaian sebesar Rp. 200 sekali pakai.

Berdasarkan seleksi dipilih dua pesantren yang menjadi lokasi SANIMAS yakni Pondok Pesantren Miftahul Qulub (MQ), Kelurahan Polangan, Kecamatan Galis, dan Pondok Pesantren Sumber Bungur (SB), Kelurahan Pakong, Kecamatan Pakong. Konstruksi dimulai pada November 2004. Pelaksananya BEST Surabaya. Sarana tersebut masing-masing mulai beroperasi Maret dan April 2005.

Pimpinan Ponpes MQ, KH Abdul Manan menyatakan sangat bersyukur pesantrennya terpilih sebagai lokasi proyek SANIMAS. "Sekarang santriwati tak perlu antre lagi. Dulu kalau ada yang sakit perut bingung," katanya.

Sebelumnya di pesantren itu ada 350 santri perempuan dengan jamban 2 buah. Lima jamban lainnya tak berfungsi. Untuk mandi dan cuci mereka menggunakan kolam bersama. "Kita terkendala biaya. Santri membayar sangat murah. Tak cukup untuk membangun sarana MCK," jelas Manan.

Secara total MCK yang terdiri atas 6 WC dan 2 kamar mandi di Ponpes MQ menelan biaya 154 juta. Pesantren sendiri memberikan swadaya sebesar 23 juta dengan perincian *in cash* Rp. 5 juta dan sisanya *inkind*. Lainnya dari Pemda dan BORDA. Untuk operasionalisasi, santri tidak ditarik bayaran. Hanya ada pengelola beranggotakan 16 santri yang bertugas mengatur piket kebersihan, kontrol air, dan pengawasan terhadap peraturan yang ditetapkan seperti tidak boleh memakai sandal dan mencuci baju di kamar mandi.

Di Ponpes Sumber Bungur, sarana MCK dengan enam toilet dan dua shower ini mampu melayani sekitar 300 santri putra. Dulunya santri sebanyak itu hanya dilayani sebuah toilet. Akibatnya, banyak santri yang buang air dan mencuci ke sumber air yang jaraknya sekitar 10 menit perjalanan. "Adanya SANIMAS ini mempercepat aktivitas belajar, menjaga kebersihan dan kesehatan," kata Ketua Ponpes SB, KH Ahmad Madani.

Keberadaan sarana MCK ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya, termasuk murid sekolah Aliyah yang terletak tidak jauh dari Ponpes yang berdiri pada tahun 1925 itu. Berkat MCK ini pula, Aliyah tersebut memperoleh akreditasi B, lebih baik dari sebelumnya. Selain itu air buangan dari MCK dimanfaatkan oleh petani di sekitarnya untuk menyiram tanaman.

Biaya konstruksi mencapai Rp. 157 juta. Nilai ini lebih mahal dibanding di Ponpes MQ, karena di sini atapnya dicor. Rencananya di atas MCK akan dibangun kantor dan klinik santri. Dalam proyek ini, Ponpes SB memberikan swadaya sebesar Rp. 24 juta dengan rincian *in cash* Rp. 5,5 juta dan sisanya *inkind*. Operasionalisasi setiap hari dilakukan oleh para santri dengan koordinator Abdul Hamid, orang kepercayaan pimpinan Ponpes. Pengguna dari luar tak dipungut bayaran. Dana operasional ditanggung sepenuhnya oleh pesantren.

Proyek SANIMAS juga menjangkau Kampung Karang Kletak, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Proyek ini mulai konstruksi pada Desember 2004 dan beroperasi April 2005. Bentuk sarana berupa enam toilet dan dua kamar mandi. Berbeda dengan sarana SANIMAS sejenis, di tempat ini juga dibangun taman dan rumah penjaga. "Ini pembelajaran dari beberapa yang sudah kita bangun dan memang hasilnya lebih bagus kalau ada rumah jaga," kata Surur.

Sarana SANIMAS ini melayani penduduk setempat yang terdiri atas 246 KK atau 762 jiwa. Sebelumnya sudah ada fasilitas sanitasi, termasuk yang milik swasta, tapi tidak mencukupi kebutuhan. Sebagian penduduk memilih buang air di tambak di pinggir kampung. Sarana ini dibangun dengan dana sebesar 272 juta.

Asfan, penjaga sarana SANIMAS ini menjelaskan, sejak beroperasi rata-rata ada pemasukan sebesar Rp. 30 ribu per hari. Hasil ini dibagi rata antara penjaga dan kelompok swadaya masyarakat setempat sebagai pengelola. "Sayangnya belum semua tertarik ke sini (toilet). Tetap saja ada yang berak di tambak. Katanya kalau berak di WC tak bisa keluar," katanya sambil menunjuk orang yang lagi jongkok di tambak, tak jauh dari lokasi SANIMAS.

Tak jauh dari Mandaran, ada proyek SANIMAS yang lebih dulu dilaksanakan, yakni di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul. Sarana yang dibangun berupa sistem komunal. Sebelumnya di RW 2 ini hanya tujuh KK dari 97 KK yang memiliki jamban. Lainnya buang air di sungai. Menurut Hasyim, sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), pembangunan sistem ini awalnya mendapat hambatan dari seorang warga yang bekerja di dinas kesehatan. "Ternyata dia baru ngaku tindakan itu dilakukan karena dia tidak diajak menjadi panitia," kata Hasyim.

Konstruksi pembangunan dimulai pada Agustus 2003 dan mulai beroperasi pada Desember 2003. Guna pem-

Proyek SANIMAS juga menjangkau Kampung Karang Kletak, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Proyek ini mulai konstruksi pada Desember 2004 dan beroperasi April 2005.

bangunan sarana ini setiap KK dikenai iuran pertama sebesar Rp. 75 ribu yang bisa dibayar dua kali. Dana keseluruhan mencapai Rp. 238 juta. Untuk biaya operasional, setiap pelanggan dikenai iuran sebesar Rp. 2.200/KK. "Tiga bulan pertama berjalan lancar, setelah itu mandeg sampai sekarang," kata Hasyim. Namun demikian, pengelola masih memiliki kas sebesar Rp. 3 juta.

Di Kota Mojokerto, proyek SANIMAS berlokasi di Balongcok, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, dan di Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon. Yang pertama merupakan SANIMAS tahap I dan yang kedua tahap II. Kedua sarana MCK ini dibangun di daerah padat penduduk. Sebagian besar warga tak memiliki jamban dan membuang air di sungai atau selokan. Dapat dibayangkan bau tak sedap selalu terciptanya di lokasi tersebut sebelumnya.

"Kita senang sekali," kata Ny Sofi, bendahara KSM Miji Serasi yang mengelola sarana SANIMAS tersebut. Setiap bulan, KSM ini menerapkan iuran kepada warga pengguna. Pemasukan setiap bulan rata-rata Rp. 180 ribu, yang berasal dari setiap KK Rp 6 ribu. Selain itu, pengelola juga membuat kotak sumbangan. Pengguna WC dikenai Rp. 200 dan kamar mandi Rp 300. Rata-rata terisi Rp 8-10 ribu per hari. Dana yang terkumpul melebihi kebutuhan operasional. Rata-rata kebutuhan listrik hanya 50 ribu per bulan dan penjaga Rp. 200 ribu. "Selama beroperasi tiga

bulan, sejak April, kami memiliki saldo Rp. 900 ribu," kata Ny. Sofi gembira. Ia juga menceritakan, sejak April pula 'Kali Bokong'-sebutan kali tempat buang air di wilayah itu-ditutup.

Sedangkan SANIMAS Balongcok yang beroperasi sejak April 2004, kondisinya masih lumayan bagus. Sebuah kotak sumbangan diletakkan di bagian depan dekat pintu masuk. Hingga 11 Mei 2005, saldo yang terkumpul berjumlah Rp. 1.163.085. Warga Balongcok secara rutin membayar iuran bulanan. Jumlahnya Rp 150-180 ribu per bulan. Sedangkan dana dari kotak sumbangan rata-rata Rp. 50-80 ribu. Biaya operasi terdiri atas uang listrik rata-rata Rp. 70 ribu dan penjaga Rp. 200 ribu.

Sementara itu di Kota Sidoarjo, MCK Plus dibangun di Dusun Bungur, Kelurahan Madaeng, Kecamatan Waru. Letaknya sekitar 100 meter dari terminal Bungur Asih. Sarana ini dibangun mulai November 2004 dan beroperasi April 2005. Sarananya berupa lima toilet dan tiga shower. Biaya operasi mengandalkan iuran dari pengguna yakni anak Rp. 300 dan dewasa Rp. 500.

Sanyoto, penjaga MCK, menjelaskan bulan pertama operasi dana yang terkumpul sebesar Rp. 830 ribu dan bulan kedua sebesar Rp. 900 ribu. Perolehan itu dipergunakan untuk membayar operator sebesar Rp. 350 ribu dan air serta listrik sebesar Rp. 100 ribu. Sisanya sebagai saldo KSM. Menurutnya, pemakai kebanyakan orang yang lalu lalang di daerah tersebut dan para penghuni kost-kostan. "Karena orang sini kebanyakan sudah punya jamban," katanya.

Begitulah beberapa sarana SANIMAS di beberapa daerah yang sempat dikunjungi Percik. Ada yang sukses tapi ada yang bermasalah. Yang pasti, banyak pembelajaran yang bisa diambil dari program SANIMAS tersebut. Tiap daerah memiliki karakter tersendiri sehingga penentuan strategi harus disesuaikan dengan kondisi. ■ **mujiyanto**

Pelatihan CLTS di Muaro Jambi, Muara Enim, dan Bogor

Setelah uji coba *Community -Led Total Sanitation* (CLTS) dilakukan di Kabupaten Lumajang dan berhasil mengubah kondisi masyarakat, uji coba serupa dilaksanakan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Muaro Jambi (Jambi), Muara Enim (Sumatera Selatan), dan Bogor (Jawa Barat)

Pelatihan tersebut bertujuan memahami tentang prinsip dasar pendekatan yang dikembangkan dalam CLTS, mendorong peserta untuk secara spontan menjadi fasilitator CLTS di desanya, mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuang hajat sembarangan, dan menyusun rencana kerja dusun untuk menindaklanjuti pelatihan ini.

Pelatihan CLTS di Kabupaten Muaro Jambi berlangsung pada 4 - 7 Juli 2005. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kabupaten, DPMU Proyek CWSH, guru, Sanitarian, PMD Kecamatan, Tim PKK, Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan tokoh masyarakat. Fasilitator pelatihan ini berasal dari Pokja AMPL, WASPOLA, dan tim kerja daerah. Praktek pelatihan dilakukan di empat lokasi, yaitu Dusun Setiti dan Dusun Suka Menanti di Desa Muaro Pijoan, Dusun I dan II di desa Mendalo Laut.

Pada saat yang bersamaan, pelatihan berlangsung di Kabupaten Muara Enim. Acara diikuti oleh 42 peserta yang berasal dari tim Dinas Kesehatan Muara Enim, Dinas Kesehatan Propinsi, Sanitarian, PMD Kecamatan, Kepala Puskesmas, CPMU WSLIC, DPMU WSLIC, tim Konsultan WSLIC, tim CWSH Proyek, Pokja AMPL. Fasilitator pelatihan adalah Pokja AMPL, konsultan CLTS, WASPOLA dan tim WSLIC

Prinsip dasar pendekatan yang dikembangkan dalam CLTS, mendorong peserta untuk secara spontan menjadi fasilitator CLTS di desanya, mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuang hajat sembarangan, dan menyusun rencana kerja dusun untuk menindaklanjuti pelatihan.

Muara Enim. Lokasi praktek berada di empat lokasi yakni: Dusun Palai Desa Sempalai Sebedang, Desa Babat, Desa Ibul, dan Desa Tanjung Bunut.

Sementara itu, pelatihan CLTS di Kabupaten Bogor berlangsung pada 18-25 Juli 2005, dihadiri oleh 40 peserta dari Pokja AMPL (Depkes), Dinkes Bogor, Dinkes Cirebon, Dinas PU Bogor, Dinas PU Propinsi Jawa Barat, DPMU dan tim konsultan WSLIC Bogor, konsultan pemberdayaan WSLIC

Ciamis, konsultan pemberdayaan propinsi WSLIC, Sanitarian dan Puskesmas, WASPOLA dan WSP-EAP. Lokasi praktek di Desa Cimande, Cimande Ilir, Dusun Sengked dan Dusun Laladon di Desa Sukaresmi.

Secara umum pelatihan ini mendapat tanggapan positif dari peserta dan masyarakat yang menjadi lokasi uji coba. Di Muara Enim, masyarakat di Desa Babat, Ibul, Tanjung Bunut telah terpicu untuk memulai perubahan perilaku dari kebiasaan BAB sembarang menjadi pengguna WC yang sehat. Di Bogor, 21 keluarga menyatakan segera akan membangun jamban.

Kendati begitu, di beberapa desa, pemicuan tidak segera memberikan dampak langsung. Berdasarkan pengalaman lapangan, pada dasarnya masyarakat memerlukan jamban, tetapi karena faktor kemiskinan dan mitos, maka kesanggupan membangun tidak dinyatakan secara tegas. Mitos yang berkembang di masyarakat adalah bahwa membangun jamban itu mahal dan harus indah/cantik agar tahan lama. ■ AK/MJ

FOTO: POKJA AMPL



Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di Daerah

Dalam rangka memperoleh gambaran kegiatan penyebarluasan kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat di propinsi dan kabupaten peserta program, WASPOLA menggelar serangkaian pertemuan koordinasi. Untuk wilayah timur, koordinasi dilaksanakan di Makassar pada 28-29 Agustus 2005, sedangkan untuk wilayah barat koordinasi berlangsung di Bandung pada 31 Agustus-1 September 2005.

Pertemuan koordinasi itu juga dimaksudkan untuk mempertajam persepsi peserta tentang pentingnya data AMPL sebagai bahan perencanaan program AMPL khususnya berkaitan dengan sasaran MDG.

Pertemuan Makassar

Pertemuan koordinasi dihadiri oleh 21 peserta. Mereka berasal dari Pokja AMPL Pusat dan Tim WASPOLA (6 orang), Propinsi Sulawesi Selatan (4 orang dari Kabupaten Selayar, Pangkep dan Takalar), Propinsi Gorontalo (5 orang dari Kabupaten Pohuwato, Bonebolango dan Gorontalo), Propinsi NTB (4 orang dari Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa), dan Propinsi Sulawesi Tenggara (2 orang).

Pengantar acara disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Pokja AMPL Pusat), serta Rani Nurhadi dari AusAID. Oswar menyoroiti beberapa isu penting khususnya yang berkaitan dengan pencapaian target MDG yaitu kejelasan status kondisi data cakupan AMPL saat ini. Berdasarkan pengalaman selama ini data AMPL yang tersedia belum akurat menunjukkan keadaan cakupan AMPL yang sebenarnya.

Khusus mengenai pendanaan, Rani

Nurhadi, mengatakan AusAID mendukung pendanaan WASPOLA sejak awal sampai saat ini. Dari hasil evaluasi AusAID, WASPOLA telah mencapai *output* yang diharapkan dengan indikasi yaitu telah tersusunnya kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat dan telah disebarluaskannya kebijakan ini ke tujuh propinsi. Pada saat ini juga sedang dikembangkannya kebijakan nasional AMPL berbasis institusi. Hal ini mengindikasikan bahwa WASPOLA telah mampu menyumbang usaha menjamin keberlanjutan pembangunan AMPL berbasis masyarakat di Indonesia.

Dari pertemuan tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi yaitu untuk Pokja AMPL Pusat dan Pokja AMP Propinsi. Rekomendasi tersebut berupa:

A. Pokja Pusat

1. Pokja Nasional memfasilitasi tim propinsi untuk mengembangkan langkah konkret dalam operasionalisasi kebijakan antara lain (i) Pertemuan koordinasi dengan pokja propinsi dalam momentum *road show*, (ii) Pokja pusat secara periodik meminta propinsi untuk menyampaikan progress kegiatan pelaksanaan kebijakan
2. Memelihara jaringan pokja pusat, propinsi dan kabupaten
3. Pertemuan koordinasi selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk menyertakan unsur/elemen lain dari daerah.

B. Pokja Propinsi

1. Mengoperasionalkan Rencana Kerja Tahunan yang disepakati khususnya dalam penyiapan data
2. Memanfaatkan momentum kegiatan di tingkat kabupaten

Pertemuan Bandung

Pertemuan koordinasi dihadiri oleh

34 orang dari Pokja AMPL Pusat, WASPOLA, Propinsi Banten (2 orang dari Propinsi dan masing-masing satu orang dari Kab. Pandeglang, Lebak, dan Kota Tangerang), Sumatera Barat (2 dari propinsi, dan masing-masing satu dari Kota Padang, Kab. Tanah Datar dan Sijunjung), Bangka Belitung (2 dari propinsi, dan masing-masing satu dari Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka Barat, dan Bangka Selatan) dan Propinsi Jawa Tengah (2 orang dari propinsi dan masing-masing satu orang dari Kab. Grobogan, Pekalongan, dan Kebumen).

Pembukaan dilakukan oleh Oswar Mungkasa (Pokja AMPL Pusat). Ia menyampaikan tiga hal penting yang ingin ditangani Pokja AMPL selama tahun 2006 yaitu perbaikan dan penyediaan data AMPL, perbaikan strategi komunikasi, dan perbaikan jaringan antar pelaku AMPL. Selanjutnya acara diisi dengan sambutan oleh Sofyan Iskandar dari WASPOLA. Ia menjelaskan peran WASPOLA sebagai pendukung kegiatan-kegiatan Pokja AMPL dan strategi operasionalisasi Kebijakan AMPL tahun 2005 melalui tangan Propinsi yang didasarkan pengalaman operasionalisasi tahun 2003 dan 2004.

Pada pertemuan ini Rewang Budiyatna dari Pokja AMPL memaparkan tentang dana stimulan bagi daerah. Menurutnya, sudah ada kepastian persetujuan anggaran dari departemen keuangan untuk kegiatan pendanaan kegiatan AMPL di daerah. Namun itu terbentur oleh peraturan pemerintah tentang tidak bolehnya pemerintah pusat memberikan dana stimulan kepada daerah (langsung) kecuali untuk kegiatan darurat. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu dicarikan jalan keluar agar dana stimulan yang pernah direncanakan tetap dapat diberikan kepada kota/kabupaten. ■ (MJ)

Road Show Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di Daerah

Dalam rangka operasionalisasi kebijakan nasional pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat, WASPOLA bersama Pokja AMPL mengadakan serangkaian *road show*. Acara ini bertujuan untuk mempresentasikan operasionalisasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Dengan kegiatan ini diharapkan para pemangku kepentingan khususnya pengambil kebijakan memberikan dukungan yang lebih guna mempercepat proses pengembangan rencana strategis daerah dalam pembangunan AMPL yang berkelanjutan.

Bangka Belitung, 27-29 Juli 2005

Road show di propinsi baru ini diawali dengan acara *talk show* di radio Sonora (lokal) pada pukul 19.00-21.00 (27/7). *Talk show* ini menampilkan Ketua Bappeda Bangka Belitung, Amri, yang membahas permasalahan AMPL di Babel, Nugroho Tri Utomo dari Pokja AMPL membahas mengenai latar belakang kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat, dan Sofyan Iskandar dari WASPOLA membahas tentang WASPOLA itu sendiri. Selama acara ada dua penanggap dari pendengar. Pertama, perlunya perlindungan lingkungan bagi Babel karena degradasi lingkungan sangat jelas. Kedua, bagaimana menyinergikan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.

Sementara itu, pertemuan para pemangku kepentingan berlangsung pada 28 Juli 2005. Pertemuan dibuka oleh Wakil Gubernur Babel. Peserta berjumlah 40 orang yang berasal dari perwakilan dinas propinsi terkait, kabupaten/kota, anggota legislatif, dan pers. Wakil Gubernur dalam sambutannya menguraikan kondisi lingkungan Babel yang makin menurun. Ia sepakat dengan kebijakan nasional yang ada. Hanya ia meminta ada surat keputusan dari pusat sebagaimana yang diinginkan oleh Bappeda.

Road show diakhiri dengan kun-

jungan lapangan ke tiga lokasi yaitu TPA Parit Enam, intake PDAM yang tak berfungsi dan area perlindungan Kolong Kacang Pedang. Ketiga lokasi ini mengalami masalah AMPL. Semua peserta mendiskusikan dengan ketua Bappeda solusi permasalahan tersebut.

Hal penting yang diperoleh dari *road show* tersebut yaitu pembuat kebijakan di daerah mendukung penuh implementasi kebijakan dan memiliki kepedulian terhadap AMPL, dan strategi pelaksanaannya telah diserahkan ke kabupaten/kota untuk menyusunnya.

Nusa Tenggara Barat, 11-12 Agustus 2005

Road show diisi dengan pertemuan para pemangku kepentingan terkait AMPL di NTB, audiensi dengan gubernur, dan pertemuan dengan Pokja AMPL Lombok Barat. Utusan dari pusat yang hadir dalam acara tersebut yaitu Endang Setyaningrum (Pokja AMPL) Rick Pollard (WSP-EAP), Rani Nurhadi (AusAID), Subari dan Nur Apritman dari WASPOLA.

Selama proses diskusi dengan pokja AMPL pusat, sekretaris daerah dan pokja AMPL kabupaten, terdapat beberapa hal penting yang mengemuka:

- o Kebijakan nasional telah diadopsi di kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2005 Lombok Barat menyempurnakan *draft* rencana strategis AMPL yang telah dihasilkan pada tahun 2004 dan pada

tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp.2 Miliar untuk kegiatan fisik AMPL dalam bentuk stimulan.

- o Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pada tahun 2005 akan menambah kabupaten baru meliputi Lombok Timur dan Sumbawa. Untuk itu tim kabupaten juga telah mengalokasikan dana untuk operasional tim.

- o Sampai saat ini di NTB terdapat permasalahan pelaksanaan pembangunan AMPL yang berkelanjutan antara lain:

- Belum tersedianya data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan AMPL.
- Menurunnya kualitas lingkungan, yang berakibat hilangnya mata air dari 700 buah menjadi 250 buah.

- o Disadari oleh Sekda bahwa masih banyak sarana AMPL yang dibangun yang tidak berkelanjutan, hal ini memerlukan penanganan bersama. Harapan kedepan dalam proyek pembangunan AMPL berlu diberikan muatan ekonomi.

Gorontalo, 18 Agustus 2005

FOTO:POKJA AMPL



Road show Kebijakan Nasional AMPL di Gorontalo dihadiri oleh Pokja AMPL, WASPOLA dan WSP-EAP. Agenda *road show* ini antara lain adalah pertemuan dengan Gubernur dan

seluruh pimpinan daerah kabupaten, kunjungan lapangan serta *talk show* di TVRI Gorontalo.

Pertemuan dihadiri oleh 25 orang yang terdiri dari pejabat terkait tingkat propinsi dan pimpinan daerah kabupaten. Pertemuan diawali dengan laporan pelaksanaan kebijakan di Gorontalo oleh Kepala Bappeda dan dilanjutkan dengan sambutan Gubernur, Fadel Muhammad, mengenai situasi pembangunan AMPL di Gorontalo. Selanjutnya dilakukan presentasi Kebijakan AMPL oleh Oswar Mungkasa (Pokja AMPL) yang diakhiri dengan diskusi serta penutupan oleh kepala Bappeda Propinsi.

Beberapa hal penting yang dicatat dari pertemuan itu adalah:

- o CARE International Indonesia sedang mengembangkan pembangunan AMPL, berbasis masyarakat di 61 desa (pada tahap awal) bersama dengan pemerintah daerah. Dukungan dana untuk kegiatan fisik berjumlah USD 192.769 (sekitar 1,9 Miliar rupiah).
- o Alokasi dana untuk sektor AMPL, tahun 2005 adalah sebesar 13,3 Miliar rupiah yang bersumber dana APBN dan APBD.
- o Permasalahan utama dalam sektor sanitasi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam PHBS. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya sarana jamban yang dibangun namun tidak digunakan, dengan berbagai alasan termasuk akibat tidak berfungsinya kelembagaan yang dibentuk. Juga oleh faktor lain, yaitu kurang tepatnya perencanaan dan rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Sementara itu kunjungan lapangan dilaksanakan ke PDAM Kota Gorontalo, Desa Dembe 1 dan salah satu desa yang mengembangkan teknologi *hydraulic ram* untuk mengairi ladang jagung yang saat ini menjadi sektor unggulan di Propinsi Gorontalo. Inisiatif penyediaan air bersih di Desa Dembe dilakukan oleh masyarakat, tahun 2002. Setelah sistem berfungsi, pada tahun 2002

masyarakat membentuk Badan Pengelola Air Bersih (BPAB), membangun 75 kran umum dan mengajukan bantuan kepada Pemda serta kerjasama dengan PDAM. Tahun 2003 sarana air bersih dan BPAB diresmikan oleh walikota dan mendapat bimbingan teknis dari PDAM. Sampai tahun 2005, BPAB ini yang dipimpin oleh Umar Latif, telah membangun 188 kran umum, total pelanggan 2800 KK dan debit produksi 12 L/detik. Harga air saat ini adalah Rp. 4800/m³.

Acara *road show* diakhiri dengan *talk show* yang ditayangkan oleh di TVRI Gorontalo dengan narasumber Minami (Kepala Bappeda Propinsi), Oswar Mungkasa (Pokja AMPL), Sofyan Iskandar (WASPOLA). Beberapa hal didiskusikan pada acara ini meliputi: kondisi pembangunan AMPL di Gorontalo, latar belakang disusunnya Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat.

Banten, 28-29 Agustus 2005

Road show berlangsung di kantor Sekda Propinsi Banten. Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Bappeda Banten. Peserta pertemuan sebanyak 13 orang dari Pokja AMPL Banten dan 5 orang dari Pokja AMPL Pusat dan WASPOLA.

Beberapa isu yang dapat diidentifikasi dalam *road show* ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai target MDG, Propinsi Banten menargetkan cakupan layanan air minum menjadi 74 persen dan 73 persen untuk layanan penyehatan lingkungan. Namun kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya peran aktif masyarakat dan tidak efisiennya investasi di sektor AMPL.
2. Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat di Propinsi Banten dimulai dari Kab. Lebak dan saat ini akan dilanjutkan di Kab. Pandeglang dan Kota Tangerang.
3. Masalah yang teridentifikasi :
 - o Perlunya mengembangkan program sektor AMPL yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi rakyat.

- o Sebagian besar sekolah dasar di Banten belum memiliki fasilitas sanitasi.
- o Perlu mulai dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya air dan sanitasi kepada anak-anak usia sekolah.
- o Lemahnya sistem basis data AMPL di Propinsi Banten. Perlu dilakukan pengorganisasian data dan peningkatan koordinasi antar instansi di tingkat pusat, propinsi hingga kabupaten.
- o Upaya-upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di Banten kurang menjadi prioritas dibandingkan dengan upaya-upaya pengobatan/penanggulangan penyakit.

Jawa Tengah, 21-22 September 2005

Lokakarya Operasionalisasi dan Sinerji pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat di propinsi Jawa Tengah diikuti oleh 51 orang, berasal dari Pokja AMPL Propinsi Jawa Tengah, Pokja AMPL Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Pokja AMPL Pusat, dan WASPOLA. Kegiatan ini dibuka oleh Kabid Fispra Bappeda Jawa Tengah.

Kegiatan diisi dengan pemaparan oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Basah Hernowo. Ia menguraikan kondisi AMPL dan target yang harus dicapai sesuai dengan MDGs. Menurutnya, pada masa lalu AMPL dipandang hanya masalah teknis, pemerintah sebagai penyedia sehingga bila ada kebutuhan langsung dipenuhi dan dianggap sudah selesai persoalannya.

Ke depan, lanjutnya, pembangunan AMPL perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan kriteria pelayanan efisien dan *reliable* terus menerus, dengan cakupan membesar, kontinuitas, kualitas dan kuantitas yang baik, serta biaya yang terjangkau.

■ (MJ/AK)

Second Southeast Asia Water Forum (SSAWF) Komitmen Regional, Pengelolaan Air Melalui Partisipasi Publik

Second Southeast Asia Water Forum (SSAWF) lahir dari suatu inisiatif global terhadap pentingnya penataan integral pengelolaan sumber daya air. Gagasan ini diawali di Chiang Mai, Thailand, 17-21 Nopember 2003. *First Southeast Asia Water Forum*, FSAWF, menyepakati beberapa agenda, di antaranya : (i) mendorong partisipasi semua pihak pada pengelolaan sumber daya air, (ii) mengembangkan kebijakan dan regulasi, (iii) memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam pengembangan mekanisme pendanaan, (iv) membangun dan memperkuat kapasitas kinerja IWRM (*integrated water resources management*), (v) inisiasi proses aplikasi IWRM, (vi) meningkatkan kerja sama institusi pemerintah dan non-pemerintah, swasta untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh bencana air, dan sejenisnya (vii) melanjutkan upaya koordinasi regional dalam pengelolaan SWS (satuan wilayah sungai), (viii) identifikasi cara untuk meningkatkan sistem irigasi pertanian melalui pengelolaan terdesentralisasi dan (ix) melakukan pertemuan regional dua tahunan dalam rangka edukasi dan transfer informasi antara praktisi sumber daya air dan stakeholder yang lebih luas.

Kalau pada FSWAF, isu air minum dan sanitasi belum diangkat sebagai isu khusus, sebaliknya pada SSAWF. Pada acara yang diselenggarakan di Bali, 29 Agustus-3 September 2005, peran dan partisipasi publik juga menjadi isu penting, sehingga panitia mengambil tema "*better water management through public participation*".

Departemen Pekerjaan Umum (DPU),



FOTO-FOTO:DORMARINGAN H.S

Kemitraan Air Indonesia (KAI) bersama *Global Water Partnership* (GWP) menjadi aktor utama penyelenggaraan SSAWF ini, yang menuangkan tiga isu sebagai sub-tema kegiatan, yaitu:

1. *Advancing national water agendas*
2. *Managing water resources in river basins*
3. *Managing water resources in growing cities*

SSAWF dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum Indonesia, Djoko Kirmanto. Acara dihadiri oleh 11 negara ASEAN dan delegasi dari beberapa negara lain (Jepang, Australia, Inggris, Belanda, China, Srilanka, dan sebagainya). Pada sambutannya, Menteri juga menyoroti kondisi Indonesia dalam pencapaian MDGs, "*The MDG objective of serving 60 percent of population by 2015 appears too ambitious for Indonesia*". Menurutnya, Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapainya dengan telah dan terus akan menyiapkan perangkat kebijakan untuk dapat mendorong pencapaian itu, diantaranya UU 7/2004, PP 16/2005,



Dirjen Cipta Karya, Agus Widjanarko menyampaikan *keynotes* pada salah satu sesi (atas), delegasi Indonesia pada persiapan *Ministerial Declaration* (bawah).

National Action Plan (NAP), pembinaan PDAM dan sebagainya.

Agenda Nasional dalam Konstelasi MDGs

Menurut data ADB, di kawasan Asia-Pasifik, saat ini ada 700 juta penduduk tidak mendapat akses air minum dan 2 milyar penduduk hidup tanpa sanitasi yang memadai, data ini sesuai dengan laporan Bank Dunia. Pada SSAWF, persoalan ini dapat diteropong melalui (i) pentingnya reformasi sektor air, (ii) peningkatan ketahanan air untuk kelompok miskin menuju target MDGs, dan (iii) penerapan rencana dan

proses pengelolaan sumber air yang terintegrasi.

Ketidakberfungsian berbagai sarana bangunan air, kegagalan pengelolaan, rendahnya partisipasi masyarakat, inefisiensi pendanaan dan berbagai cerita sejenisnya, mendorong inisiasi global dan regional (Asia Tenggara) pada arah pembangunan yang mengedepankan reformasi kebijakan pemerintah.

Arriens Wouter, dari ADB, dalam presentasinya "*Why we need national water sector reform?*", menyatakan setidaknya diperlukan (i) penegasan aspek legal pengelolaan air; yang mengarah pada pengaturan kepentingan di era desentralisasi, hak atas dan kompetensi pengguna, formulasi kerangka hukum, kebijakan dan strategi, (ii) keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan air; melalui peningkatan peran swasta, partisipasi masyarakat, dan media massa, (iii) meningkatkan nilai ekonomi air; melalui reformasi tarif dan kerangka kebijakan, rasionalisasi subsidi, katalisasi investasi dan (iv) pengembangan mekanisme koordinasi; melalui pengembangan badan pengelola di semua level.

Dalam konteks pencapaian target MDG, kawasan Asia-Pasifik dianggap memiliki kemajuan yang signifikan. Duta Besar MDG, Erna Witoelar, mencatat beberapa harapan dan tantangan: (a) sejak tahun 1990 jumlah penduduk berpendapatan miskin menurun signifikan dari 23 persen menjadi 16 persen, (b) target pendidikan dasar diyakini tercapai tetapi dibutuhkan upaya lebih, (c) Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina menunjukkan kemajuan dalam program pengentasan kemiskinan, (d) diperlukan upaya yang lebih keras untuk peningkatan sumber daya manusia di Laos, Myanmar dan Kamboja, (e) tetapi masih ada gejala kurang gizi dan kelaparan, (f) kemajuan penanganan HIV/AIDS telah terlihat di Thailand dan Kamboja, (g) hambatan perdagangan yang dihadapi ASEAN masih tinggi dan memerlukan pembangunan ekonomi yang terintegrasi.

Dalam konteks pencapaian MDGs

itulah maka agenda nasional dalam pengelolaan air harus dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan, yang didasari oleh kemajuan pemerintah. "*A major factor to disparities in water access between rich and poor nation is lack of political will,*" kata Erna lebih lanjut.

Pengelolaan Air Terintegrasi

Pentingnya pengelolaan air yang terintegrasi dan berkelanjutan sudah kerap kali disuarakan. Pada SSAWF ini, pengalaman dan pembelajaran atas implementasi pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi (IWRM, *Integrated Water Resources Management*) di delapan negara Asia Tenggara dipresentasikan. Pengalaman dari delapan negara itu telah menunjukkan bahwa melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), kemauan berbagi ide dan pengalaman, pengembangan strategi yang bottom-up, penerapan IRWM di lapangan dan termasuk memasukkan sektor air dalam pengembangan strategi pembangunan, maka konsensus berbagai pihak untuk rencana pengelolaan air yang terbaik dapat dicapai.

Selain itu, SSAWF mencatat bahwa pengembangan jaringan dan kemitraan merupakan hal penting diperhatikan. Pada konteks pengelolaan jaringan sumber daya air, NARBO (*Network of Asian River Basin Organization*) telah eksis dan mendorong penerapan pengelolaan air yang berkelanjutan. IWRM di berbagai negara masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya hambatan birokrasi, kapabilitas staf rendah, tumpang tindih organisasi dengan mandat yang tidak jelas, lemahnya kualitas data dan informasi, lemahnya penerapan pemulihan biaya dan akuntabilitas keuangan.

Sisi lain dari IWRM yang juga perlu mendapat perhatian adalah bagaimana IWRM memiliki pengaruh dan berhubungan dengan (i) isu-isu ekosistem dan mata pencarian, (ii) penurunan dampak negatif dari daya rusak air, banjir, genangan dan bencana alam lainnya, dan (iii) isu hulu-hilir (*upstream-down-*

stream) dalam implementasi ketersediaan dan kelayakan utilitas air. Dalam kerangka keberlanjutan pengelolaan, maka pada SSAWF ini direkomendasikan pentingnya suatu mekanisme dan tata pengaturan kelembagaan yang menekankan (i) pengelolaan air yang lintas wilayah untuk air permukaan, air tanah, dsb (ii) lintas kepentingan/penggunaan untuk perkotaan, pertanian, perikanan dan lingkungan dan (iii) lintas yurisdiksi, antara pemerintah daerah, pusat dan regional. Tantangan memang berat tapi bukan berarti tidak bisa diwujudkan.

Pengelolaan air di perkotaan, tanggung jawab siapa?

Sejak tahun 2002, kawasan Asia Tenggara telah mulai memfokuskan pengelolaan air yang lebih berorientasi pada menjawab kebutuhan peningkatan penggunaan. Perkembangan kawasan perkotaan menimbulkan masalah yang lebih kompleks dan peningkatan keterlibatan berbagai pihak, termasuk swasta. Pada SSAWF ini, hal ini disorot dari: (i) pengembangan kapasitas untuk penyediaan air perkotaan, (ii) membangun pelayanan air yang lebih kredibel, (iii) inovasi pengelolaan sanitasi dan air limbah, (iv) pemberdayaan masyarakat dalam reformasi pelayanan air dan (v) skema pendanaan air.

Pengalaman dari *Phnom Penh Water Supply Authority* (PPWSA) Kamboja, adalah contoh menarik dari pengelolaan air di perkotaan. Direktur PPSWA (sejenis PDAM, di Indonesia) menjelaskan bagaimana PPSWA mengalami perubahan baik secara kelembagaan, personil dan keuangan. Melalui program revitalisasinya, PPSWA telah berhasil menurunkan kebocoran air dari 44 persen menjadi 10 persen, meningkatkan akses pelayanan sampai 97 persen, dan efisiensi penagihan sampai 98 persen. Kunci suksesnya, menurut direkturnya Ek Sonn Chan, adalah adanya *ownership*, dukungan eksternal, serta regulasi dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Dalam pengelolaan air dan isu perkotaan, SSAWF menyoroti bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dan isu pendanaan. Keterlibatan masyarakat dibahas secara khusus pada hari ke-4, 1 September dalam sesi *empowerment civil society for water service reform*, yang mendiskusikan (i) bagaimana memfasilitasi pelibatan publik yang lebih luas, (ii) instrumen yang diperlukan untuk penguatan keterlibatan publik, (iii) bagaimana menciptakan lingkungan/iklim yang memadai dalam keterlibatan publik. Dalam sesi ini, UU no 7/2004 jadi contoh menarik untuk dibahas.

Isu lain pada tema ini adalah tentang pendanaan sektor AMPL (*water financing*) di perkotaan. Selain presentasi konsep dan perspektif lembaga donor, tema ini mengangkat alternatif pendanaan sektor AMPL relasi pengguna hulu-hilir. Alternatif pendanaan yang disampaikan antara lain tentang formula harga dasar air (*base water pricing*, BWP) dan insentif /desinsentif model (IDM). BWP, yang merupakan perbandingan biaya konservasi dan volume penggunaan air, dapat digunakan sebagai instrumen dan indikator untuk evaluasi perlindungan dan upaya sumber daya air. Sedangkan IDM, yang memformulasikan sumber dan penggunaan di daerah hulu-hilir, dapat diterapkan untuk alokasi pembagian pajak (*tax sharing*) antara propinsi dan kabupaten dalam satuan wilayah sungai (SWS).

Pada sesi penutupan, yang bertema "*catching up, keeping up with growing cities*" dilakukan dialog antar pelaku AMPL untuk mendapatkan pembelajaran dari pengelolaan AMPL dan mencari solusi lebih baik atas tantangan implementasi AMPL perkotaan, termasuk sektor pendanaan, kelembagaan, pelibatan swasta, pelayanan kaum miskin, isu subsidi dan efisiensi. "*Balancing people's capacity to pay and ensuring efficient service, is this possible?*" adalah pertanyaan penting yang harus dijawab bersama.

Tindak lanjut SSAWF dan Deklarasi Menteri

SSAWF berakhir tanggal 3 September, komitmen negara Asia Tenggara dituangkan dalam rencana tindak lanjut (*action plan*) bersama yaitu:

1. Air untuk pembangunan berkelanjutan
 - Mendorong tercapainya kesepakatan kontribusi air terhadap sektor lain, misalnya penyediaan air minum domestik dan industri, irigasi dan drainase, energi, pengendalian banjir, navigasi dan rekreasi, ke dalam pengembangan sosial ekonomi lokal secara nasional dan regional, dan pemerintah menyediakan investasi (setidaknya level minimum) untuk pelayanan dan infrastruktur yang menunjang keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi.
 - Mempromosikan konservasi lingkungan dan kerangka aksi kepada pengambilan keputusan, parlemen, politikus dan mengimplementasikan dalam proyek terkait dengan air,
 - Mendorong dan mendukung inisiatif pemerintah daerah untuk pengelolaan air yang efisien dan berkelanjutan, khususnya terhadap eksploitasi air tanah.

2. Implementasi IWRM

Implementasi IWRM yang progresif melalui pendekatan "*learning by doing*" dan "*best practice*"; mendorong pencapaian target IWRM melalui kerjasama teknis dan pendanaan antar negara; mempromosikan penguatan kapasitas untuk *monitoring* dan pengawasan; mendorong dan mempromosikan pemahaman hulu-hilir untuk mengatasi konflik dan meningkatkan pemahaman para pihak terhadap pentingnya *river basin organization* (RBO).

3. Air minum dan penyehatan lingkungan

- Mendorong implementasi program untuk meningkatkan kualitas air dan perluasan akses air minum dan sa-

rana sanitasi di kota dan desa, dengan mengutamakan pendekatan *pro-poor*

- Meningkatkan pendanaan dan instrumen pemerintah untuk pencapaian MDGs dalam sektor AMPL melalui pengembangan skema: inovasi pendanaan, desentralisasi, pendekatan berbasis masyarakat (*community-based approach*), keterlibatan sektor swasta (PSP), kemitraan publik-swasta (PPP), dorongan penyedia skala kecil (*small-scale provider*) dan kelompok masyarakat, regulasi, pengembangan acuan (*benchmarking*), monitoring dan informasi,
- Mendorong dan mengupayakan jaminan kualitas dan kuantitas air baku untuk standar pelayanan AMPL,
- Mengembangkan acuan jelas terhadap perubahan peran pemerintah pusat dan daerah, lembaga pelaksana, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan AMPL yang baik,
- Mengembangkan acuan yang jelas terhadap dampak penyediaan AMPL terhadap pemerintah daerah, nasional dengan strategi dan tujuan pengentasan kemiskinan
- Mendorong pembangunan instrumen terhadap pendekatan "*voice of user*", dalam upaya mengurangi inefisiensi dan penyediaan AMPL di perkotaan dan perdesaan,
- Menyiapkan acuan untuk menciptakan strategi pengelolaan AMPL dan strategi manajemen *supply-demand* melalui *setting* tarif, *cross* dan subsidi langsung, kampanye kepedulian dan pendidikan),
- Mempromosikan berbagai inisiatif untuk menghadapi persoalan penyediaan AMPL di kawasan perkotaan dan pinggiran,
- Mengembangkan acuan pelaksanaan untuk perlindungan sumber air permukaan dan air tanah dari pencemaran dan eksploitasi yang berlebihan
- Mempromosikan pembangunan sistem sanitasi berkelanjutan yang minim dan hemat air, akrab lingkungan

dan *cost effective*. Dalam hal ini pendekatan desentralisasi sanitasi dapat merupakan alternatif yang efektif melalui pengembangan kerangka kebijakan, institusi dan penerimaan publik.

4. Pengelolaan air untuk pangan dan lingkungan

- Mendorong dan mempromosikan inovasi pendanaan untuk skema irigasi yang efisien termasuk pertanian skala kecil dan berbasis masyarakat, operasi dan pemeliharaan irigasi yang partisipatif untuk petani dan kelompok pemakai air
- Mengembangkan acuan untuk penguatan sinergi dan mengurangi kontradiksi kebijakan dan implementasi antara sektor pertanian dan lingkungan dan mempromosikan berbagai inisiatif penyediaan air untuk produksi pangan di daerah minim dan kering air.
- Mendorong ketersediaan kebijakan yang efektif untuk pengelolaan air tanah untuk pangan.

5. Ketahanan air

- Mengembangkan dan melakukan strategi tingkat lokal terhadap isu perubahan iklim,
- Melaksanakan program penguatan kapasitas dan dukungan pendanaan pengembangan teknologi masa datang untuk *early warning system*, *risk management*, pengurangan dampak, dan sebagainya
- Mendorong pengembangan strategi yang sejalan dengan pengelolaan konflik dan mempromosikan etika pengelolaan air lokal dan solidaritas penggunaan dalam menciptakan *good water governance*

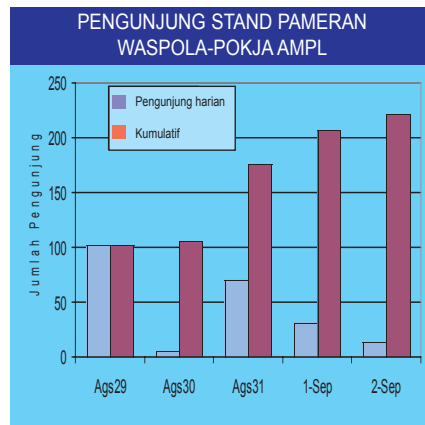


Pengunjung pameran dari berbagai negara tengah meminta informasi seputar Kebijakan Nasional di stand Pokja AMPL-WASPOLA.

Pada pertemuan ini, delegasi dari masing-masing negara telah mendiskusikan konsep Deklarasi Menteri, se-Asia Tenggara. Tanggal 2 September, materi ini dibahas oleh perwakilan dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Philipina, Thailand, Vietnam.

Pameran WASPOLA-POKJA AMPL di SSAWF

Bersamaan dengan konferensi ini, WASPOLA-Pokja AMPL mengadakan pameran bersama dengan pihak lain. Ada 11 kavling pameran yang diberikan



kepada:

- Nippon Koei, Jakarta
- JICA (*Japan International Cooperation Agency*), Jakarta and Tokyo
- *Black and Vieth, Consultant Agency*, Jakarta
- WASPOLA-Pokja AMPL, Jakarta
- Grundfos, Pump Manufacture, Jakarta
- ADB (*Asian Development Bank*), Manila
- Caprari, *Pump Manufacture*, Jakarta
- Mekong River Commission (MRC), Cambodia
- IUCN, world conservation organization, Thailand
- Kemitraan Air Indonesia (KAI), water organization, Jakarta

- BORDA, *non-government organization*, Bali.

Kavling WASPOLA-Pokja AMPL dikunjungi lebih dari 200 pengunjung, yang berasal dari Indonesia dan negara lain, seperti: Philipina, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Thailand, Laos, China, Jepang, Sri Lanka, Jerman, Belanda, Inggris, Australia dan lembaga internasional (WHO, Unicef, AusAID, USAID, ICRAF, World Bank, ADB, dsb).

Beberapa tanggapan dan masukan dari pengunjung terhadap WASPOLA-Pokja AMPL adalah:

- Air minum dan sanitasi, harus menjadi bagian yang integral dari pengelolaan sumber daya air
- Langkah dan upaya Indonesia, yang telah menyusun Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, merupakan langkah penting dalam rangka peningkatan layanan AMPL
- Penampilan berbagai isu dan pesan dalam bentuk karikatur dan kartun, merupakan ide kreatif untuk menyampaikan pesan tentang persoalan air dan pemberdayaan masyarakat, tanpa menyinggung. ■

Dormaringan H. Saragih

Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat dengan LSM Terkait

FOTO:POKJA AMPL

Dalam rangka berbagi pengalaman pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam proyek AMPL antar-LSM, Ditjen Pembangunan Daerah Depdagri menyelenggarakan lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat dengan LSM terkait di Surabaya, 5-7 September 2005.

Lokakarya ini bertujuan (i) memperoleh kesamaan pandangan dalam upaya sinergi LSM dan pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan AMPL yang berkelanjutan; (ii) berbagi pengalaman dengan LSM dalam mempromosikan pendekatan pembangunan AMPL berbasis masyarakat sebagai upaya awal menciptakan kemitraan sinergis dalam operasionalisasi kebijakan di daerah; dan (iii) memperoleh kesepakatan langkah-langkah operasional paska lokakarya dalam upaya kemitraan sinergis dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan AMPL.

Lokakarya tersebut diikuti oleh 84 peserta yang berasal dari 17 LSM berskala internasional, nasional, dan lokal. Acara dibuka oleh Direktur Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Ditjen Bangda, Prof. Dr. Cahyana Ahmad Jayadi.

Lokakarya ini menghasilkan kesamaan pandang antar peserta mengenai pentingnya penerapan pokok-pokok Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat dalam rangka keberlanjutan pembangunan. Selain itu pengalaman spesifik dari 17 LSM dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi/penyehatan lingkungan terpetakan.

Peserta lokakarya menyepakati ren-



cana tindak untuk terselenggaranya forum komunikasi LSM pelaku pembangunan AMPL. Secara spesifik masukan-masukan yang kemudian disepakati menjadi rencana tindak lanjut dari lokakarya ini adalah sebagai berikut:

- membentuk jaringan kerja AMPL
- melakukan pertemuan secara priodik

Diskusi:
Peserta lokakarya sedang mendiskusikan permasalahan AMPL dan merumuskan agenda daerah ke depan.

- melakukan dialog tematik mengenai isu AMPL
- membuka dialog dengan kalangan swasta

Sebagai tindak lanjut dalam jangka pendek akan dilakukan pertemuan lanjutan pada minggu ke dua Oktober 2005 untuk menyusun dan menyepakati agenda lanjutan dimana dalam pertemuan ini sebagai sebagai tuan rumahnya adalah IRI dan Pokja Nasional AMPL. ■ MJ

Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Tim Teknis Propinsi dan Kabupaten Lokasi CWSH

Direktorat Jenderal PMD Depdagri menyelenggarakan orientasi pemberdayaan masyarakat dengan metode MPA/PHAST bagi tim teknis propinsi dan kabupaten lokasi CWSH di Padang, 22-27 Agustus 2005. Kegiatan ini diikuti oleh Staf Dinas Kesehatan, PMD, PU dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten lokasi proyek CWSH dari Jambi dan Bengkulu.

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali Tim Teknis Propinsi maupun Tim Teknis Kabupaten mengenai salah satu metode partisipatif yang diterapkan pada proyek CWSH sehingga lebih mampu untuk memahami kebutuhan masyarakat. Acara dibuka oleh Sekditjen PMD Drs. K. Paimbonan, MSi dan dilanjutkan dengan presentasi oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Basah Hernowo mengenai

penerapan MPA/PHAST pada proyek CWSH dan kaitannya dengan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat.

Basah menjelaskan, penyusunan dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat didasarkan pada kenyataan pelayanan yang sering tidak berkelanjutan (*unsustainable services*). Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, di lain pihak kemampuan pemerintah – khususnya pendanaan – sangat terbatas untuk membiayai pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Oleh karena itu perlu suatu upaya untuk menutupi hal itu sekaligus membangun AMPL dengan basis masyarakat.

Dalam kebijakan tersebut, lanjutnya, masyarakat menempati posisi yang

sangat penting. Masyarakat menjadi subjek pembangunan, karena masyarakat lebih mengetahui masalah, kebutuhan mereka dan potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Salah satu piranti (*tools*) untuk menerapkan pendekatan partisipatif pada pembangunan AMPL adalah MPA/PHAST (*methodology of participatory assessment/participatory hygiene and sanitation transformation*). MPA ini dapat digunakan untuk melakukan *assessment* dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Menurut Basah, salah satu kunci keberhasilan metode ini adalah adanya kontribusi masyarakat dan keterlibatan aktif masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan pembangunan sehingga timbul rasa memiliki yang pada akhirnya hasil pembangunan akan berkelanjutan dapat tercapai. ■ MJ

Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah

Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Daerah dilaksanakan pada 2 - 4 Agustus 2005, di Puncak, Bogor. Lokakarya ini diikuti 45 peserta dari LSM, Perguruan Tinggi dan Bappeda Propinsi (Gorontalo, NTB, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung) serta tim Pokja AMPL Pusat dan WASPOLA.

Lokakarya yang dibuka oleh oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Ir. Basah Hernowo, MA itu bertujuan untuk memahami prinsip dan strategi pelaksanaan kebijakan nasional



AMPL berbasis masyarakat, pembelajaran operasionalisasi kebijakan, pertukaran informais dan pengalaman dalam pelaksanaan kebijakan AMPL berbasis masyarakat serta pengenalan

draft Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Lembaga.

Selama lokakarya, isu yang penting berkembang yaitu perlunya upaya-upaya penguatan jaringan kerja sama seluruh pemangku kepentingan sektor AMPL dalam operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat. LSM, sebagai salah satu mitra dalam pembangunan AMPL, sangat berperan penting dalam pengembangan dialog dengan masyarakat mengenai isu-isu AMPL. Selain itu, pelaksanaan operasionalisasi kebijakan nasional AMPL juga perlu disinergikan dengan program-program yang sudah ada di daerah. ■ GT/MJ

Diskusi Nasional Sanitasi

Dalam rangka peringatan Hari Habitat, Direktorat Jenderal Cipta karya mengadakan Diskusi Nasional Sanitasi, 6 Juli 2005 di Jakarta. Diskusi ini menyetengahkan beberapa tema bidang sanitasi, meliputi rancangan kebijakan pembangunan sanitasi di Indonesia, pola edukasi dalam mempercepat pengembangan sanitasi, inovasi teknik dalam pengembangan sanitasi serta perlindungan sumber-sumber air, pola pendanaan serta tarif/retribusi bagi pengembangan sanitasi dan peranan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sanitasi di Indonesia.

Diskusi dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Ir. Agus Widjanarko, MIP. Hadir sebagai narasumber adalah Ir. Basah Hernowo, MA (Dirketur Perumahan dan Perumahan Bappenas), Prof.



FOTO: POKJA AMPL

DR. Ir. Sulistioweni, Dipl.SE, (Universitas Indonesia), Prof. DR. Ir. Enri Damanhuri (Institut Teknologi Bandung), Abimanyu, BE (Forkalim/PDAM Solo), dan Surur Wahyudi (BORDA).

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa tantangan terbesar pembangunan sanitasi di Indonesia adalah penerjemahan kebijakan ke dalam strategi dan langkah yang nyata dan bagaimana kebijakan mengenai sanitasi dapat

mengakomodasi peran aktif seluruh pemangku kepentingan yang ada. Kesadaran masyarakat mengenai sanitasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, kampanye peningkatan kesadaran masyarakat harus terus digiatkan. Salah satu upaya yang perlu ditempuh yakni melalui pendidikan baik formal maupun informal.

Hal lain yang muncul di antaranya prinsip *cost recovery* sangat sulit diterapkan dalam pengelolaan air limbah. Ini tantangan tersendiri yang harus segera ditanggapi. Inovasi-inovasi teknologi dalam pengelolaan sanitasi sudah banyak tersedia, namun ada pertanyaan yang harus diperhatikan yaitu bagaimana memilih alternatif teknologi yang sesuai dengan kapasitas masyarakat dalam pengadopsian dan pengelolaan teknologi tersebut. ■ (AK/MJ)

Pengenalan Metode Partisipasi Masyarakat di Lokasi Pasca Bencana

Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat dan Desa (PMD) Depdagri, 27-30 Juli lalu menyelenggarakan lokakarya pengenalan metode partisipasi masyarakat di lokasi pascabencana untuk Propinsi Aceh dan Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara.

Lokakarya diikuti oleh 55 peserta dari Tim Teknis Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara, dan perwakilan 7 kabupaten lokasi bencana yang berada di kedua propinsi itu. Lokakarya ini bertujuan mengenalkan *Methodology for Participatory Approach (MPA)/Participatory Hygiene and Sanitation (PHAST)* sebagai salah satu alat untuk implementasi pembangunan AMPL berbasis masyarakat, meningkatkan pemahaman peserta terhadap Kebijakan Nasional Pembangun-

an AMPL berbasis masyarakat, dan membantu peserta dalam menyusun rencana kerja Program CWSH, baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten.

Acara dibuka oleh Sekditjen PMD Drs. K. Paimbonan, MSi. Ia menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat memperoleh perhatian dalam era otonomi daerah saat ini. Menurutnya, tanpa memberdayakan masyarakat maka program akan gagal dan tidak berkelanjutan. Peserta juga memperoleh pemaparan tentang kebijakan nasional pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang berbasis masyarakat yang disampaikan oleh Direktur Perumahan dan Perdesaan BAPPENAS Ir. Basah Hernowo, MA.

Metode MPA/PHAST dikenal seba-

gai cara untuk meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan identifikasi analisis dan pemecahan masalah. Keikutsertaan masyarakat menciptakan rasa memiliki, membangun rasa percaya diri dan menumbuhkan rasa tanggungjawab sehingga terjadi proses pembangunan sarana air minum dan penyehatan lingkungan berkelanjutan.

Setelah mendapatkan gambaran secara lengkap tentang metodologi dan *tools* yang digunakan MPA-PHAST, peserta secara langsung melakukan simulasi terhadap beberapa metode MPA-PHAST.

Selanjutnya masing-masing propinsi dan kabupaten melakukan kegiatan penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing kabupaten dan propinsi. ■ AK/MJ

Lokakarya Informasi Berbasis Kinerja bagi PDAM yang Berorientasi *Stakeholder*

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) bekerja sama dengan USAID, USAEP, dan The Asia Foundation, 21 September lalu menyelenggarakan Lokakarya Informasi Berbasis Kinerja bagi PDAM yang Berorientasi *Stakeholder* di Jakarta. Lokakarya ini bertujuan menyusun strategi penyampaian informasi kepada publik dan pemerintah sehingga bisa menaikkan kredibilitas perusahaan.

Lokakarya ini diisi presentasi oleh Andi Fefta (Universitas Brawijaya-Administrasi Publik), Abdul Gani (Perpamsi), dan Syafril Jamarin (Dirut PDAM Kota Pontianak). Dari presentasi dan diskusi terungkap beberapa kendala PDAM selama ini dalam menyampaikan informasi indikator yaitu (i)

indikator yang sebenarnya diperlukan oleh *stakeholder*, tidak dilaporkan, (ii) indikator-indikator berasal dari bermacam lembaga, (iii) indikator *hand off* (tidak bisa ditangkap maksudnya).

Selain itu, permasalahan data tentang subsidi masyarakat kecil atas kinerja PDAM pun muncul. Muncul pertanyaan apakah subsidi harga yang dikenakan kepada masyarakat itu di bawah harga jual, harga BEP, atau harga HPP. Pertanyaan lainnya, menyangkut biaya tidak langsung lebih besar dari biaya langsung faktor produksi. Serta biaya lain-lain (di luar produksi) yang terkadang lebih dari 10 persen. Kenyataan ini menimbulkan ungkapan bahwa masyarakat mensubsidi PDAM atas biaya ketidakefisienan pemakaian/alokasi budget.

PDAM Kota Pontianak menjadi salah satu PDAM yang berhasil menerapkan manajemen strategi komunikasi dan sistem penyampaian informasi ke *stakeholder*. Sebagai hasilnya seluruh *stakeholder* (Pemda, DPRD, pelanggan, rekanan, Perpamsi, dll) berkomitmen kuat untuk memajukan PDAM yang kini memiliki 60 ribu sambungan rumah ini. Selama sembilan bulan terakhir PDAM tersebut melakukan reformasi besar-besaran. Hasilnya, UFW (*unaccounted for water*) turun dari 51,4 persen menjadi 37,8 persen dengan hanya perbaikan manajemen internal, tanpa investasi. Reformasi tersebut juga menaikkan profit dari Rp. 46 juta menjadi sekitar Rp. 2 milyar. Dan selama proses perombakan itu tidak ada keributan yang berarti. ■ (GUS/MJ)

Pendidikan Pelanggan PAM Mengenai Kualitas Air di Kecamatan Tanah Abang

FORKAMI bekerja sama dengan USAID/USAEP, Asia Foundation, PT. PAM Lyonnaise Jaya mengadakan pendidikan pelanggan PAM, 10 September lalu. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Tanah Abang. Turut terlibat dalam acara kantor kecamatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Komite Pelanggan Air Minum (KPAM) Jakarta Pusat dan YLKI. Acara ini diikuti oleh 65 pelanggan PAM di Kec. Tanah Abang.

Koordinator FORKAMI Job Supangkat mengungkapkan, masih banyak pelanggan PAM tidak mengetahui kaporit dan fungsinya dalam pengolahan air, bahkan ada pelanggan yang menganggap *kaporit* dengan *abate*! Banyak pelanggan yang mengkhawatirkan

kaporit dapat mengganggu kesehatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelanggan PAM mengenai aspek-aspek kualitas air minum, meningkatkan perubahan perilaku kritis terhadap kualitas air minum yang diterima, dan mendorong penyedia air minum untuk meningkatkan kualitas air hasil produksinya

Acara pendidikan pelanggan ini berbentuk diskusi kelompok yang berlangsung secara interaktif. Setelah presentasi dari narasumber, peserta diskusi dibagi ke dalam kelompok-kelompok diskusi yang dibantu seorang fasilitator dan narasumber. Di kelompok inilah tanya jawab berlangsung secara lebih mendalam.

Berbagai topik kualitas air diberikan

oleh narasumber seperti: Apa yang disebut bakteri Koli tinja dan mengapa bakteri jenis ini diperiksa, pengertian pH, apa yang menyebabkan kekeruhan pada air keran pelanggan, mengapa air keran berbau, dsb. Di samping topik tersebut, diberikan juga materi mengenai apa yang menjadi hak pelanggan dalam hal kualitas air PAM dan institusi yang bertanggungjawab dalam pengawasan kualitas air.

Pelanggan juga diberi kesempatan untuk melakukan analisa kualitas air dengan contoh air yang dibawa dari rumah masing-masing. Parameter yang diperiksa adalah parameter dasar air minum namun dapat digunakan sebagai petunjuk awal kualitas air secara keseluruhan. ■ (MJ)

Monitoring Kualitas Air Sungai Ciliwung

FOTO-FOTO: FORKAMI

Sedikitnya 80 orang siswa SMP Negeri 115 dan SMP Perguruan Rakyat 2 Jakarta Selatan turun ke sungai Ciliwung untuk melakukan analisa kualitas air, Agustus lalu. Sebagaimana layaknya peneliti sesungguhnya, mereka dengan serius melakukan pengukuran tingkat keasamaan air (pH), kadar oksigen terlarut, tingkat kekeruhan, temperatur air serta keberadaan binatang kecil (*macroinvertebrata*) sebagai indikator keadaan kualitas air sungai dengan menggunakan *water test kit* yang disediakan.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peningkatan kesadaran mengenai aspek kualitas air dan perlindungan sumber air yang diberi nama Program Monitoring Kualitas Air Indonesia 2005 yang diselenggarakan FORKAMI (Forum Komunikasi Pengelolaan Kualitas Air Minum Indonesia). Kegiatan ini juga disponsori oleh Badan Kerja sama Lingkungan Amerika Serikat untuk Asia (USAEP) dan Asia Foundation.

Koordinator FORKAMI, Job Supangkat mengatakan melalui kegiatan ini pihaknya berkeinginan dapat memercikkan kesadaran bersama akan pen-



tingnya usaha perlindungan sumber air dan kemudian secara bersama bekerja untuk meningkatkan ketersediaan maupun kualitas dari sumber air, demi kehidupan kita kini, dan generasi selanjutnya.

Para peserta dan masyarakat sekitar lokasi menerima penjelasan sekaligus berkesempatan langsung untuk melakukan analisa parameter kualitas air de-

ngan alat-alat yang telah disediakan oleh panitia. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dibimbing sukarelawan dari FORKAMI. Berdasarkan hasil pengukuran, siswa kedua SMP itu, menyimpulkan kondisi kualitas air sungai Ciliwung berada dalam keadaan tercemar. Data yang diperoleh, pH air berada pada kisaran 7-8, dengan tingkat kekeruhan rata-rata 80 JTU (*Jackson Turbidity Unit*), jumlah oksigen terlarut rata-rata 2-2-4 mg/l, keberadaan ragam makroinvertebrata (binatang kecil) yang sangat sedikit menunjukkan bahwa air sungai Ciliwung tidak mampu lagi mendukung banyak kehidupan mahluk air yang artinya mutu air Sungai Ciliwung buruk/ tercemar.

Selain kegiatan di sungai, peserta juga diajak melihat instalasi pengolahan air di Pejompongan untuk mendapatkan gambaran pengolahan air dari air baku sampai menjadi air yang siap dialirkan ke pipa-pipa pelanggan. ■ (MJ)



Pompa Air Tanpa Motor

FOTO: ISTIMEWA

Mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang pompa hidran. Pompa ini mampu mengalirkan air tanpa bantuan mesin pemompa. Daya penggerakannya adalah tekanan dinamik yang ditimbulkan oleh gaya air yang meluncur dari suatu ketinggian. Tekanan air itu kemudian diubah sebagai tenaga pendorong mengangkat air ke tempat sasaran yang lebih tinggi.

Prinsip-prinsip tersebut pun ada dalam Pompa Air Tanpa Motor (PATM) karya Ade R Purnama dari Bandung, Jawa Barat. Hanya saja dia telah melakukan serangkaian uji coba yang menjadikan modifikasinya tersebut layak untuk diaplikasikan di lapangan dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pompa hidran biasa. Bahkan temuan Ade telah mendapatkan hak paten pada tahun 1996.

Keunggulan

PATM tergolong unik karena memanfaatkan kekuatan alamiah berupa tekanan atau gaya air. Wajar bila alat ini dikatakan hemat karena tidak perlu menggunakan motor penggerak dan tidak memerlukan bahan bakar/tenaga listrik. Biaya perawatan pun kecil.

Alat ini mampu bekerja terus menerus, 24 jam, dan mampu mengalirkan air sampai ketinggian ratusan meter dari sumber air. Tidak perlu ada operasionalisasi yang rumit, karena alat telah bekerja secara otomatis.

Sistem Kerja

Pompa ini memiliki tiga bagian utama yakni:

1. Sumber air; dapat berupa danau, aliran sungai, kolam, atau bendungan kecil dengan debit paling sedikit 20 lt/detik/unit PATM
2. Unit pompa; dipasang antara 18 dan



24 meter dari sumber air dengan posisi minimal 2 meter dan maksimal 5 meter permukaan air serta dihubungkan dengan pipa penghubung berukuran 6 inci (tipe menengah)

3. Jaringan pipa pengeluaran dan pipa penghantar; dapat dipasang sepanjang puluhan kilometer apabila ketinggian antara sumber air dan daerah sasaran diukur tidak lebih dari 1.000 meter (QD).

Sistem kerja PATM diawali dengan aliran air dari sumber melalui pipa pemasukan atau pipa penghubung ke katup limbah. Gaya tekan air yang masuk ke dalam pompa akan mendorong katup pompa (katup limbah) ke atas sehingga tertutup dan menghentikan aliran air dalam pipa pemasukan. Penghentian aliran air secara tiba-tiba ini akan menghasilkan tekanan tinggi dalam pompa. Tekanan tinggi akan mengatasi tekanan dalam ruang udara pada katup penghantar sehingga air dari sumber mengalir lagi dari pipa penghubung. Perputaran ini berlangsung berulang-ulang dengan frekuensi

yang sangat cepat sehingga air mengalir melalui pipa pemasukan dan pengeluaran secara kontinyu.

Pada dasarnya prinsip kerja PATM merupakan proses pengubahan energi kinetik 'gaya gerak' air menjadi tekanan dinamik sehingga menimbulkan momentum atau 'pukulan air' yang berkekuatan tinggi dalam pipa saluran. Tekanan ini mengakibatkan katup pompa dan katup penghantar dalam tabung pompa terbuka dan tertutup secara bergantian.

Tekanan dinamik diteruskan untuk menghasilkan daya tekan dalam pipa pemasukan sehingga memaksa air naik ke pipa pengeluaran dan didorong ke pipa penghantar. Jadi prinsip kerja PATM yaitu melipatgandakan kekuatan gaya dorong air.

Sumber air

PATM ini membutuhkan air yang cukup yakni minimal 20 liter/detik. Guna menjaga keberlangsungan pasokan air ke pipa pemasukan, air perlu dikumpulkan dalam bendungan. ■ (MJ)

Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Bekasi

Ingin Bangkit di Tengah Kelesuan

FOTO: ISTIMEWA

Tak banyak yang tahu di Bekasi ternyata ada Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang memiliki prasarana dan sarana yang cukup representatif dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman (pengelolaan sampah, air limbah rumah tangga dan drainase perkotaan) di pusat dan daerah. Belum banyak instansi/lembaga yang memanfaatkannya. Padahal balai ini telah berdiri sejak 1990-an.

Balai yang dikenal dengan nama TC Bekasi merupakan hibah Pemerintah Jepang untuk Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum melalui *grant aid program JTA-150*. Berdiri di atas tanah seluas 11.000 m², di belahan timur kota Bekasi, keberadaan balai ini sebenarnya sangat strategis dalam menunjang program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam ikut meningkatkan pembangunan sektor air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman di era otonomi daerah sekarang ini.

Balai pelatihan ini memiliki prasarana dan sarana penunjang kegiatan pelatihan bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman meliputi laboratorium kualitas air bersih dan air limbah, *workshop/bengkel* kerja untuk instalasi pengolahan air bersih (IPA), mekanikal dan elektrik, perpipaan, persampahan dan air limbah. Selain sebagai penunjang kegiatan pelatihan, laboratorium dan *workshop* menerima jasa pelayanan untuk masyarakat



Gedung dan *workshop* milik BPAB-PLP, Bekasi

umum dan swasta serta institusi terkait lainnya.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.06/2003, status Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berubah menjadi unit swadana sebagai pengelola PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Balai ini bertugas mengembangkan kurikulum dan melaksanakan uji coba pelatihan teknis operasional bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman serta pelatihan lainnya dan diseminasi bahan pelatihan.

Guna mendukung fungsi dan tugasnya, balai ini memiliki 53 pegawai dengan komposisi satu orang berpendidikan S-3, satu orang S-2, 10 orang S-1, enam orang D3/Sarjana Muda, D2 satu orang, 15 orang lulusan setingkat SLTA, dua orang lulusan SMP dan lima orang lulusan SD. Beberapa diantaranya masih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tenaga itu dibantu lima tenaga widyarswara dengan komposisi tingkat pendidikan, yaitu satu orang S-3, dua orang S-2, satu orang

S-1, dan satu orang sarjana muda.

Kini balai itu berusaha lebih profesional. Caranya dengan mengubah nama menjadi Balai Pembinaan Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Bersamaan dengan itu balai ini terus berbenah diri.

Peran

Peningkatan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap prasarana/sarana air bersih dan penye-

hatan lingkungan telah menjadi gerakan internasional. Melalui *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dicanangkan PBB pada tahun 2000, telah disepakati bahwa pada tahun 2015 separuh dari penduduk dunia yang saat ini belum mendapatkan akses terhadap air minum (*safe drinking water*) harus telah mendapatkan akses tersebut. Sementara terkait dengan sanitasi, maka pada tahun 2015 separuh dari penduduk dunia yang belum mendapatkan fasilitas sanitasi harus terpenuhi.

Tentu tugas pemerintah tersebut sangat berat. Pemerintah daerah harus mendidik aparat dan masyarakatnya untuk bisa mengejar target tersebut. Di sinilah peran dari Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan untuk meningkatkan SDM bidang air minum dan penyehatan lingkungan dari seluruh Indonesia. Apalagi bila dilihat dari sisi pengalaman, balai ini cukup berpengalaman bekerja sama dengan pemda maupun swasta dalam menghasilkan SDM yang handal di bidang AMPL. ■

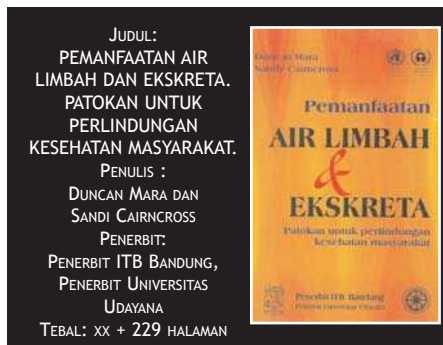
(MJ)

Memfaatkan Limbah Manusia

Selama ini ada anggapan bahwa air limbah dan ekskreta adalah benda yang tidak berguna. Anggapan ini menjadikan limbah dan ekskreta dibiarkan begitu saja, paling-paling dicarikan tempat pembuangannya. Padahal kalau dilihat lebih jauh, air limbah masih bisa dimanfaatkan.

Secara tidak sadar sebenarnya banyak orang di berbagai negara telah memanfaatkan air limbah dan ekskreta, khususnya kotoran manusia. Ribuan tahun orang Asia telah memanfaatkan tinja manusia dan hewan untuk memupuk kolam budidaya air, terutama untuk budidaya ikan mas dan mujair. Air limbah juga telah dimanfaatkan untuk pengairan tanaman terutama di daerah kering baik di negara industri maupun negara sedang berkembang.

Hanya saja yang diperlukan saat ini, bagaimana agar air limbah dan ekskreta



itu aman bagi kesehatan masyarakat. Faktor lingkungan, kesehatan, sosial budaya menjadi pertimbangan pemanfaatannya.

Buku yang ditulis oleh dua pakar Inggris ini menjelaskan secara rinci permasalahan ini, mulai dari sejarah dan keuntungan pemanfaatan kembali limbah beserta contoh kebiasaan yang dilakukan di berbagai belahan dunia, faktor kesehatan masyarakat termasuk pengertian praktis epidemiologi ter-

baru, perlindungan dan perbaikan lingkungan melalui pemanfaatan limbah serta tindakan pengendalian yang dapat dilaksanakan dan tepat bagi perlindungan kesehatan masyarakat, dan kelembagaan, hukum, serta keuangan bagi perencanaan proyek dan pelaksanaannya.

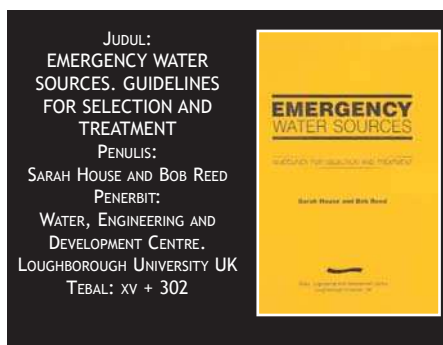
Buku ini sebenarnya secara khusus ditujukan kepada para ahli senior dalam berbagai sektor yang berkaitan dengan pemanfaatan kembali limbah dalam rangka mencegah penyebaran penyakit menular sekaligus mengoptimalkan pelestarian sumberdaya dan pendaurulangan limbah. Fokusnya pada pengendalian penularan mikrobiologi dan bukan pada penghindaran gangguan kesehatan oleh pencemar kimiawi. Namun tidak ada salahnya, kita yang peduli lingkungan ikut pula membacanya. ■ (MJ)

Penanganan Darurat untuk Air Bersih

Persepsi tentang kondisi darurat berbeda-beda antarorang atau organisasi. Akibat perbedaan itu pelaksanaan penanganan kondisi darurat pun bermacam-macam. Ada yang melihatnya sebagai upaya jangka pendek, tapi ada juga jangka panjang.

Buku ini mencoba menyamakan persepsi itu dengan mendefinisikan bahwa kondisi darurat digunakan untuk menggambarkan suatu krisis yang terjadi ketika sebuah komunitas mengalami kesulitan yang parah dalam menghadapi bencana. Bantuan dari luar diperlukan, kadang-kadang berlangsung beberapa bulan bahkan beberapa tahun.

Yang menarik, buku ini disusun untuk menangani berbagai kondisi darurat, khususnya menyangkut air bersih, dalam berbagai bentuk bencana



baik itu yang terjadi karena faktor alam maupun manusia, situasi aman atau kacau, daerah terjangkau atau terpencil. Ini penting karena setiap kondisi memiliki karakteristik penanganan yang berbeda pula.

Buku ini banyak menampilkan bagan-bagan disertai dengan check list kegiatan dalam setiap tahapnya. Secara

umum, penanganan kondisi darurat itu ada tiga tahap yaitu (i) pengumpulan informasi dan analisis; (ii) pemilihan (seleksi) sumber air maupun proses pengolahan air yang menjamin keberlangsungan suplai; (iii) pelaksanaan.

Buku ini menjelaskan pula karakteristik tanah dan air dalam berbagai level. Termasuk pula bagaimana membuat pemetaan untuk penyaluran air agar sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan hingga pengukuran kualitas air. Buku ini dilengkapi pula dengan informasi pendukung seperti jenis-jenis makhluk hidup yang tidak toleran, moderat, dan toleran terhadap polusi, dan berbagai jenis peralatan yang digunakan untuk pengukuran dan pengolahan air. Tidak salah jika ini memang sebuah buku petunjuk praktis. ■ (MJ)

Kesaksian Warga Buyat

Kasus Teluk Buyat mencuat ke permukaan tahun lalu. Berbagai polemik pun muncul. Ada yang membela warga, ada yang membela perusahaan tambang PT Newmont Minahasa Raya. Saat itu Menteri Kesehatan Achmad Sujudi menegaskan bahwa telah terjadi pencemaran merkuri di teluk yang terletak di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

VCD ini tidak membahas pertentangan tersebut, tapi menampilkan pengakuan masyarakat setempat berkaitan dengan peristiwa yang mereka alami. Pengakuan itu menyangkut tiga hal yakni hilangnya nener, hilangnya ikan, dan munculnya penyakit aneh.



Menurut pengakuan masyarakat, pembuangan limbah penambangan (*tailing*) emas itu telah menyebabkan pendapatan mereka yang menggan-

tungkan diri di laut menurun drastis. Ini karena nener mulai langka, demikian pula ikan-ikan sulit didapatkan.

Selain itu VCD yang diproduksi oleh Walhi ini menampilkan penyakit yang diderita oleh masyarakat. Banyak di antara mereka menderita gatal-gatal. Benjolan ditemukan di beberapa warga. Ada yang di leher, payudara, betis, pergelangan, pantat, dan kepala. Satu di antara yang memberi kesaksian meninggal 7 Februari 2004 karena tumor payudara. Selain pada manusia, benjolan sejenis ditemukan pada ikan. Ketika cairan itu dibuka, keluar cairan kental berwarna hitam dan lender berwarna kuning keemasan. ■ (MJ)

Pedoman bagi Proyek Multisektor

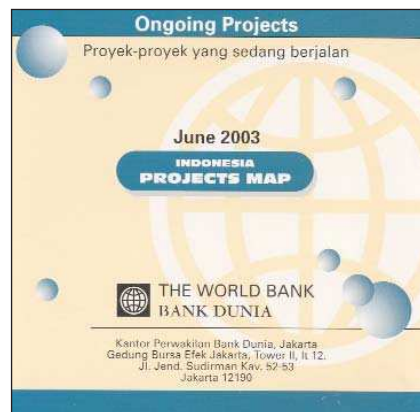
Proyek-proyek multisektor terus berkembang sebagai mekanisme jaringan pendanaan bagi masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa investasi air dan sanitasi perkotaan mengalami perubahan yang serius dalam perbincangan keberlanjutan dan efektivitas peningkatan pelayanan.

Ada empat hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan proyek yaitu (i) ketidaktepatan desain dan sistem operasionalisasi, (ii) ketidakcukupan staf dan fasilitas, (iii) kemampuan administrasi kaum miskin, (iv) ketidakcukupan biaya pemulihan dan operasionalisasi. Dalam rangka inilah pedoman ini disusun.

Pedoman yang dikeluarkan oleh *Rural Water Supply and Sanitation* (RWSS) ini berisikan antara lain prinsip-prinsip dasar penanganan air minum dan penyehatan lingkungan

(AMPL), penilaian umum, isu-isu penting, dan RWSS dalam proyek, dan perangkat praktis lainnya.

RWSS merupakan program Bank Dunia bekerja sama dengan *Bank-Netherlands Water Partnership*. Program ini meliputi penyediaan air minum bagi komunitas perkotaan khususnya untuk



keperluan rumah tangga (minum, makan, memasak, mandi dan sebagainya), secara berkesinambungan dengan suplai air berkualitas tinggi.

Prinsip-prinsip RWSS antara lain mempromosikan pendekatan tanggap kebutuhan; mempromosikan reformasi institusi sebagai dasar aturan yang jelas bagi para pemangku kepentingan; mendukung asosiasi pengguna air dalam perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen sarana; mengintegrasikan air minum, dan pendidikan sanitasi; mempromosikan investasi pengguna dalam sanitasi; mengarahkan tujuan ke kaum miskin; dan mendukung manajemen lingkungan berbasis masyarakat.

CD ini memberikan gambaran secara rinci langkah demi langkah. Karenanya, isi CD cocok untuk ditelaah oleh mereka yang terkait dengan proyek-proyek AMPL. ■ (MJ)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

<http://www.eldis.org/csr/>



Perusahaan, LSM, dan media memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembangunan dan aturan yang terkait dengan *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan). Perbedaan itu terjadi dalam definisi dan konsepnya. Sebuah survei yang diadakan terhadap 500 perusahaan, eksekutif senior pada LSM, dan para jurnalis menunjukkan bahwa ada perbedaan terminologi dan dasar asumsi yang menyebabkan pemahaman yang berbeda antara masing-masing kalangan. Meskipun definisinya berbeda, survei itu menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan sepakat untuk bergerak ke depan dalam pembangunan internasional.

Situs ini memuat CSR cukup lengkap. Selain definisi, situs tersebut memuat pula tiga skenario ke depan dalam CSR, berbagai konferensi menyangkut CSR baik di tingkat dunia maupun di tingkat Asia, pembelajaran program CSR dari beberapa negara, termasuk bagaimana model-model bisnis yang bisa memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun masyarakat.

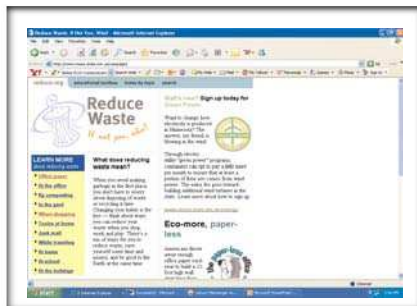
Situs ini cukup tepat bagi mereka yang sedang menggerakkan roda bisnis dan juga para pengambil keputusan un-

tuk bisa menyalurkan langkah dalam membangun masyarakat secara bersama-sama. Isu CSR telah menjadi isu internasional dan merupakan bagian penting dalam mencapai target *Millennium Development Goals* (MDGs). ■ (MJ)

Kurangi Sampah dari Sumbernya

<http://www.moea.state.mn.us/campaign/>

If not you, who? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Sampah tidak hanya menjadi persoalan negara berkembang tapi juga negara maju seperti Amerika. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah. Salah satunya dilakukan oleh negara bagian Minnesota. Mereka melakukan kampanye mengurangi sampah sejak dari sumbernya melalui situs ini.



Situs ini memberikan gambaran dan pelajaran kepada masyarakat bagaimana cara mengurangi sampah. "Banyak jalan bagi Anda untuk mengurangi sampah, melindungi diri Anda dari waktu dan uang, dan menjadikan bumi bagus pada saat yang sama," begitu ajakannya. Dan itu bisa dilakukan ketika Anda berbelanja, bekerja, dan bermain.

Sebagai petunjuknya, situs ini menjelaskan dalam hal apa saja sampah bisa dikurangi. Misalnya mengenai pemakaian kertas, perilaku di kantor dan di

kebun, ketika berbelanja, ketika di rumah, di sekolah, saat liburan, dan pengomposan. Semuanya ditampilkan dengan aneka gambar dan ilustrasi yang menarik.

Pemerintah setempat mengingatkan penggunaan kertas telah menjadi salah satu sumber sampah terbesar. Setiap tahun orang Amerika menggunakan 10.000 lembar kertas per tahun atau setara dengan membangun dinding kertas setinggi 12 kaki yang membentang dari New York hingga San Fransisco.

Sampah dan Kesadaran Lingkungan

<http://www.learner.org/exhibits/garbage/intro.html>

Warga Amerika menghasilkan 4 pounds (2 kg) sampah per hari. Ini menjadi persoalan besar bagi lingkungan. Pertumbuhan sampah ini lebih cepat dibandingkan kemampuan alam menghancurkannya. Maka, mau tidak mau harus ada jalan untuk menghambat laju pertumbuhan sampah itu.

Keberhasilan pengurangan sampah, menurut situs ini, tergantung pada pemahaman masyarakat.

Oleh karena itu, setiap individu harus ikut serta memelihara lingkungan demi masa depan generasi penerus. Dan hal itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di manapun dengan cara mengurangi produksi sampah. ■ MJ



Majalah *Percik* bekerja sama dengan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia, membuka rubrik Klinik. Rubrik ini berisi tanya jawab tentang air minum dan penyehatan lingkungan.

RUMAH RAMAH LINGKUNGAN

Tanya:

Adakah tips-tips agar rumah kita termasuk yang ramah lingkungan?

Adi, Pasar Minggu

Jawab :

Rumah yang ramah lingkungan perlu didukung oleh setiap anggota keluarga/penghuni rumah yang secara sadar ikut dan ambil bagian dalam kegiatan lingkungan di rumahnya. Menjaga kebersihan dan menghijaukan setiap sudut halaman perlu dipertahankan agar tercipta rumah yang sehat.

Berikut tips-tips yang bisa diterapkan di rumah/lingkungan masing-masing:

- Halaman rumah jangan seluruhnya diberi pengerasan/semèn, sebaiknya diberi ruang bagi air hujan untuk meresap ke dalam tanah. Ada baiknya dibuat resapan di sekitar rumah sehingga air dari talang dan luar rumah dapat masuk ke resapan ini.
- Menampung air yang sudah dipakai untuk menyiram tanaman atau fungsi lain. Misalnya, menggunakan air bekas merebus sayuran, air cucian beras, air cucian sayur, teh basi, dan air bekas aquarium untuk menyiram tanaman. Juga air bekas wudhu bisa digunakan untuk mencuci sepeda atau lainnya.
- Menyediakan tanah dalam karung dan sedikit pasir, yang sewaktu-waktu diperlukan untuk membuat kompos atau sebagai media tanaman yang sudah tersedia. Perbandingan untuk membuat media tanaman umumnya adalah: 2 bagian tanah, 1 bagian pasir dan 1 bagian kompos, lalu dicampur menjadi satu.
- Mempunyai komposter (alat pembuat kompos) dari ember/kaleng/wadah apapun yang sudah tidak dipakai,

kemudian diberi lubang di bawahnya untuk membuat kompos skala rumah tangga dari sampah dapur yang dihasilkan. Atau karung beras dari plastik yang dilubangi untuk membuat kompos dari sampah kebun.

AERASI DIPERPANJANG

Tanya:

Apa keuntungan dan kerugian proses aerasi diperpanjang (extended aeration) pada proses pengolahan air limbah?

Puput, Bekasi

Jawab :

Proses aerasi diperpanjang (*extended aeration*) merupakan suatu modifikasi dari proses lumpur aktif dengan waktu kontak yang lebih panjang dan konsumsi oksidator yang lebih tinggi.

Keuntungan penggunaan proses aerasi diperpanjang adalah :

- Proses oksidasi yang dihasilkan akan jauh lebih sempurna ketimbang proses oksidasi pada proses lumpur aktif biasa (sebagian besar dioksidasi menjadi gas CO₂), sehingga reduksi kandungan senyawa organik lebih tinggi.
- "Lumpur yang dihasilkan sangat sedikit, karena proses oksidasi yang relatif sempurna, dengan efisiensi konversi materi organik menjadi gas CO₂ yang cukup baik. Dalam hal ini biaya investasi maupun biaya pengoperasian-pemeliharaan-perawatan unit pengolahan lumpur menjadi sangat kecil.
- Kerugian penggunaan proses aerasi diperpanjang adalah :
 - Dengan waktu detensi yang cukup tinggi (sekitar 12 - 24 jam), maka volume tangki aerasi yang dibutuhkan akan lebih besar.
 - Konsumsi massa oksidator (umumnya digunakan udara atau oksigen) tiap satuan massa *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) yang disisihkan,

akan lebih tinggi ketimbang proses lumpur aktif biasa.

PENAMBAHAN SENYAWA KLOR

Tanya:

Apa keuntungan dan kerugian penggunaan senyawa klor di awal proses pengolahan air minum (pre-klorinasi)?

Ina, Jakarta

Jawab :

Proses pre-klorinasi merupakan proses pembubuhan senyawa klor (termasuk kaporit) pada awal proses pengolahan (umumnya bersamaan dengan pembubuhan koagulan).

Keuntungan penggunaan proses pre-klorinasi adalah :

○ Pada air dengan dominasi karakteristik keruh (*suspended solid*), pre-klorinasi akan memperkuat ikatan pada flok yang terjadi pada unit flokulasi, sehingga menghasilkan flok dengan densitas lebih tinggi, dan semakin mudah diendapkan pada unit sedimentasi.

○ Pada air dengan dominasi karakteristik warna (*true colour*), pre-klorinasi akan mengoksidasi senyawa organik yang terdapat pada air baku tersebut, sehingga proses flokulasi akan berjalan lebih sempurna. Hal ini akan sangat mempermudah proses sedimentasi dengan efisiensi yang lebih tinggi.

Kerugian penggunaan proses pre-klorinasi adalah pembentukan senyawa Tri Halo Methane (THM) yang diakibatkan oleh ikatan senyawa organik dengan senyawa klor.

Hingga saat ini masih dilakukan penelitian dampak konsumsi THM yang terkandung dalam air minum, yang diduga bersifat karsinogenik (senyawa pencetus kanker). Contoh senyawa THM adalah CHCl₃. ■

AGENDA

Tanggal	Bulan	Kegiatan
4-7	Juli	Pelatihan CLTS di Kab. Muara Enim dan Kab. Muaro Jambi
11-14	Juli	Pelatihan CLTS di Kab. Bogor
27-29	Juli	Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Bangka Belitung
2-4	Agustus	Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di daerah
3-5	Agustus	<i>Regional Ministerial Meeting on MDGs in Asia & The Pacific: The Way Forward 2015</i>
8-13	Agustus	Orientasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Metode MPA/PHAST bagi tim teknis Kabupaten dan Propinsi Lokasi CWSH di Surabaya
11-12	Agustus	Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Nusa Tenggara Barat
12	Agustus	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi ProAir di Bali
18	Agustus	Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Gorontalo
22	Agustus	Orientasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Metode MPA/PHAST bagi tim teknis Kabupaten dan Propinsi Lokasi CWSH di Padang
28-29	Agustus	Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Banten
		Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Makassar
1-2	September	Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Bandung
5-7	September	Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan AMPL bagi NGO Mitra di Surabaya
7	September	Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Jawa Tengah
9	September	Rapat Koordinasi Pokja AMPL dan WASPOLA Pemantapan Pelaksanaan Program AMPL Propinsi Banten
13-15	September	Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Bangka Belitung
14	September	Rapat Koordinasi WASPOLA <i>Working Group</i>
15	September	Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Sulawesi Selatan Roadshow Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Pandeglang Diskusi Draft Pedoman Strategi Komunikasi dan Informasi Pelayanan Berbasis Kinerja bagi PDAM
16	September	Diskusi Konsep Studi Verifikasi Data AMPL
19-24	September	Lokakarya Diseminasi Kebijakan Nasional bagi Tim Teknis CWSH di Puncak, Bogor
19	September	Presentasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Lembaga di Departemen Kesehatan
21-22	September	Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Jawa Tengah
21	September	Roadshow Kebijakan Nasional AMPL di Tangerang Lokakarya Strategi Komunikasi dan Informasi Pelayanan Berbasis Kinerja bagi PDAM dan Berorientasi <i>Stakeholder</i>
27-29	September	Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Gorontalo
28-30	September	Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Sulawesi Selatan
29-30	September	Lokakarya Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat di Banten
3	Oktober	Peringatan Hari Habitat Sedunia 2005, tema: <i>MDG and The City</i>
6	Oktober	Pertemuan Penjelasan <i>Water and Sanitation Program (WASAP)-Dutch Trust Fund.</i>
7	Oktober	Presentasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di Kantor Ditjen PMD, Depdagri
13-16	Oktober	Lokakarya Sosialisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di lokasi WSLIC-2 di Padang
20-23	Oktober	Lokakarya Sosialisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di lokasi WSLIC-2 di Surabaya

LAPORAN

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
IN INDONESIA

Penerbit: Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, 2005

ANNUAL ECONOMIC REPORT
DECEMBER 2004

Penerbit: Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, 2005

STATUS LINGKUNGAN HIDUP
INDONESIA 2003

Penerbit: Kementerian Lingkungan
Hidup, 2004

HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2003

Penerbit: UNDP, 2003



PROSIDING

Diseminasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Jakarta

Penerbit: Departemen Dalam Negeri, 2004

Diseminasi Kebijakan Nasional Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Makassar

Penerbit: Departemen Dalam Negeri, 2004

MAJALAH

Jurnal Berdaya, Nopember 2004
Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penerbit: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depdagri.

Buletin Perkotaan dan Perdesaan, Januari 2005

Penerbit: Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep. PU

LATAR, Vol. II No.04

ADB Review, Vol. 37, April 2005.

Penerbit: ADB

FLOW, tabloid



BUKU UMUM

MAKING SERVICES WORK FOR POOR PEOPLE
Penerbit: World Bank, 2004

WATER AND CULTURAL DIVERSITY
Penerbit: Centre Franco-Japonais Alliance
Francaise d'Osaka, 2003

NEW DESIGN FOR WATER AND SANITATION TRANSACTION
Penerbit: Public-Private Infrastructure Advisory Facility
(PPIAF) and WSP, 2002

SANITATION PROMOTION
Penerbit: WHO, 1998

ENVIRONMENT AND ECONOMIC IN PROJECT PREPARATION
Penerbit: ADB, 1999



PANDUAN

Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.

Penerbit: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003

Handbook for Integrating Poverty Impact Assesment in the Analysis of Project

Penerbit: Asian Development Bank, 2001

Junction manhole

Salah satu jenis lubang inspeksi/pemeriksaan yang dibangun di setiap percabangan jaringan air limbah atau drainase.

Kraus process activated sludge

Modifikasi dari proses pengolahan aerasi yang melibatkan lumpur aktif untuk pengolahan air limbah dengan kandungan nitrogen yang rendah.

Lagoon (Laguna)

Bak dangkal (1,2-1,8 m) dan kedap air dengan luas yang mampu menampung air limbah atau lumpur yang akan diolah secara *anaerobic* atau fakultatif dengan waktu detensi 1-6 bulan tanpa atau dengan konstruksi pengokoh.

Lamp hole

Salah satu jenis lubang inspeksi sederhana pada jaringan air kotor berupa lubang vertikal sedalam 22,5 cm, dilengkapi penutup yang dibangun dengan cara membuat percabangan T pada suatu posisi tertentu jaringan. Dalam operasionalnya, sebuah lampu akan diturunkan ke dalam lubang sehingga kondisi saluran air kotor tersebut (tersumbat atau tidak) akan terdeteksi dengan cara memantau pantulan cahaya lampu itu dari lubang inspeksi pada lokasi di hilir atau di hulunya.

Land disposal

Cara pembuangan lumpur akhir (hasil olahan air limbah) dengan menimbunnya pada suatu areal terbuka.

Landfill (Penimbunan)

Pembuangan sampah dengan cara menimbun/menumpuknya di atas tanah suatu lahan.

Land Treatment

Salah satu metode pengolahan alami (natural treatment). Pengolahan limbah secara alami oleh tanah yang ada di suatu lahan dengan memanfaatkan pori tanah sebagai filter serta tumbuh-tumbuhan yang ada.

Lateral sewer

Pipa air limbah yang hanya menerima dan menyalurkan air limbah dari jaringan (air limbah) rumah tangga.

Latrine (Jamban)

Disebut juga kakus, sarana sanitasi yang sangat sederhana terdiri atas pelat jongkok dan lubang sumuran sebagai tangki septiknya.

LC50 (Lethal Concentration)

Konsentrasi zat kimia di udara atau di air yang diperkirakan dapat menyebabkan kematian 50 persen binatang hidup yang diuji/berada di dalam udara/air tersebut.

LD50 (Lethal Dose)

Perhitungan dosis (gram pencemar per kilogram berat badan) yang dapat menyebabkan kematian 50 persen dari populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan.

Leachfield (Bidang Resapan)

Lahan dengan tanah berpori atau lahan yang diperbaiki dengan material yang bisa membentuk pori-pori (pasir, kerikil, ijuk) atau lahan yang digemburkan sebagai tempat meresapkan air bekas atau hasil olahan air limbah.

Leachate

Limbah cair yang berasal dari tempat pengumpulan/penimbunan/pembuangan sampah.



Tampilan baru

Situs Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

<http://www.ampl.or.id>